

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH  
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

# **PROVINSI PAPUA**









**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH  
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

# **PROVINSI PAPUA**







## **Peta Pembinaan Provinsi Papua**

Jakarta: Bina Praja Press, 2022  
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo  
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press  
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:  
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
pid@litbangkemendagri.com  
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **TIM PENULIS**

**Pengarah:**

Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal

**Penanggungjawab:**

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri  
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri  
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri

**Penulis:**

1. Khusnul Khotimah, S.Stat
2. Isman, AP
3. Wellem Bendektus Abarua, S.STP

## **SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kepala Badan Strategi  
Kebijakan Dalam Negeri  
Kemendagri

**Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd**



## **SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH**

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

**Drs. Aferi S. Fudail, M.Si**



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR TABEL

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

## **BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA**

A. KABUPATEN BIAK NUMFOR	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	6
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN JAYAPURA	12
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN JAYAWIJAYA	21
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	22
Aspek Satuan Inovasi Daerah	23
D. KABUPATEN KEEROM	30
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	30
Aspek Satuan Inovasi Daerah	31
E. KABUPATEN MERAUKE	40
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	40
Aspek Satuan Inovasi Daerah	41
F. KABUPATEN MIMIKA	46
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	47
Aspek Satuan Inovasi Daerah	48
G. KABUPATEN NABIRE	54
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	55
Aspek Satuan Inovasi Daerah	56
H. KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	64
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	65
Aspek Satuan Inovasi Daerah	66
I. KABUPATEN SUPIORI	71
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	72
Aspek Satuan Inovasi Daerah	73



J. KABUPATEN TOLIKARA	79
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	80
Aspek Satuan Inovasi Daerah	80
K. KOTA JAYAPURA	86
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	87
Aspek Satuan Inovasi Daerah	88
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>95</b>

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Jayapura
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Jayapura
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Jayapura
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Jayapura
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Jayapura
- Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Jayapura
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Jayapura
- Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Jayapura



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Jayapura

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Jayawijaya

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jayawijaya

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Keerom

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Keerom

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Keerom

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Keerom

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Keerom

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Keerom

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Keerom

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Keerom

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Keerom

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Keerom

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Keerom

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Merauke

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Merauke

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Merauke

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Merauke

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Merauke

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Merauke

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Merauke

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Merauke

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Merauke

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Merauke

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mimika

Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mimika

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mimika

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mimika

Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mimika

Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mimika

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mimika

Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mimika

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mimika

Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mimika

Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Nabire

Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Nabire

Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Nabire

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Nabire

Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Nabire

Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Nabire

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Nabire

Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Nabire

Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Nabire

Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nabire

Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Supiori

Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Supiori

Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Supiori

Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Supiori

Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Supiori



Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Supiori

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Supiori

Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Supiori

Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Supiori

Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Supiori

Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tolikara

Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tolikara

Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tolikara

Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tolikara

Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tolikara

Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tolikara

Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tolikara

Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tolikara

Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tolikara

Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tolikara

Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Jayapura

Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura

Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Jayapura

Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Jayapura

Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Jayapura

Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Jayapura

Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Jayapura

Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Jayapura

Gambar 119. Diagram rsentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Jayapura<sup>91</sup>

Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Jayapura

Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Jayapura

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Biak Numfor beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Jayapura beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Jayawijaya beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Keerom beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Merauke beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Merauke beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Nabire beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Pegunungan Bintang beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Supiori beserta Skor Kematangannya

Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Tolikara beserta Skor Kematangannya

Tabel 12. Daftar Inovasi Kota Jayapura Numfor beserta Skor Kematangannya





# ***BAB I***

---

## ***PENDAHULUAN***



## A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman [indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id](https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id). Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelebagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara



kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

## **B. MANFAAT**

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Papua. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

## **C. TUJUAN**

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

## **D. RUANG LINGKUP**

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, dan Kota Jayapura.

Informasi capain kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Papua yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

**Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah**

Aspek	Variabel	Indikator
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
		Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian
	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	
	Roadmap SiDA	
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan

Aspek	Variabel	Indikator
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah





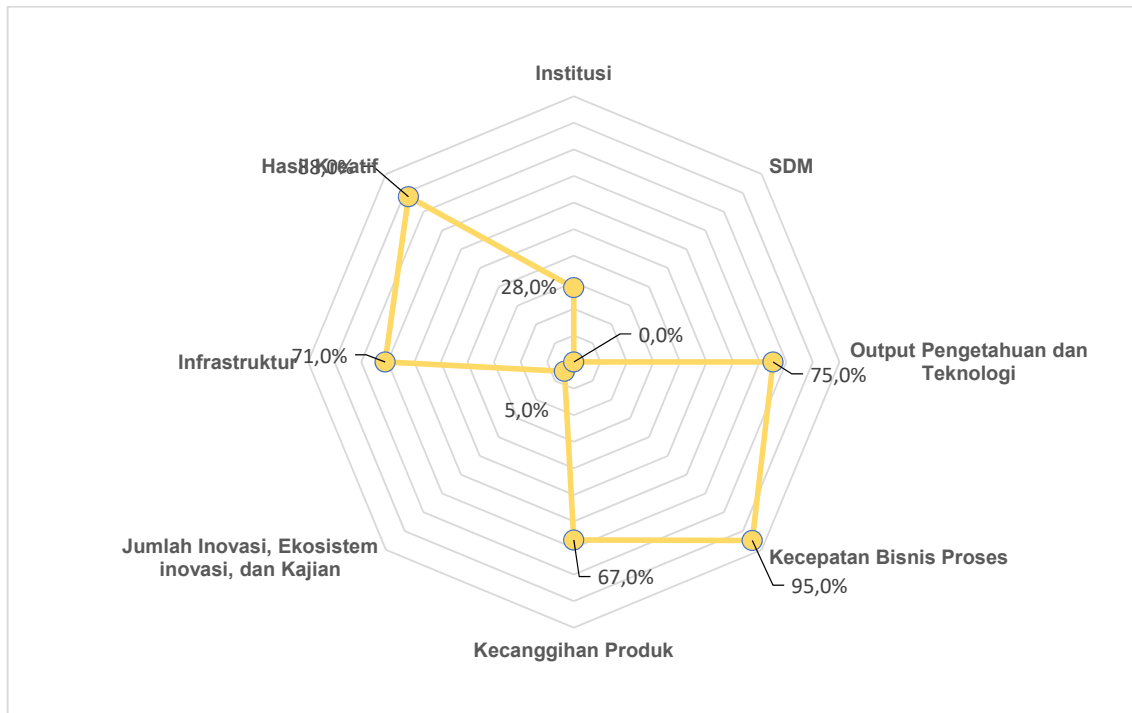
# ***BAB II***

---

## ***INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA***



## A. KABUPATEN BIAK NUMFOR



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Biak Numfor

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Biak Numfor memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses, yaitu sebesar 95,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Kecepatan Bisnis Proses sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal atau berada pada parameter 3. Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 5,0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

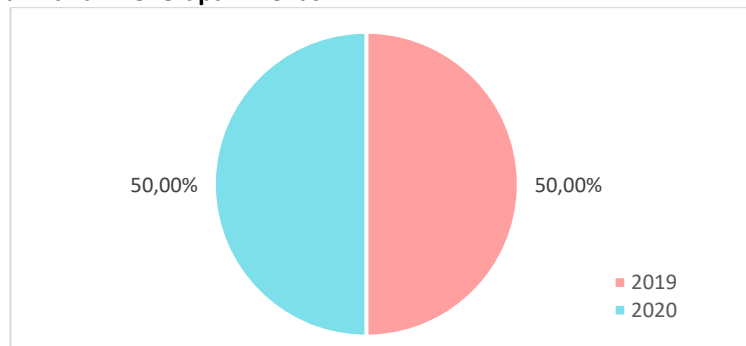


Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Biak Numfor

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Biak Numfor mengalami perkembangan yang signifikan pada Indikator Kualitas Peringkatan Perizinan, yaitu mencapai angka 119.05%. Adapun indicator-indikator lainnya berada di angka 0% yang artinya tidak ada perkembangan terjadi.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

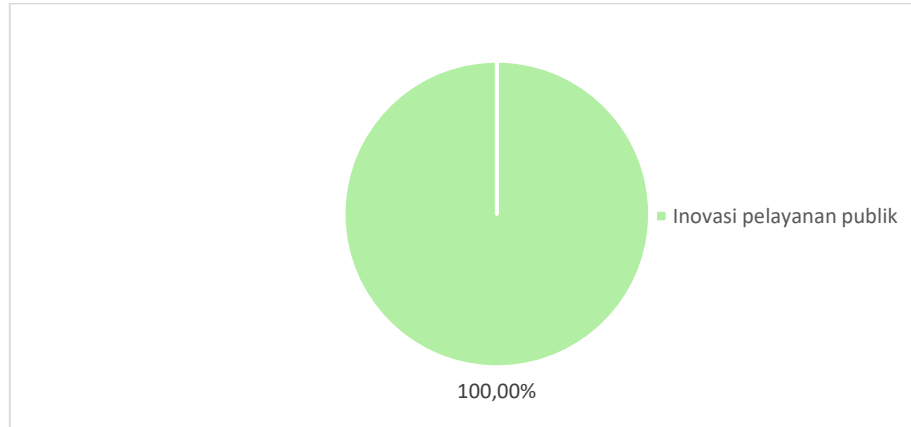


Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Biak Numfor

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, dari keseluruhan total inovasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor yaitu sebanyak 2 inovasi, 50% diantaranya (sebanyak 1 inovasi) sudah mulai diperkenalkan dan diterapkan pada tahun 2019, sedangkan 50% inovasi lainnya dilaporkan oleh Kabupaten Biak Numfor diterapkan pada tahun 2020.



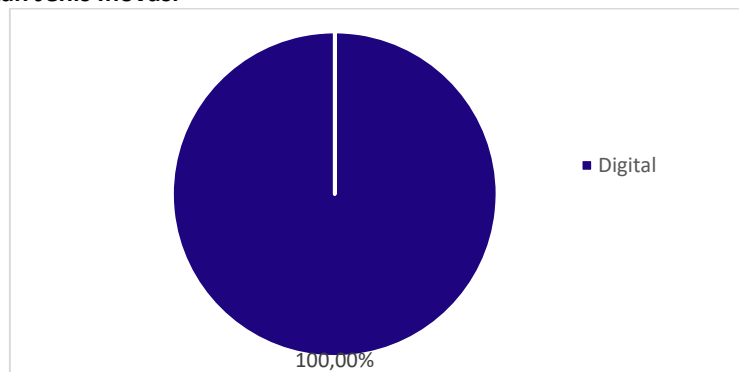
**b. Berdasarkan Bentuk Inovasi**



*Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Biak Numfor*

Berdasarkan diagram yang disajikan pada Gambar 4 di atas, diketahui bahwa inovasi secara keseluruhan yang ada pada Kabupaten Biak Numfor berupa Inovasi Pelayanan Publik. Hal ini ditunjukkan oleh persentase diagram yang mencapai 100% pada Inovasi pelayanan public. Tidak ada bentuk inovasi tata kelola pemerintahan maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

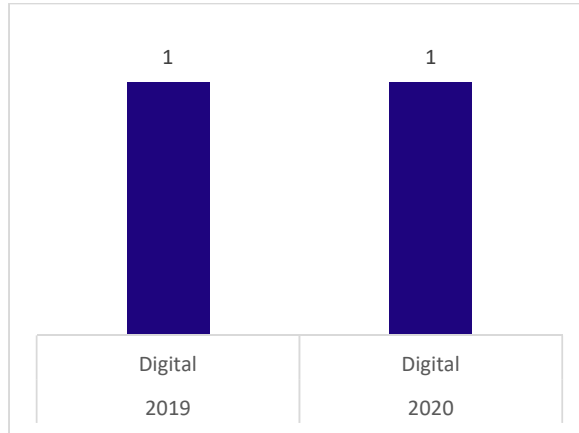
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Biak Numfor*

Jenis inovasi daerah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Digital, Non Digital dan Teknologi. Persentase masing-masing jenis inovasi daerah pada Kabuapten Biak Numfor ditampilkan pada Gambar 5 dalam bentuk diagram. Diagram pada gambar 5 menunjukkan bahwa keseluruhan inovasi pada Kabupaten Biak Numfor berupa inovasi digital, yaitu mencapai 100%.

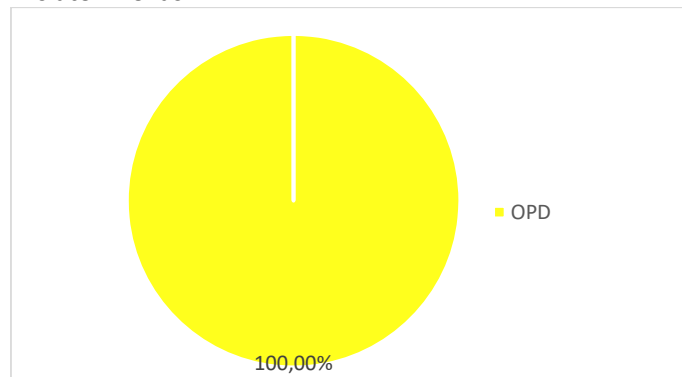
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



*Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Biak Numfor*

Berdasarkan grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Biak Numfor pada Gambar 6, diketahui bahwa jumlah inovasi daerah pada Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, melainkan sama dengan jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi. Adapun jenis inovasi yang diterapkan di tahun 2019 dan 2020 sama yaitu berupa inovasi digital.

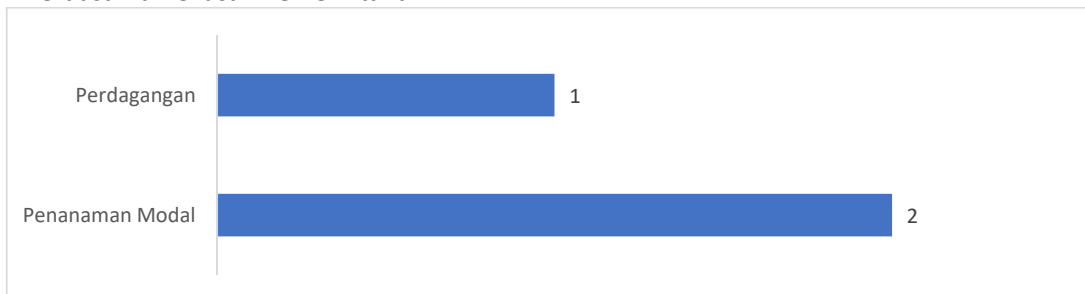
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Biak Numfor*

Keseluruhan inovasi yang terdapat pada Kabupaten Biak Numfor diinisiasi oleh OPD. Hal ini ditunjukkan oleh diagram persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Gambar 7 yang memperlihatkan bahwa OPD mencapai persentase 100%.

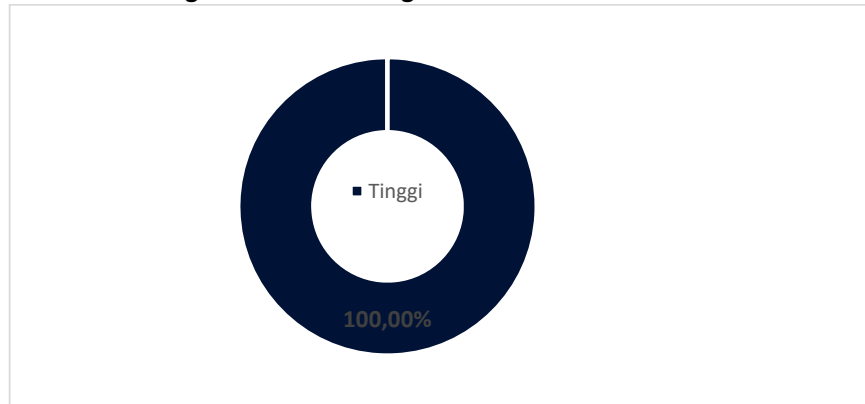
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Biak Numfor

Gambar 8 menunjukkan grafik jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan pada kabupaten Biak Numfor. Grafik tersebut menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Biak Numfor terbagi atas dua urusan pemerintahan, yaitu urusan perdagangan dan urusan penanaman modal.

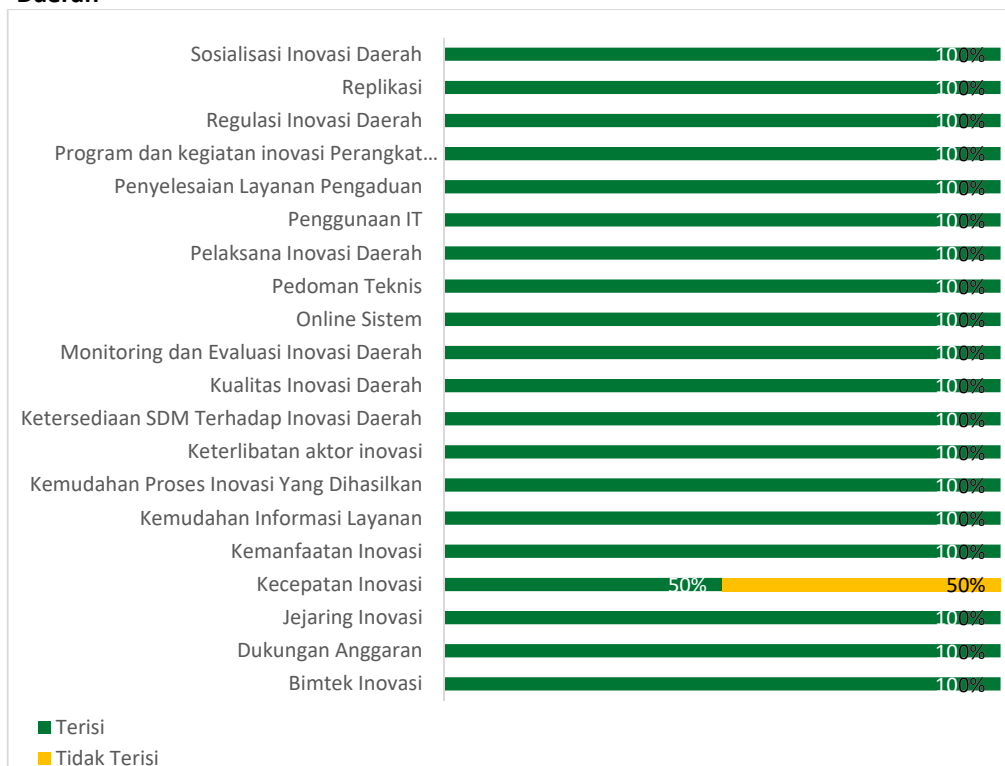
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Biak Numfor

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, keseluruhan inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu mencapai 100%. Artinya inovasi yang terdapat pada Kabupaten Biak Numfor memiliki skor kematangan di atas 100.

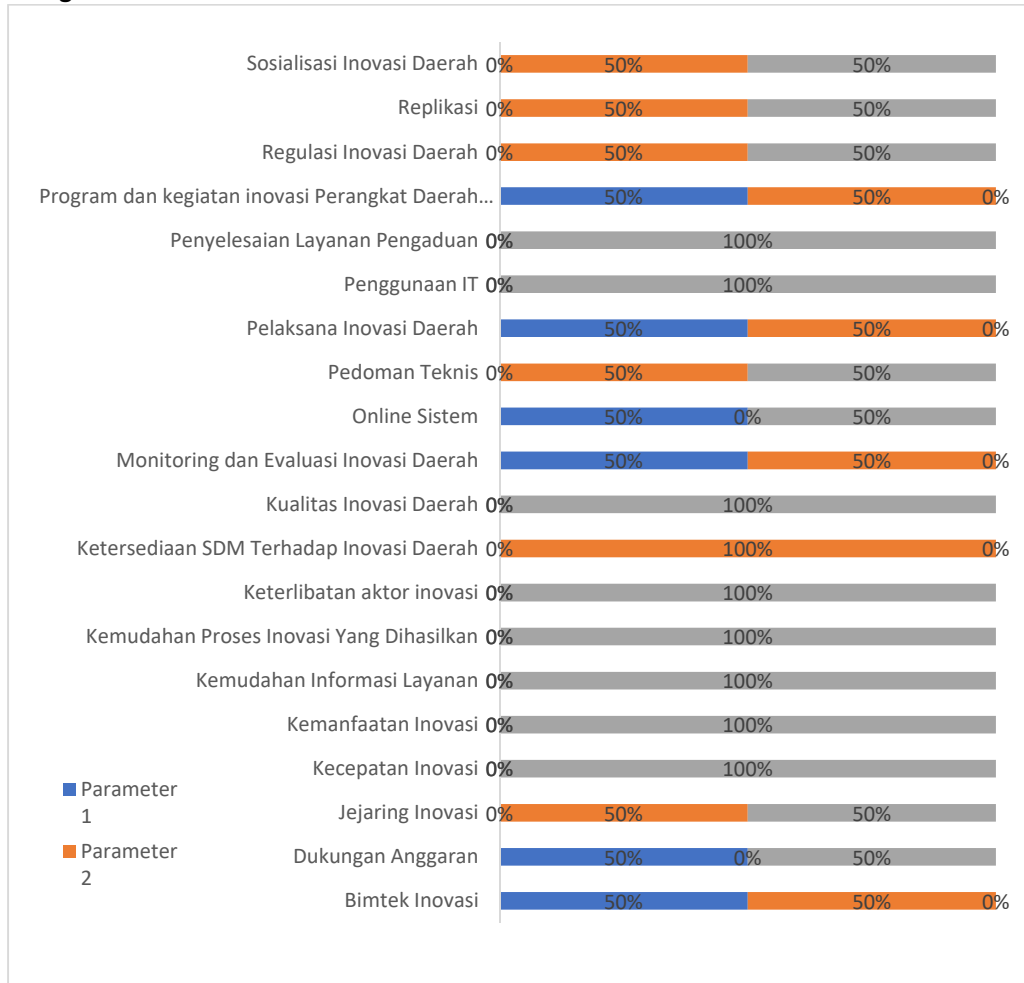
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Biak Numfor*

Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Biak Numfor sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 10 yang memperlihatkan dominasi persentase keterisian data (ditunjukkan dengan warna hijau) hampir di seluruh indikator. Hanya ada satu indikator yang tidak sepenuhnya terisi, yaitu indikator kecepatan inovasi. Pada indikator kecepatan inovasi, persentase keterisian data pendukung hanya mencapai 50%.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah*

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat delapan indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) sebesar 100%, yaitu indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi. Berikutnya hanya ada satu indikator yang tingkat keterisian parameternya mencapai 100% untuk parameter 2, yaitu indikator Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah. Sedangkan indikator-indikator lainnya terdiri atas gabungan tingkat keterisian dua level parameter, baik level parameter 1 dengan 2, parameter 1 dengan



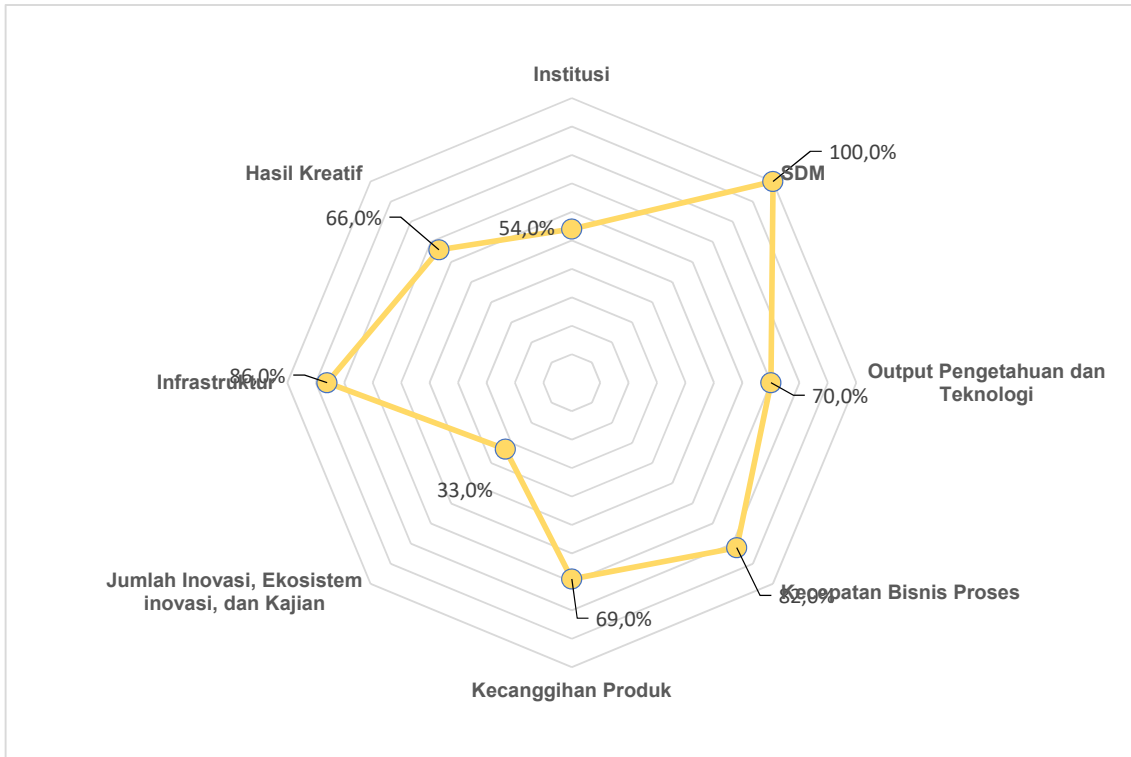
3, maupun parameter 2 dengan 3. Tidak ada indikator yang di dalamnya mencakup keterisian ketiga parameter.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Biak Numfor beserta Skor Kematangannya**

*Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Biak Numfor beserta Skor Kematangannya*

<b>Nama Inovasi</b>	<b>Skor Kematangan</b>
YAP WAIRON (YAKIN AMAN DAN PRODUKTIF, WAJIB ADAPTASI DAN IKUTI PROTOKOL KESEHATAN)	115
TONG CEPAT KAM PUAS (KOFUR FASAU MGOMARISEN) IJIN JADI DI TEMPAT	122

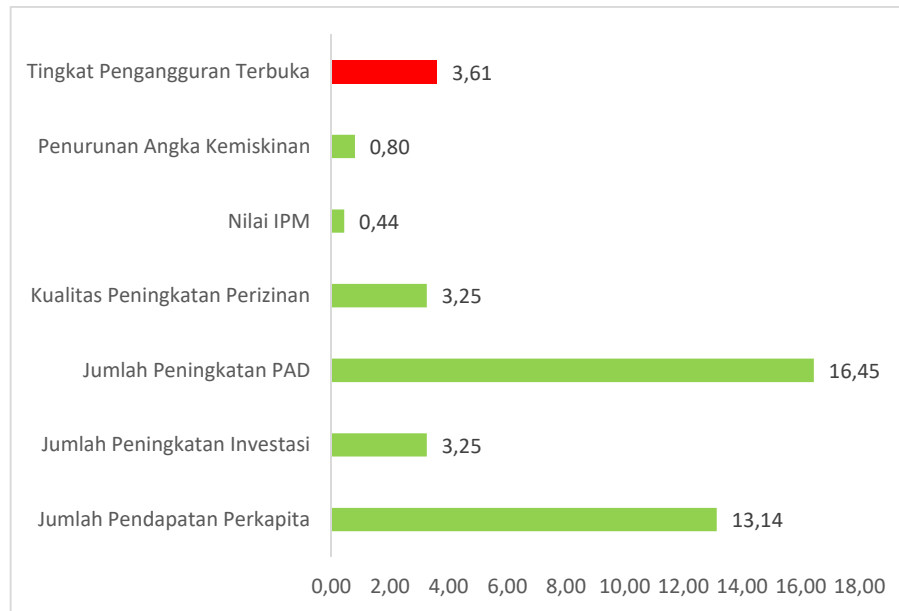
## B. KABUPATEN JAYAPURA



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Jayapura

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Jayapura memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 100.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal atau berada pada parameter 3. Variabel lainnya yang memiliki skor tinggi adalah variabel Infrastruktur dan Kecepatan Bisnis Proses, yaitu secara berturut-turut memiliki skor 68.0% dan 82.0%. Di sisi lain, variabel dengan skor terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian, yaitu 33.0%.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

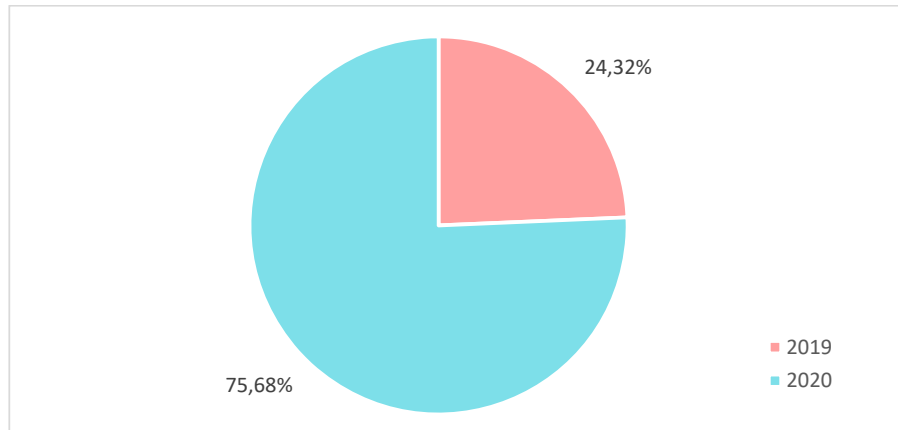


*Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Jayapura*

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Jayapura secara mayoritas mengalami perkembangan. Perkembangan yang signifikan terlihat pada indikator Jumlah Peningkatan PAD dan Jumlah Pendapatan Perkapita, yaitu mencapai angka 16.45% dan 13.14%. Adapun indikator lainnya yang mengalami perkembangan adalah indikator penurunan angka kemiskinan, nilai IPM, kualitas peningkatan perizinan, dan jumlah peningkatan investasi, yang secara berturut-turut sebesar 0.80%, 0.44%, dan 3.25% (untuk kualitas peningkatan perizinan, dan jumlah peningkatan investasi). Selanjutnya, indikator yang juga mengindikasikan peningkatan kualitas adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu sebesar 3.61%. Artinya pengangguran terbuka pada Kabupaten Jayapura mengalami penurunan sebesar 3.61%. Secara keseluruhan, kualitas Aspek Satuan Pemerintahan Kabupaten Jayapura mengalami perkembangan yang sangat baik.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

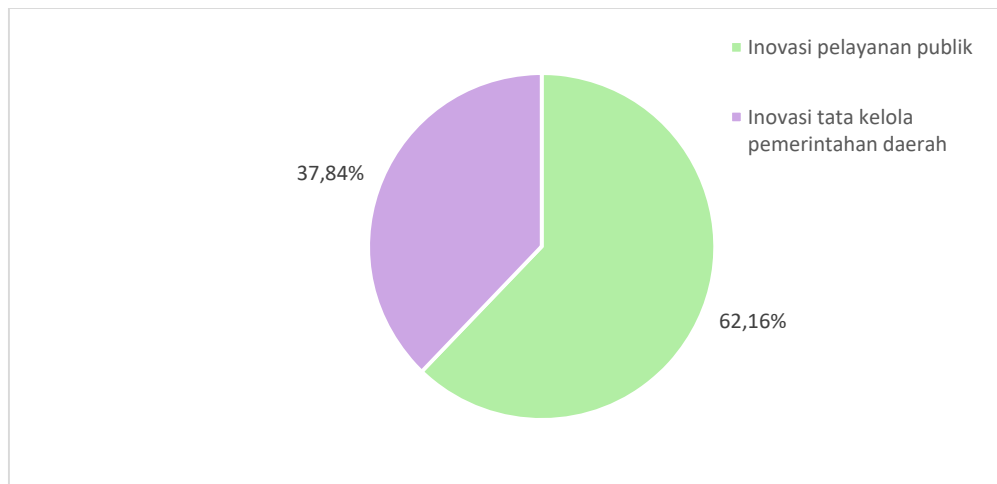
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Jayapura

Gambar 14 menampilkan diagram persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Jayapura. Berdasarkan Gambar 14 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayapura telah diterapkan sejak tahun 2020. Hal ini ditunjukkan oleh persentase inovasi tahun 2020 mencapai 75.68%. Sedangkan 24.32% lainnya dilaporkan pada tahun 2019.

### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

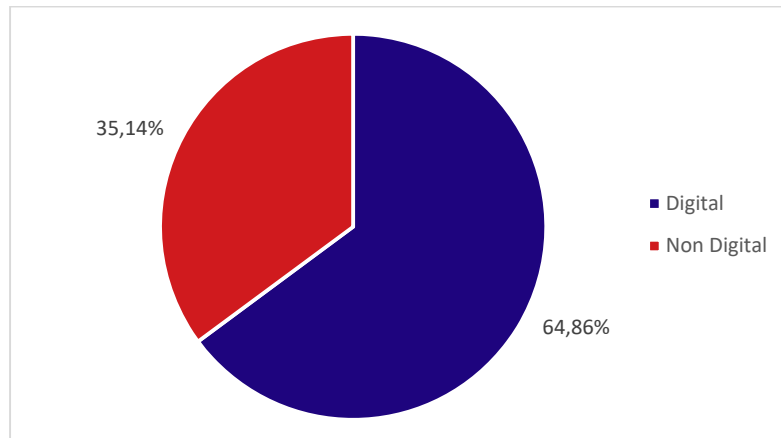


Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Jayapura

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayapura, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintah daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum terlapor. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan public, yaitu mencapai 62.16%. Sedangkan inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan sebesar 37.84%.



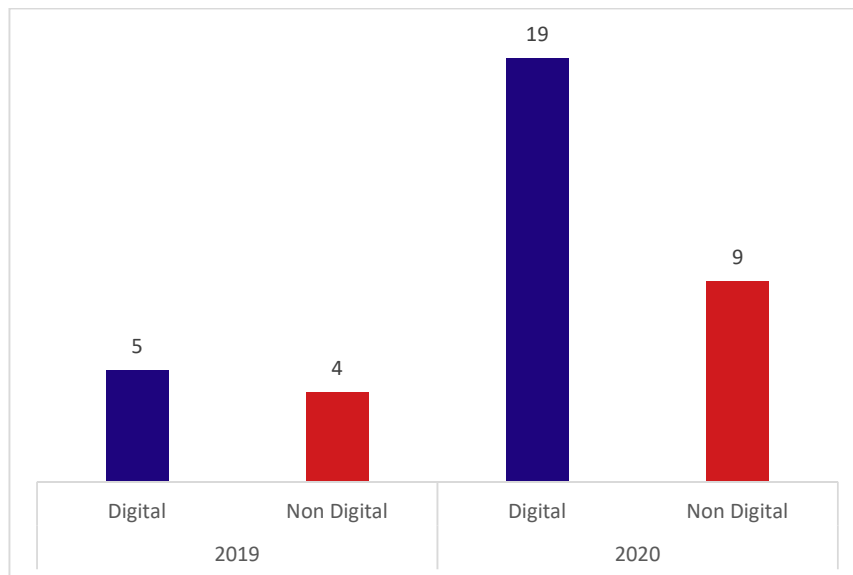
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Jayapura*

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebanyak 64.86% inovasi daerah pada Kabupaten Jayapura merupakan inovasi digital. Sedangkan 34.14% lainnya merupakan inovasi non digital.

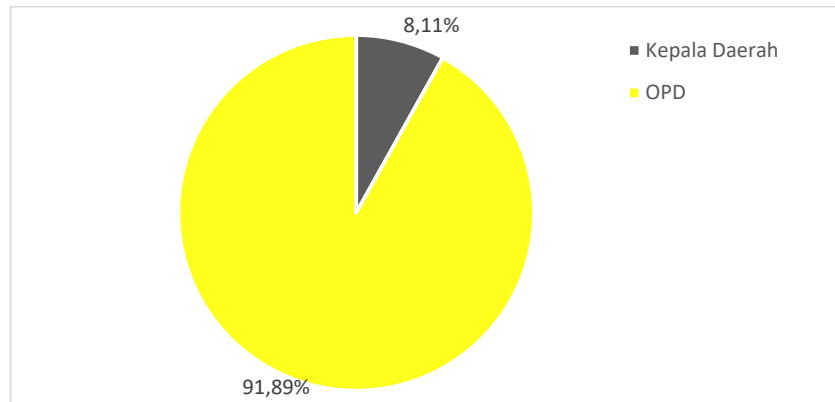
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



*Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Jayapura*

Berdasarkan Gambar 17 yang menunjukkan grafik progress jumlah inovasi berdasarkan tahun dan jenis inovasi, diketahui bahwa secara umum jumlah inovasi baik digital maupun non digital mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Peningkatan jumlah inovasi digital lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah inovasi non digital.

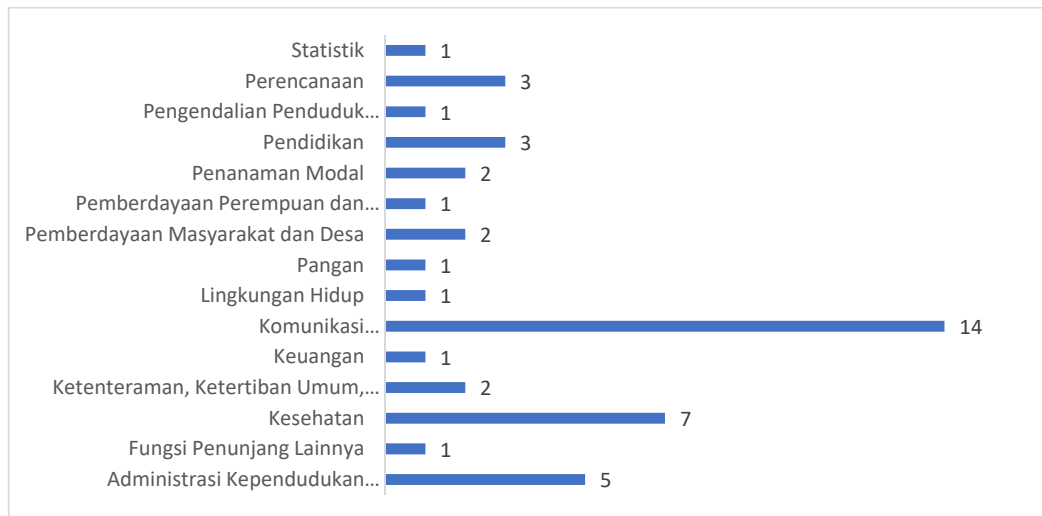
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Jayapura*

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu mencapai 91,89%, sementara 8.11% sisanya merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

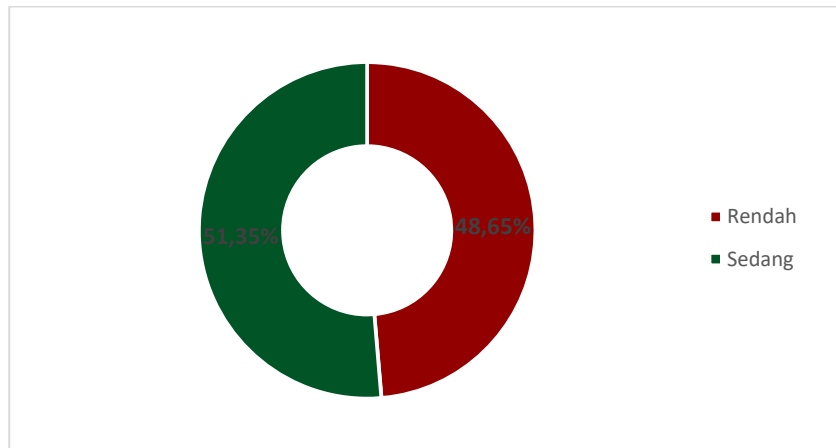
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



*Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Jayapura*

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Jayapura berdasarkan urusan pemerintahan ditampilkan pada Gambar 19. Mayoritas urusan inovasi daerah pada Kabupaten Jayapura adalah inovasi pada urusan Komunikasi dan Informatika yaitu sejumlah 14 inovasi. Urusan berikutnya adalah Kesehatan dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan jumlah inovasi secara berturut-turut sebanyak 7 dan 5 inovasi.

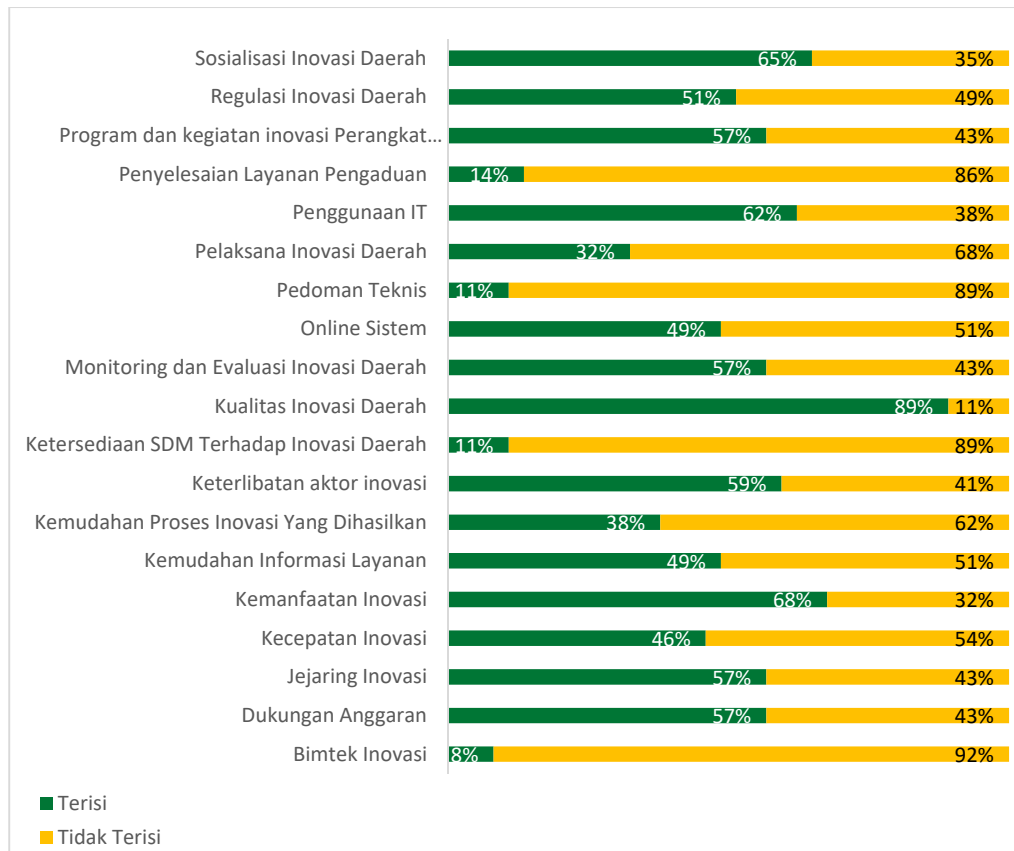
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



*Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Jayapura*

Tabel 20 menunjukkan diagram persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan. Berdasarkan diagram tersebut, diketahui bahwa inovasi-inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayapura berada pada tingkat skor kematangan rendah dan sedang. Sebanyak 51.35% inovasi berada pada tingkat kematangan sedang dan 48.5% inovasi berada pada tingkat kematangan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa inovasi yang ada pada Kabupaten Jayapura memiliki skor kematangan di bawah 100 karena tidak ada inovasi yang tergolong memiliki skor kematangan tinggi.

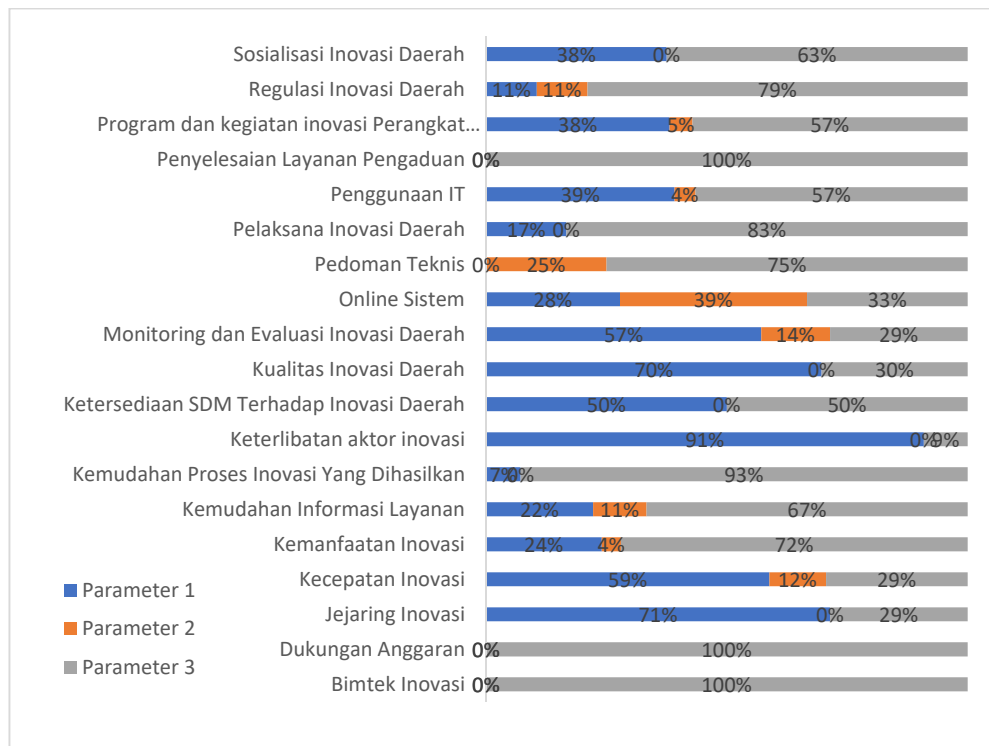
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura*

Berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung dalam inovasi daerah Kabupaten Jayapura pada Gambar 20, diketahui bahwa terdapat 10 data pendukung inovasi yang memiliki tingkat keterisian data tinggi, yaitu lebih dari 50% keterisian data dukung dengan tingkat keterisian data tertinggi berada pada data dukung Kualitas Inovasi Daerah, yaitu mencapai 89%. Sebaliknya, terdapat 8 data pendukung inovasi yang memiliki tingkat keterisian data kurang dari 50%, dengan tingkat keterisian data terendah berada pada data dukung Bimtek Inovasi, yaitu hanya sebesar 6%.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah*

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Dukungan Anggaran, dan Bimtek Inovasi, dengan persentase maksimal 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Sebaliknya indikator dengan keterisian parameter 3 paling rendah adalah indikator keterlibatan aktor inovasi. Tingkat keterisian parameter 2 pada indikator-indikator inovasi daerah Kabupaten Jayapura tergolong rendah. Hanya terdapat Sembilan indikator dari total 19 indikator yang memiliki keterisian parameter 2 dengan persentase yang tergolong rendah. Dari kesembilan indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua), yang memiliki keterisian parameter dua tertinggi adalah Online Sistem dengan persentase 39%, sedangkan keterisian parameter dua terendah berada pada indikator Penggunaan IT dan Kemanfaatan Inovasi yaitu sebesar 4%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi yaitu sebesar 91% artinya 91% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Keterlibatan Aktor Inovasi.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Jayapura beserta Skor Kematangannya**

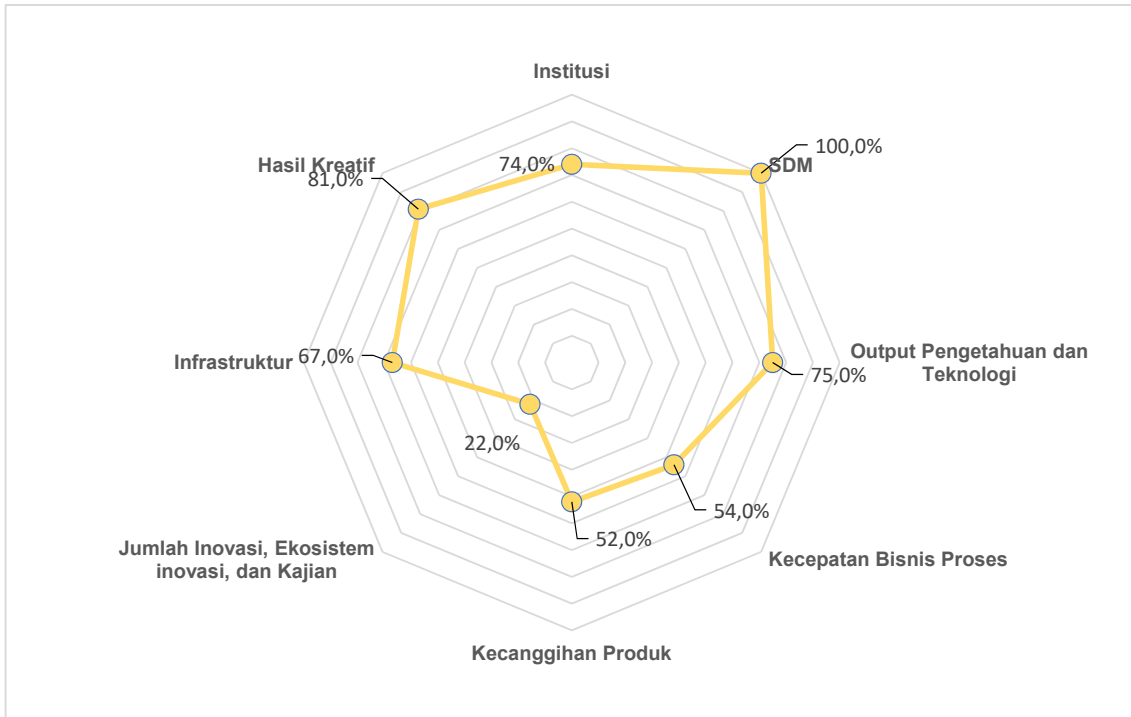
*Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Jayapura beserta Skor Kematangannya*

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Distrik Membangun, Membangun Distrik	75
Program kebangkitan masyarakat adat	74
Sim Foi Distrik - aplikasi Sistem Informasi Distrik	35



<b>Nama Inovasi</b>	<b>Skor Kematangan</b>
WA Online Dukcapil	40
Jalin MA (Jayapura Layanan Informasi Investasi Masyarakat Adat)	60
KLIK POIN (Klinik Informasi Konsultasi Promosi Investasi) Kabupaten Jayapura	76
DUKCAPIL MERANGKUL ANAK	29
e-pengaduan.jayapurakab	29
Dami Kari Yo Sekolah Adat Kampung Doromona	76
DOTOPOI Database Organisasi Kemasyarakatan Dan Partai Politik	94
Inovasi Website Desa/Kampung Adat	42
Inovasi SentaniTV	46
Inovasi Migrasi Radio Kenambai Umbai Analog ke Digital	33
DIGITALISASI KANTOR DISTRIK DENGAN V-SAT	71
COMMAND CENTER PUSAT DATA	72
SiDAPUR - Sistem Data Pemerintah Kabupaten Jayapura	50
SIBERKAT - Sistem Informasi Berbasis Kampung Adat	58
Inovasi Kamus Bahasa Sentani	50
Pemantik - Pace Mace Admin TIK	98
Inkubasi Digital Kominfo	39
Onomi Niphi	40
KAMPUNG TIK JAYAPURA	37
DAfP - DATA ANALYSIS For PLANNING	66
Hotel RUTUSE - RUMAH TUNGGU KANABISE	42
SIAMAL- Siaga Malaria	61
BPK – Badan Peduli Kesehatan Kenabise	47
Pudasiandi Sentani	45
PIKDis Airu	49
Bebabeba - Berhenti Buang Air Besar Sembarangan	33
Pusat Inovasi dan Kewirausahaan Distrik Yokari	49
Kampong Mata Ruma Berencana Yaugabsa	59
Puanmidi Airu	39
Puansudalih Airu	52
Pu laman Tribso Distrik Airu	32
Pulayar Distrik Airu	62
Pu Layapen Distrik Airu	57
Pu Layakes Distrik Airu	60

### C. KABUPATEN JAYAWIJAYA



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Jayawijaya

Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Jayawijaya disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 23. Melalui diagram tersebut, Kabupaten Jayawijaya memiliki skor capaian tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 100.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor maksimal atau berada pada parameter 3. Variabel lainnya yang memiliki capaian skor yang tergolong tinggi adalah Variabel Hasil Kreatif, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Institusi, yaitu secara berturut-turut sebesar 81.0%, 75%, dan 74%. Di sisi lain, variabel dengan skor terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian, yaitu sebesar 22.0%.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



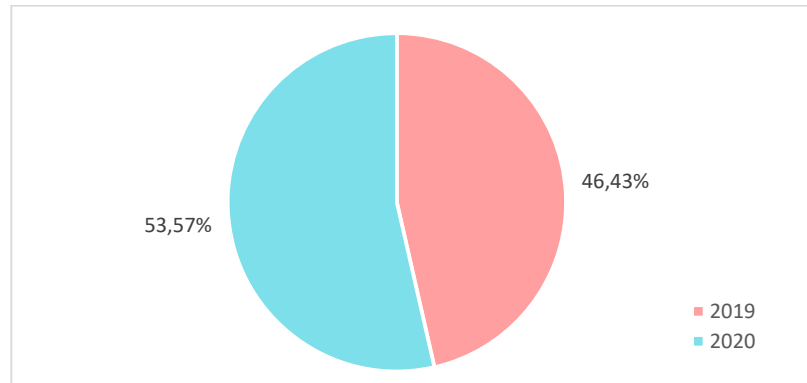
Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 24 menunjukkan grafik capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah pada Kabuapten Jayawijaya. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada Indikator Jumlah Peningkatan PAD yang sangat tinggi mencapai 31.12%. Penurunan juga terjadi apda aspek jumlah pendapatan perkapita sebesar 5.05%, melebihi penurunan pada standar nasional parameter indeks inovasi daerah yaitu sebesar -1.85%.

Sementara itu, peningkatan capaian satuan pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya terjadi pada aspek Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Peningkatan Investasi, dan Nilai IPM. Peningkatan cukup tinggi hanya terjadi pada aspek Kualitas Peningkatan Perizinan dan Jumlah Peningkatan Investasi dengan persentase peningkatan sama-sama mencapai 18.26%. Adapun peningkatan yang terjadi pada aspek Nilai IPM sebesar 0.6%. Indikator lainnya yang juga menunjukkan perkembangan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jayawijaya adalah indicator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan. Skor kedua indicator tersebut berturut-turut sebesar 0.20% dan 1.90% yang artinya pengangguran terbuka di Kabupaten Jayawijaya mengalami penurunan sebesar 0.2% dan angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1.90%. Hal ini jauh lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan pengangguran terbuka sebesar 0.92% dan penurunan angka kemiskinan yang hanya sebesar 0.02%. Oleh karena itu, secara keseluruhan Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Jayawijaya mengalami perkembangan,

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

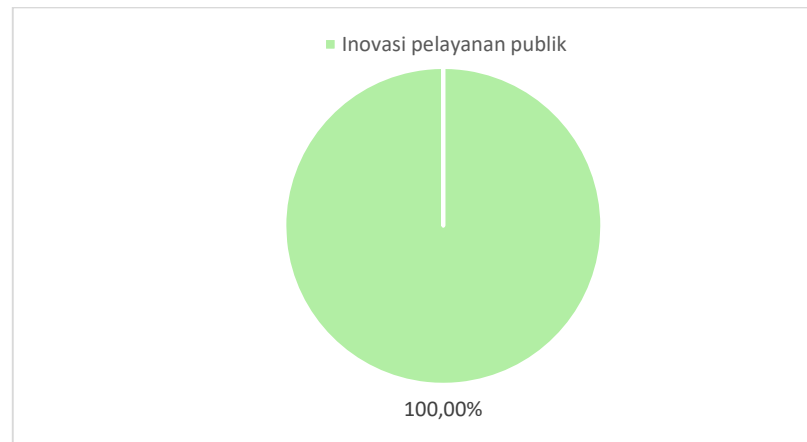
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya

Gambar 25 menunjukkan diagram persentase inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah inovasi yang dilaporkan pada tahun 2019. Persentase inovasi yang dilaporkan pada tahun 2020 sebesar 53.57% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 46.43%. Peningkatan persentase dari 2019 menuju 2020 ini menunjukkan bahwa terdapat kemajuan kinerja dalam menciptakan inovasi.

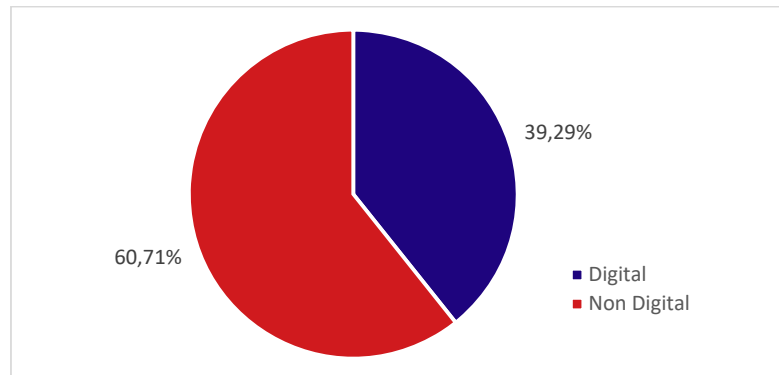
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya

Bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayawijaya seluruhnya adalah inovasi pelayanan public. Hal ini didasarkan pada Gambar 26 yang menunjukkan Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya. Diagram memperlihatkan bahwa inovasi pelayanan public mencapai persentase 100%.

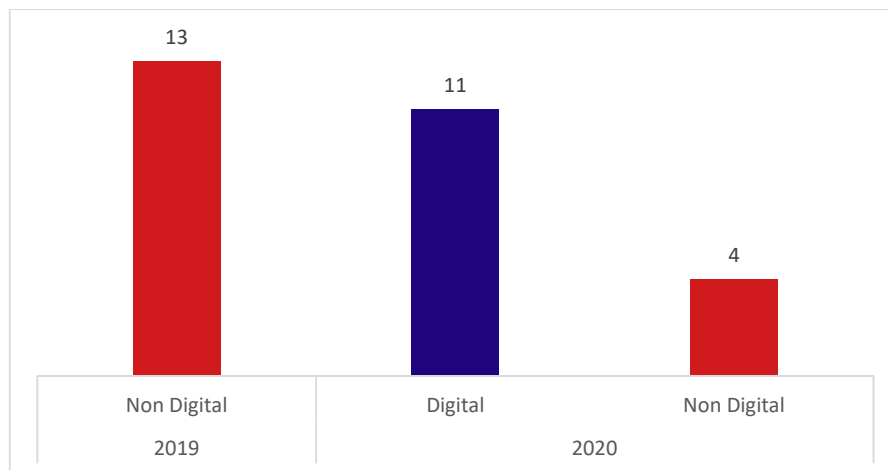
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya*

Secara keseluruhan inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Jayawijaya didominasi oleh inovasi NonDigital. Hal ini dibuktikan oleh Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya yang ditampilkan pada Gambar 27 di atas. Pada gambar tersebut terlihat bahwa persentase inovasi jenis non digital mencapai 60.71%, sedangkan 39.29% sisanya merupakan inovasi jenis Digital.

**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



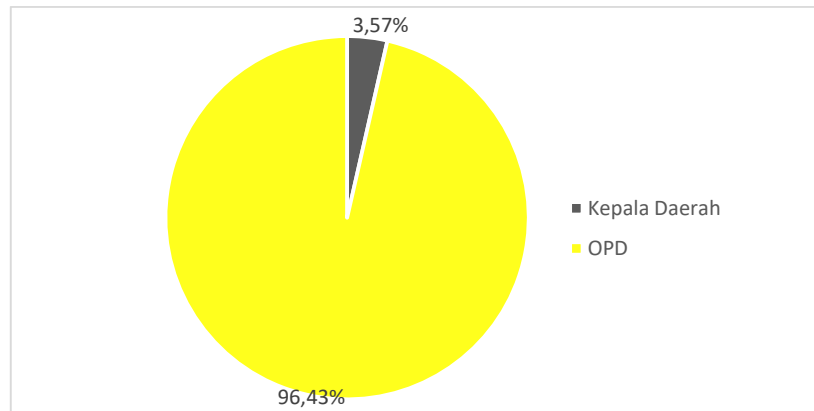
*Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Jayawijaya*

Gambar 28 menampilkan grafik progress jumlah inovasi berdasarkan tahun dan jenis inovasi di Kabupaten Jayawijaya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi kemajuan inovasi jenis digital yang semula pada tahun 2019 tidak ada inovasi, pada tahun 2020 sebanyak 11 inovasi dilaporkan. Fakta tersebut menunjukkan tingkat pemanfaatan teknologi digital meningkat. Sebaliknya, terjadi penurunan jumlah inovasi jenis non digital dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019 tercatat 13 inovasi non digital dilaporkan, sedangkan pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 4 inovasi non digital. Namun demikian, penurunan jumlah inovasi non digital dalam hal ini tidak berarti menurunkan kinerja Kabupaten Jayawijaya. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 inovasi yang diciptakan sudah berbasis digital. Selain itu, peningkatan kinerja juga dibuktikan dengan peningkatan jumlah



inovasi secara keseluruhan, dimana pada tahun 2019 terdapat total 13 inovasi, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi total 15 inovasi.

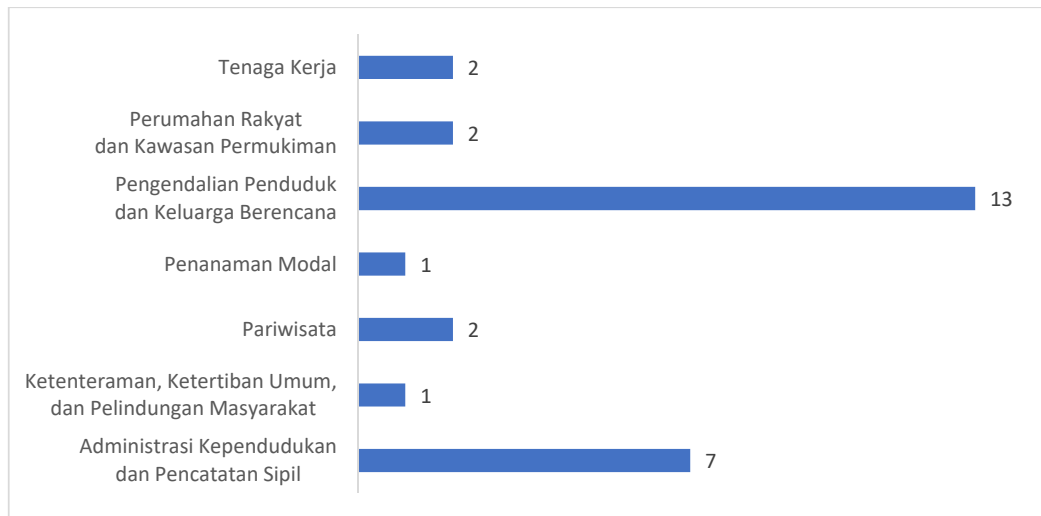
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya*

Gambar 29 menunjukkan Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan gambar 29 dapat diketahui bahwa Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu mencapai 96.43%. Sedangkan 3.5% lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

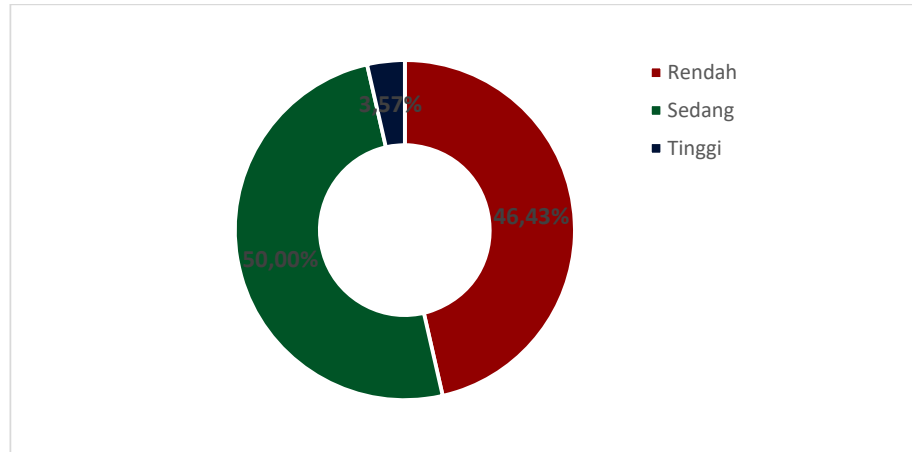


*Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Jayawijaya*

Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Jayawijaya ditampilkan dalam bentuk diagram batang pada Gambar 30. Melalui grafik tersebut terlihat bahwa sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Jayawijaya berdasarkan urusan pemerintahan belum merata. Mayoritas urusan inovasi didominasi oleh urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan jumlah berturut-turut sebanyak 13 dan 7

inovasi. Adapun jumlah inovasi di urusan pemerintah lainnya cenderung seragam, yaitu sebanyak 2 inovasi di urusan pemerintahan Tenaga Kerja, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pariwisata, selanjutnya sebanyak 1 inovasi pada urusan pemerintahan Penanaman Modal dan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

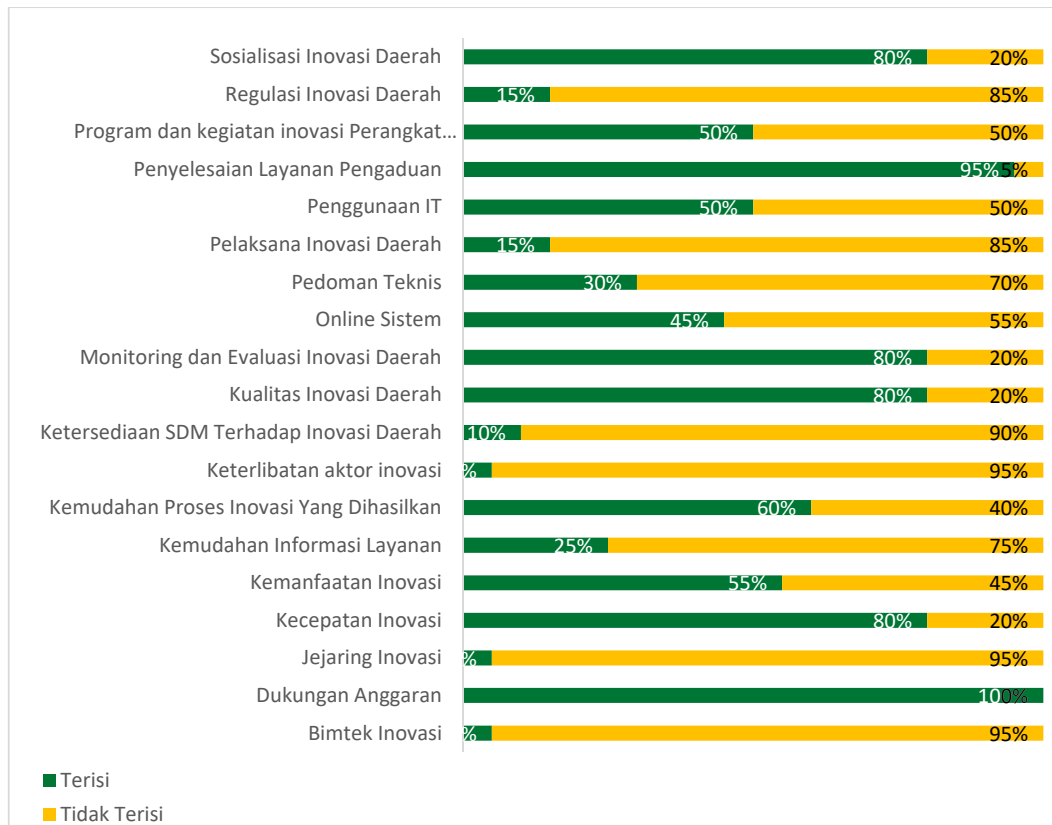
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



*Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Jayawijaya*

Gambar 31 menunjukkan diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayawijaya masuk ke dalam tiga kategori, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Namun demikian, hasil skor kematangan didominasi oleh kategori sedang, yaitu sebesar 50.00%. Kategori berikutnya yang juga memiliki persentase tinggi adalah kategori skor kematangan rendah, yaitu mencapai 46.43%. Sedangkan skor kematangan kategori tinggi hanya sebesar 3.57%. Dengan kata lain, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayawijaya memiliki skor kematangan kurang dari atau sama dengan 100, sedangkan inovasi dengan skor kematangan di atas 100 hanya sedikit.

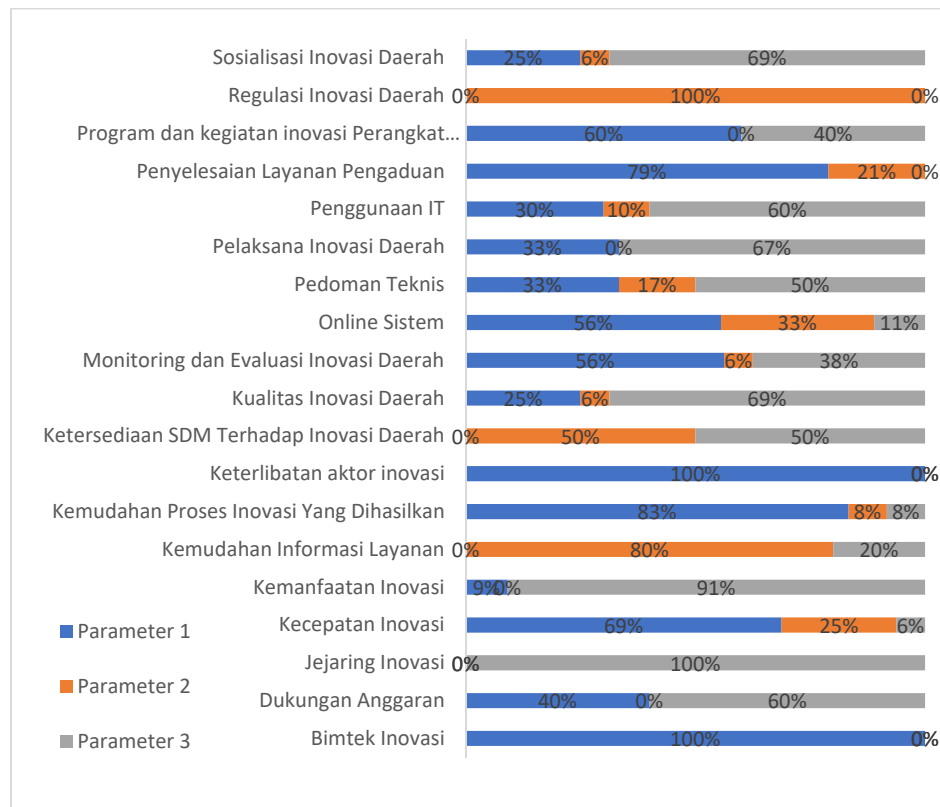
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jayawijaya*

Berdasarkan grafik Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jayawijaya yang disajikan pada Gambar 32, diketahui inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah lebih banyak dibanding inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerahnya. Rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 53.42% sedangkan 46.58% lainnya telah terisi data pendukung. Dari 19 indikator satuan inovasi, sebanyak 6 indikator memiliki tingkat keterisian tergolong sangat tinggi lebih dari sama dengan 80% dengan persentase keterisian maksimal (100%) berada pada indikator Dukungan Anggaran. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayawijaya telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Indikator yang memiliki tingkat keterisian tinggi lainnya adalah Penyelesaian Layanan Pengaduan, Sosialisasi Inovasi Daerah, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, dan Kecepatan Inovasi. Sebaliknya, indikator dengan tingkat ketidakterisian paling tinggi, yaitu mencapai 95% ada 3 indikator, yaitu indikator Keterlibatan Aktor Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Bimtek Inovasi. Dengan kata lain, tingkat keterisian pada ketiga indikator tersebut hanya sebesar 5%.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah*

Gambar 33 menunjukkan grafik tingkat keterisian parameter dalam Indikator satuan inovasi daerah pada Kabupaten Jayawijaya. Melalui grafik tersebut, diketahui bahwa dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung, 42% diantaranya tergolong parameter 1, 19,05% termasuk data parameter 2, dan 38,89% tergolong data dukung parameter 3. Indikator dengan tingkat keterisian data dukung parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Jejaring Inovasi dengan persentase mencapai 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Jejaring Inovasi terdiri atas data dukung kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi dengan persentase 100%.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Jayawijaya beserta Skor Kematangannya**

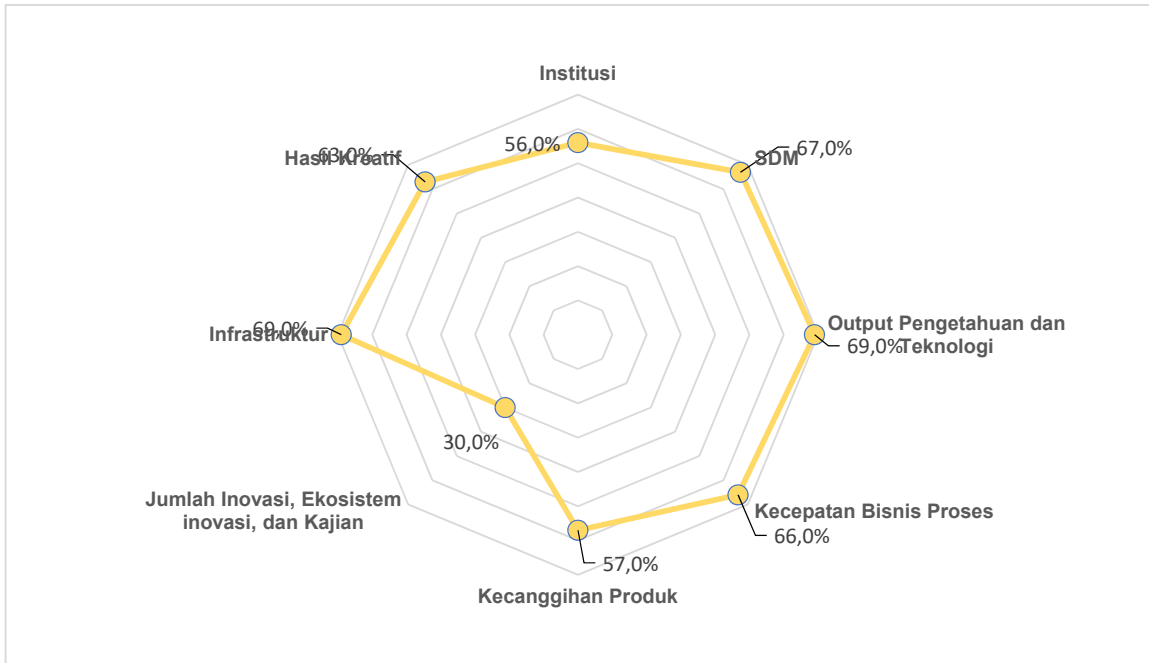
*Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Jayawijaya beserta Skor Kematangannya*

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Restoran	0
PTSP C -19	0
PASAR MODERN C 19	0

Pasar Tradisional C-19	0
Sistim Pendataan Rumah Dinas	54
Sistim pendataan tanah aset Pemda Kabupaten Jayawijaya	54
Pendaftaran Organisasi Masyarakat, LSM, dan Organisasi Profesi secara Online	54
Pelayanan KK Online	104
Statistik Kependudukan Jayawijaya	61
Adminduk Harian Jayawijaya	62
Lampid Jayawijaya	73
Kartu Identitas Anak Jayawijaya Online	64
Layanan Akta Kelahiran Jayawijaya Online	45
Layanan Pindah Keluar Penduduk Jayawijaya Online	37
Kampung KB Wamena	77
Kampung KB Asologaima	30
Kampung KB Kurulu	29
Kampung KB Musatfak	66
Kampung KB Asolokobal	48
Kampung KB Walelagama	11
Kampung KB Hubikosi	14
Kampung KB Pelebaga	62
Kampung KB Bolakme	65
Kampung KB Yalengga	9
Kampung KB Wollo	63
Kampung KB Trikora	61
Kampung KB Napua	64



#### D. KABUPATEN KEEROM



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Keerom

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Keerom memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur dan Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu sebesar 69.0%. Namun, persentase tertinggi tidak mencapai 70%. Hal ini menunjukkan variabel ukur di Kabupaten Keerom secara umum berada pada nilai yang cukup, tidak tinggi. Selanjutnya variabel ukur indeks di Kabupaten Keerom yang memiliki skor persentase terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian dengan persentase sebesar 30.0%.

#### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Keerom

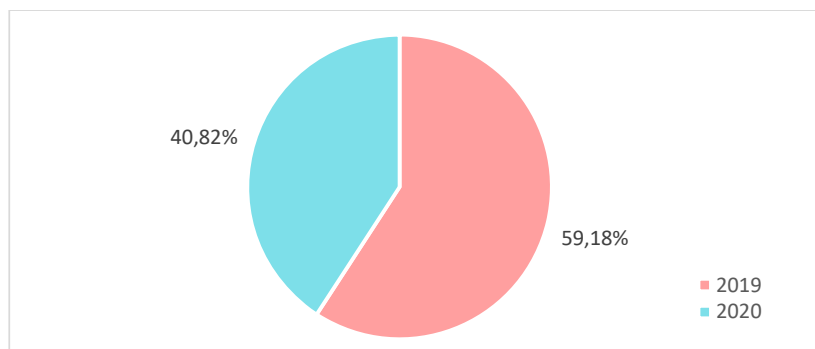
Gambar 35 menunjukkan grafik capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh dari Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Keerom belum mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan. Peningkatan persentase hanya terjadi pada Aspek Jumlah Peningkatan PAD, yakni mencapai 80.08%. Adapun aspek lain yang mengalami sedikit peningkatan adalah Aspek Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 1.30%, sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan angka 5% peningkatan. Selanjutnya indikator Jumlah Peningkatan Investasi menunjukkan angka 0% (tidak ada penurunan maupun peningkatan). Namun demikian, angka ini tidak jauh berbeda dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan peningkatan hanya sebesar 0.45%.

Indikator lainnya yang mengindikasikan perkembangan kualitas aspek satuan pemerintah daerah pada Kabupaten Keerom adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penurunan Angka Kemiskinan, yang menunjukkan angka secara berturut-turut sebesar 0.50% dan 1.55%. Hal ini berarti tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Keerom mengalami penurunan sebesar 0.50% dan penurunan angka kemiskinan sebesar 1.55%.

Selanjutnya, penurunan kualitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Keerom dapat dilihat berdasarkan Indikator Nilai IPM dan Jumlah Pendapatan Perkapita yang menunjukkan angka -0.19 dan -1.31. Namun demikian, angka tersebut masih dalam batas standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan angka 0% pada Nilai IPM dan -1.85 pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita. Secara keseluruhan, aspek satuan pemerintah daerah pada Kabupaten Keerom mengalami perkembangan yang cukup baik.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

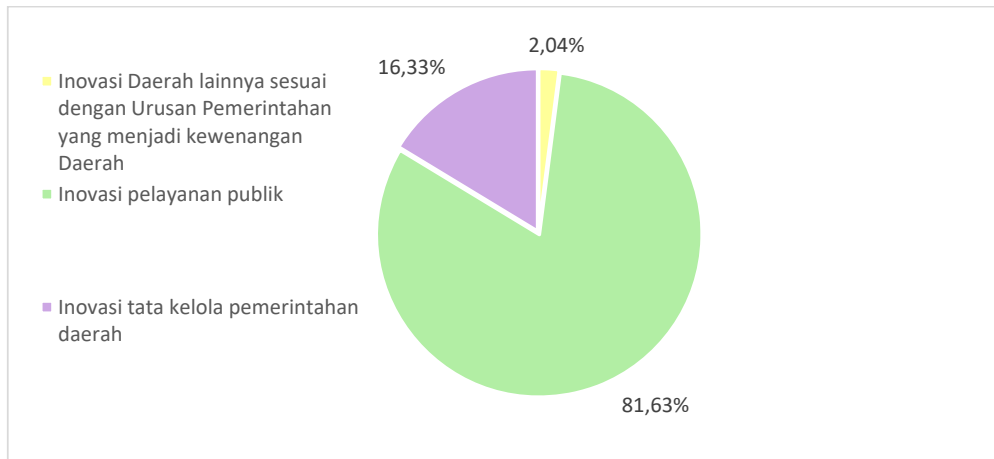
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Keerom

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Keerom telah diterapkan sejak tahun 2019. Sebanyak 59.18% inovasi diterapkan sejak tahun 2019 dan 40.82% inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

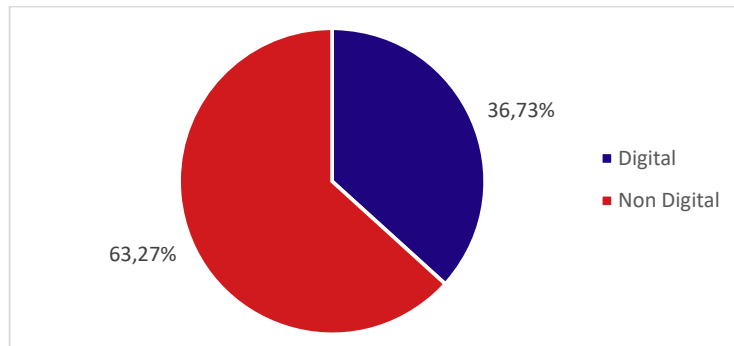
**b. Berdasarkan Bentuk Inovasi**



*Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Keerom*

Berdasarkan bentuknya, inovasi daerah Kabupaten Keerom didominasi oleh Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, ditunjukkan oleh angka persentase yang mencapai 81.63%. Inovasi berikutnya sebanyak 16.33% berupa inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun bentuk inovasi pelayanan publik masih belum banyak, yaitu hanya sebesar 2.04%.

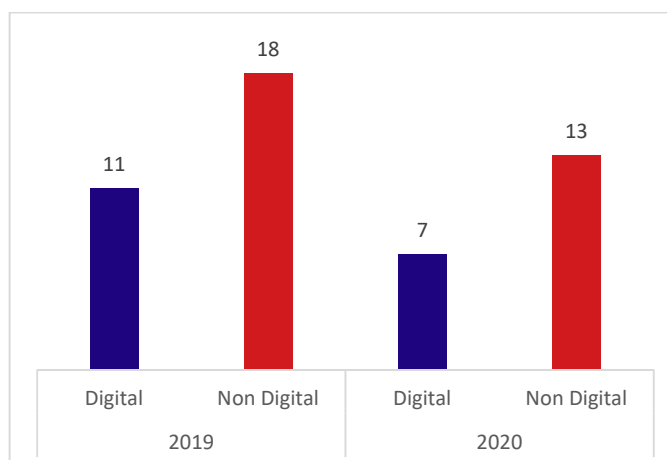
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Keerom*

Inovasi daerah di Kabupaten Keerom apabila dilihat berdasarkan jenis inovasinya terbagi menjadi dua, yaitu Inovasi Digital dan Inovasi NonDigital. Persentase inovasi jenis NonDigital mendominasi dibandingkan dengan inovasi digital di Kabupaten Keerom. Sebanyak 63.27% inovasi daerah nondigital, sedangkan inovasi daerah digital sebanyak 36.73%. Tidak ada inovasi jenis teknologi di Kabupaten Keerom yang dilaporkan pada tahun 2021.

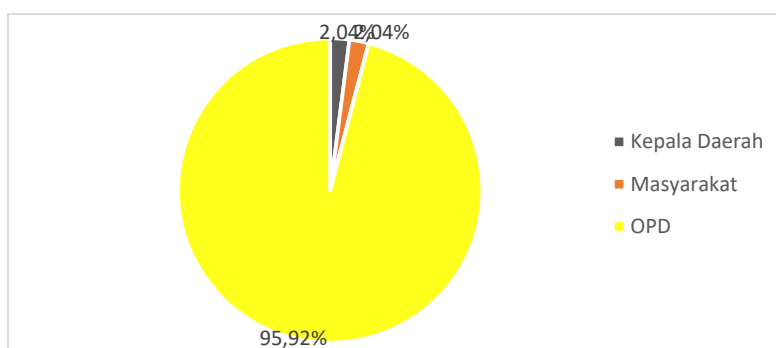
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



*Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Keerom*

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 11 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 7 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 18 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 13 inovasi. Secara keseluruhan, pada tahun 2019 terdapat 29 inovasi sedangkan pada tahun 2020 hanya ada 20 inovasi yang dilaporkan.

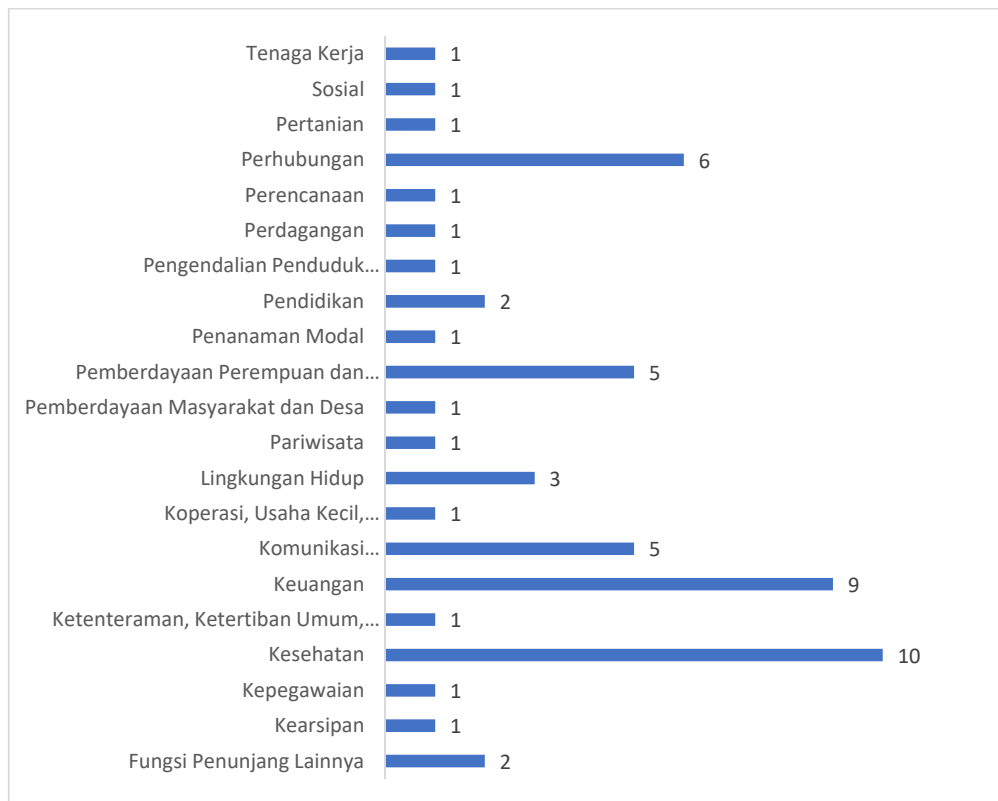
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Keerom*

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Keerom pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu mencapai 95.92% inovasi. Selanjutnya inovasi daerah di Kabupaten Keerom juga diinisiasi oleh Kepala Daerah dan Masyarakat dengan persentase sama yaitu sebesar 2.04% inovasi. Adapun untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

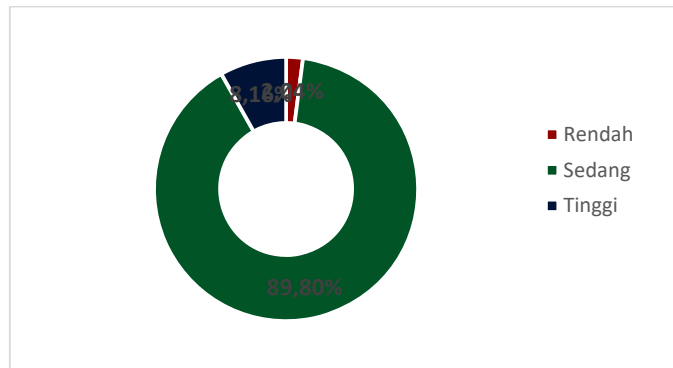
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Keerom

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Keerom berdasarkan urusan pemerintahan ditampilkan pada Gambar 41. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa Inovasi daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaporkan oleh Kabupaten Keerom didominasi oleh urusan pemerintahan Kesehatan, dan Keuangan yaitu secara berturut-turut sebanyak 10 dan 9 inovasi daerah. Selanjutnya urusan Perhubungan dengan sejumlah 6 inovasi. Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Komunikasi dan Informatika sama-sama memiliki 5 inovasi daerah. Berikutnya urusan dengan jumlah inovasi sebanyak 2 adalah Urusan Pendidikan dan urusan Fungsi Penunjang lainnya. Adapun inovasi daerah lainnya tersebar di berbagai urusan, yaitu Tenaga Kerja, Sosial, Pertanian, Perencanaan, Perdagangan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian, dan Kearsipan dengan jumlah inovasi sebanyak 1 di setiap urusan.

**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**

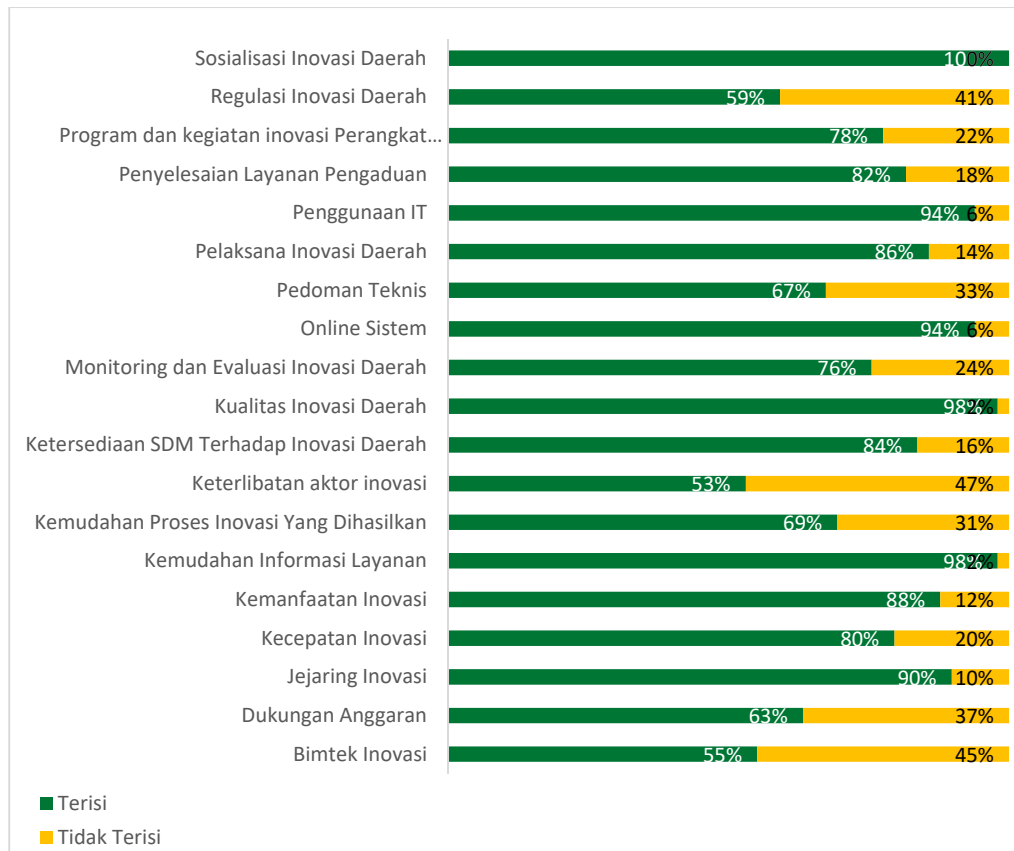


*Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Keerom*

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu mencapai 89.80% inovasi. Adapun inovasi yang sudah mencapai skor kematangan tinggi sebesar 8.16%. Sementara 2.04% lainnya merupakan inovasi dengan skor kematangan rendah. Hal ini menunjukkan inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Keerom mayoritas sudah memiliki skor kematangan di atas 50.



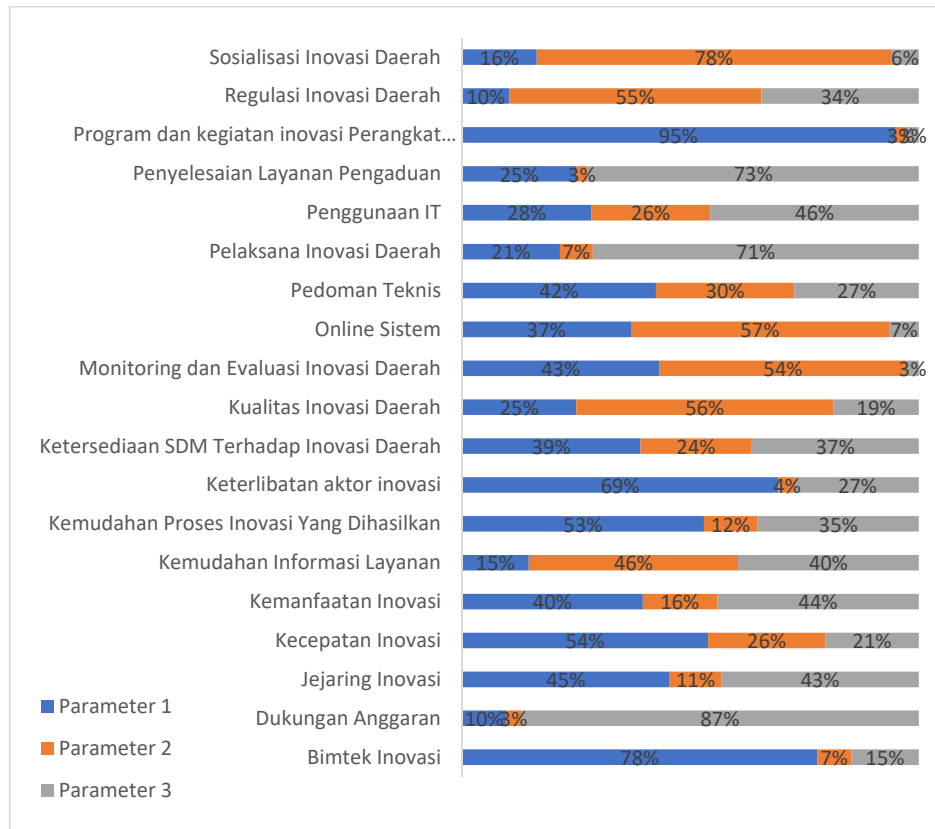
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Keerom*

Berdasarkan Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Keerom yang ditampilkan Gambar 43, diketahui bahwa dari 49 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Keerom, mayoritas inovasi telah terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah. Rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 79.59%, sedangkan 20.41% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator dengan keterisian data pendukung penuh yaitu mencapai 100% adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi yaitu sebesar 53%.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Keerom*

Gambar 44 menunjukkan Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah. Grafik tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung, 33.49% data pendukung termasuk dalam kategori parameter 3, 27.26% parameter 2, dan sebanyak 39.25% data pendukung tergolong parameter 1. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yakni mencapai 87%, artinya 87% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Dukungan Anggaran termasuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya Indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah yakni mencapai 78%, artinya 78% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Sosialisasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Sementara Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPDP, yaitu mencapai 95%, artinya 95% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Program dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPDP termasuk dalam kategori parameter kesatu.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Keerom beserta Skor Kematangannya**

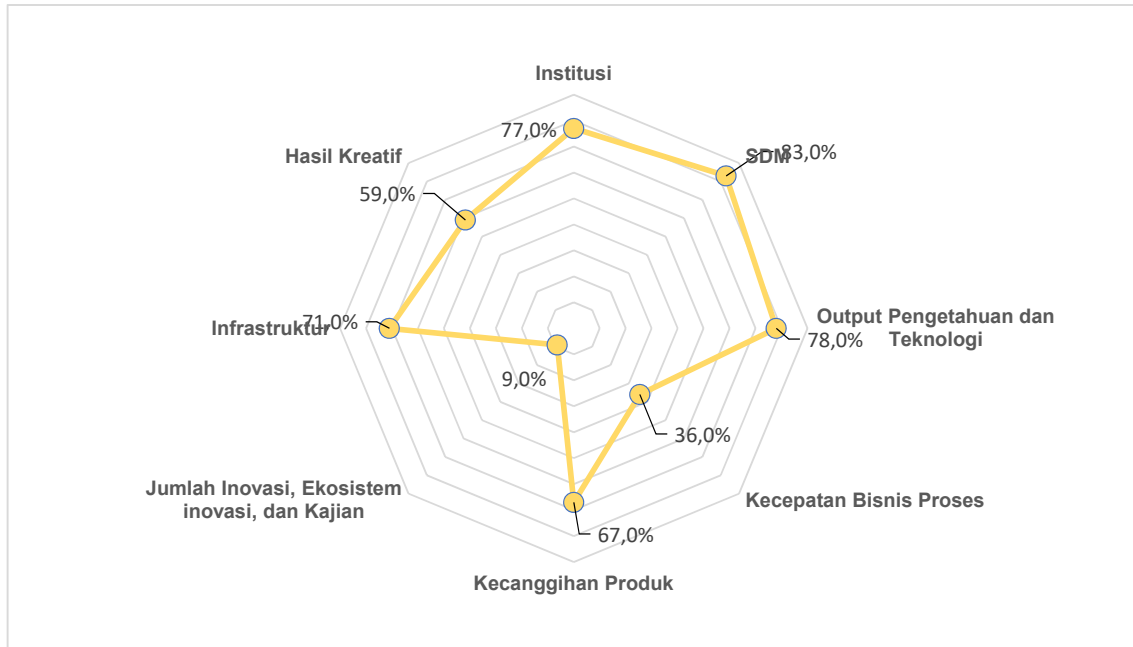
*Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Keerom beserta Skor Kematangannya*

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Kantor OPD Pasar Avidjan	69

<b>Nama Inovasi</b>	<b>Skor Kematangan</b>
Keerompudata	62
Paralegal Wesowa	58
Dermaga Cinta Yowong	88
Sesesis PHBS	77
Auto SPPD	55
Sistem Informasi Kawasan Perbatasan (SIKPER)	87
KARTU PAS PERBATASAN	109
MACEPUKEEROM – Malaria Center Kabupaten Keerom	115
Kejar parasit - Kader Kunjungan Rumah (Kejar) Periksa Darah & Awasi Minum Obat (Parasit)	109
Makema – Maikawa Kelambu Massal	89
Ningbawa Kendali Vektor	91
Biyiken Kader	93
Gempur Malaria	103
Kasisima – Kampanye Akselerasi Eliminasi Malaria	83
P2TP2A - Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	81
Paralegal Wesowa	74
Fonakam Arso Kota	59
Galeri Daimama	59
“PAJAMAWAM” Pelayanan Penagihan PBB-P2 dengan Mobil Kas Keliling	75
Inovasi Kerjasama DPMPTSP dan BPJS Ketenagakerjaan	53
Naga Mekar Karya	53
Kampung KB Kalifam	56
Kampung Siaga Narkoba Yaturaharja	57
Keseman - Kemitraan Sekolah Mandiri	49
E-HIBAH Masyarakat	72
E-BANSOS	69
Bus Gratis Trans Keerom	61
SISIGAKE - Edukasi Transportasi Warga Keerom	85
Jikiran – Uji KIR Keerom Transparan	74
Fasike Fasilitasi Transportasi Air Keerom	54
E-Absensi Pegawai BPKAD	98
E-TPP Pegawai BPKAD	93
E-Absensi Non Pegawai BPKAD	94
E-TPP Non Pegawai BPKAD	59
Koperasi Trans Keerom	74
Fasidake – Fasilitasi Transportasi Darat Keerom	85
SPDP BPKAD	67
SPDnP BPKAD	89
BTS Arso Timur	57

Nama Inovasi	Skor Kematangan
DUDI diskominfo	67
PPID Keerom	81
AgradisWa - Agroforestri Gaharu Distrik Waris	85
Kampung IT Usku	71
Jamu sadarmala	88
OJT Mikroskopis Lab. Malaria Center	85
Ulang Koma - Uji Silang Mikroskopik Malaria	70
ABU PEKASO	83

## E. KABUPATEN MERAUKE



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Merauke

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Merauke memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 83.0%. Variabel ukur indeks inovasi lainnya yang memiliki skor cukup tinggi adalah Variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, Institusi, dan Infrastruktur, yaitu secara berturut-turut sebesar 78.0%, 77.0%, dan 71.0%. Sebaliknya, variabel dengan skor sangat rendah adalah Variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian, yaitu hanya sebesar 9.0%.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



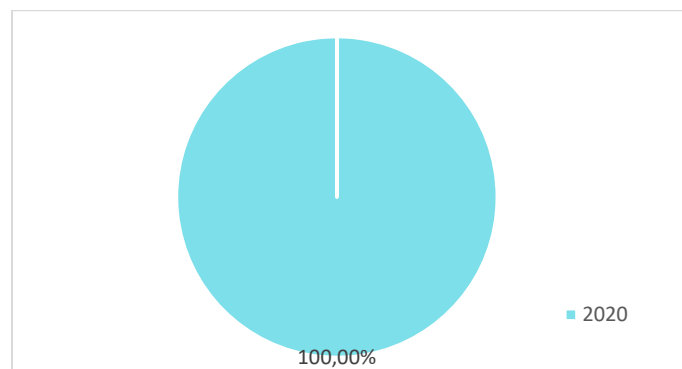
Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Merauke

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah telah disajikan pada Gambar 46. Berdasarkan grafik pada Gambar 46 di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Merauke memiliki perkembangan yang cukup baik, ditunjukkan oleh capaian indicator yang memiliki skor lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi dan Kualitas Peningkatan Perizinan bahkan memiliki skor yang sangat tinggi, mencapai 316.15% dan 234.83%. Indikator lainnya yang juga mengalami peningkatan lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah adalah Jumlah Peningkatan PAD, dan Nilai IPM yang secara berturut-turut meningkat sebesar 10.77% dan 0.11%, lebih tinggi dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 8% dan 0%. Selanjutnya indicator yang juga menunjukkan hasil yang baik adalah indicator Penurunan Angka Kemiskinan, dimana dalam grafik ditunjukkan sebesar 0.32% yang artinya Angka Kemiskinan di Kabupaten Merauke mengalami penurunan sebesar 0.32%, lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yakni mengalami kenaikan sebesar 0.02%.

Berikutnya beberapa indicator aspek Pemerintah Daerah di Kabupaten Merauke menunjukkan adanya penurunan kualitas. Namun demikian, penurunan kualitas yang terjadi tetap dalam standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Indikator yang dimaksud adalah indicator Jumlah Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka, dimana indicator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar -1.32%, tetapi masih lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar -1.85%. Adapun indicator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka -0.82% yang artinya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan sebesar 0.82%. Namun angka tersebut lebih baik dibanding dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0.92%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

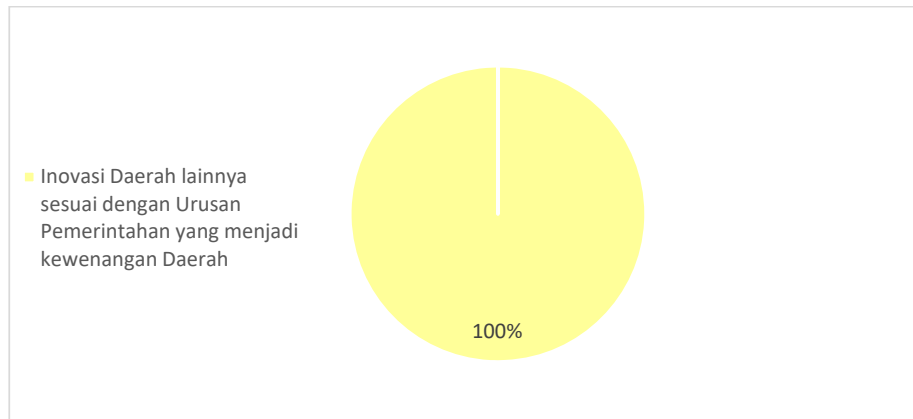
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Merauke

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke diterapkan pada tahun 2020. Tidak ada inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 di Kabupaten Merauke.

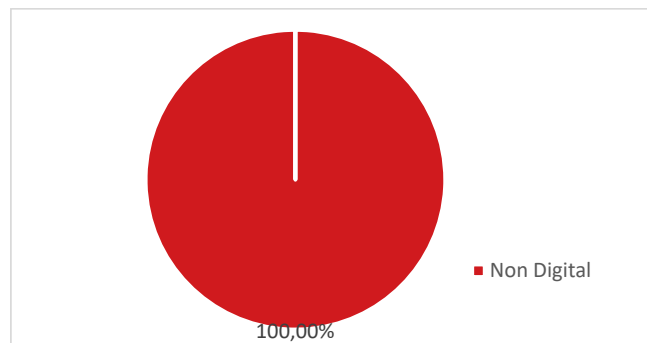
**b. Berdasarkan Bentuk Inovasi**



*Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Merauke*

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke termasuk dalam bentuk Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**

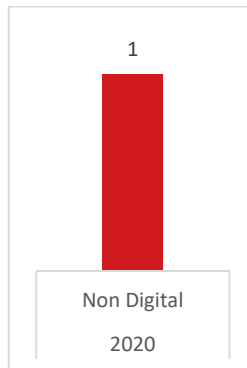


*Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Merauke*

Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Merauke telah disajikan pada Gambar 49. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke merupakan inovasi Non digital.



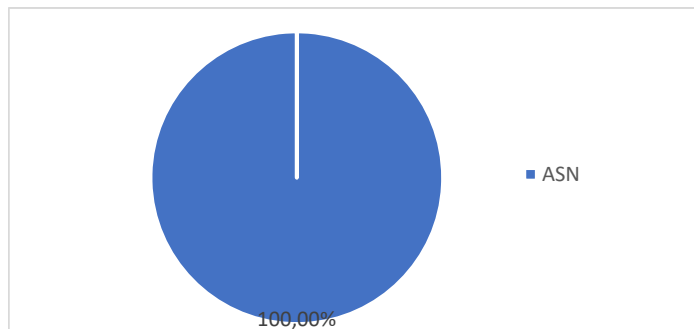
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



*Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Merauke*

Berdasarkan tahun dan jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke, diketahui bahwa hanya ada satu inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke. Jenis inovasi tersebut adalah inovasi Non Digital dan diterapkan pada tahun 2020.

**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Merauke*

Gambar di atas menunjukkan grafik Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Merauke. Berdasarkan grafik tersebut diketahui inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke diinisiasi oleh ASN.

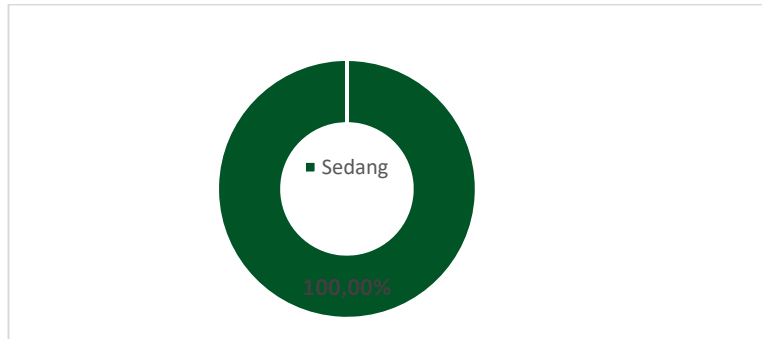
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



*Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Merauke*

Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Merauke pada Gambar 52 di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke tergolong dalam urusan Pendidikan.

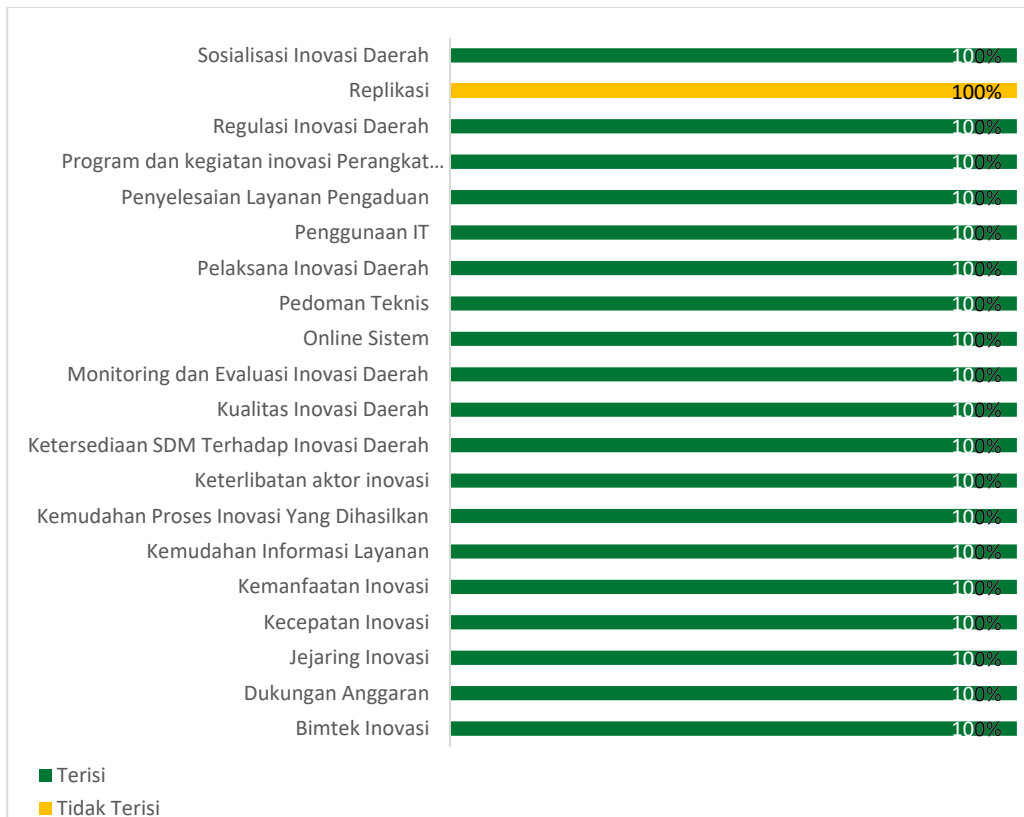
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



*Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Merauke*

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Grafik di atas, diketahui bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke mencapai skor kematangan sedang. Artinya inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke berada pada skor sebesar 50 – 100.

**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**

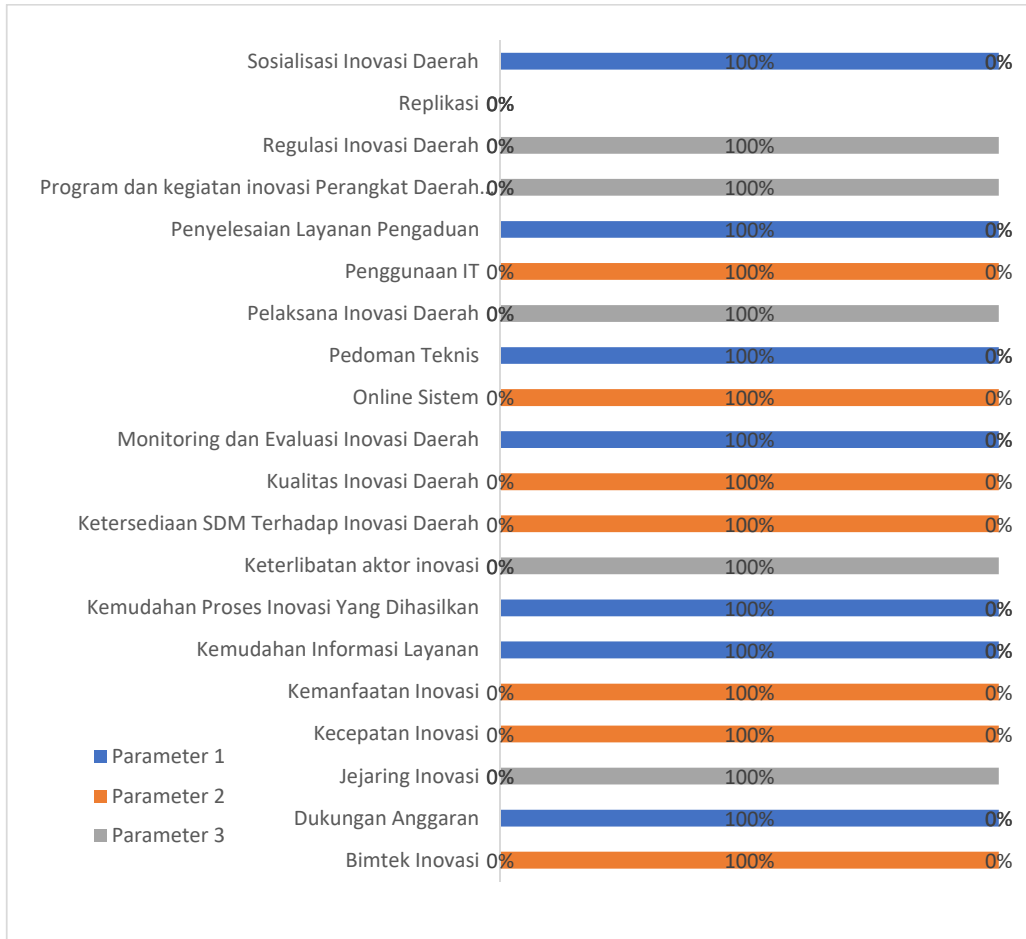


*Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Merauke*

Gambar 54 menunjukkan grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Merauke. Melalui grafik tersebut diketahui bahwa inovasi yang

dilaporkan oleh Kabupaten Merauke telah 95% terisi oleh data pendukung. Hanya 5% data pendukung yang tidak terisi dalam inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke. Data pendukung yang terisi dalam inovasi daerah Kabupaten Merauke adalah indikator Replikasi.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah*

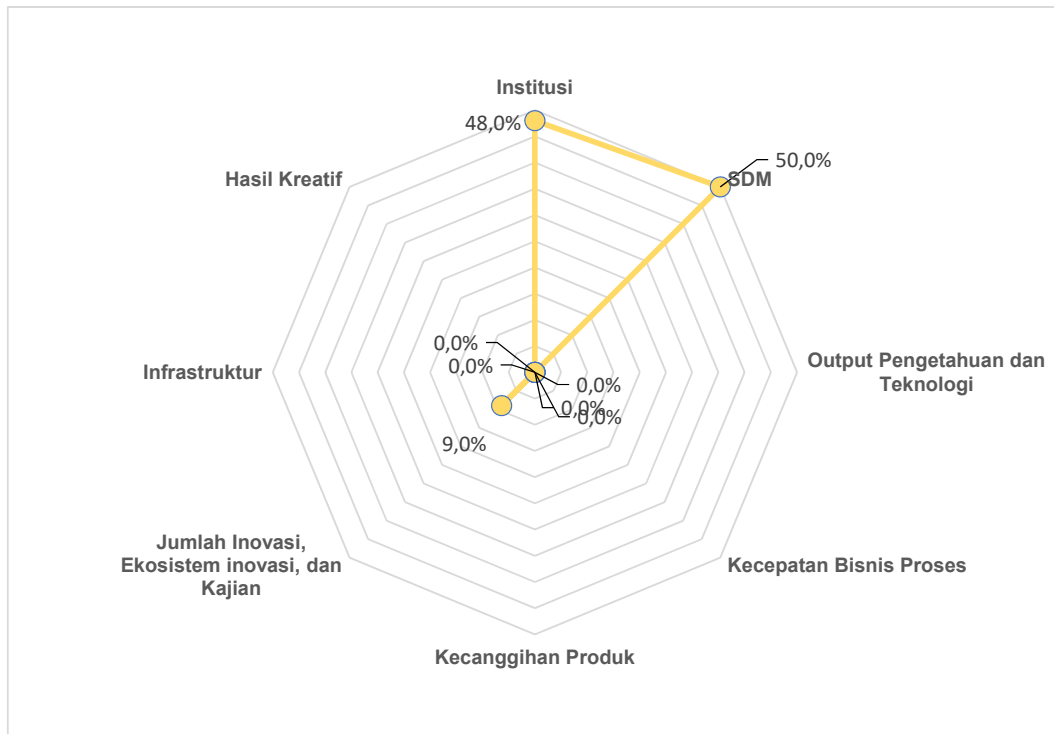
Berdasarkan grafik pada Gambar sebelumnya (Gambar 54), diketahui bahwa inovasi telah terisi dengan data pendukung mencapai 95%. Selanjutnya Gambar 55 menampilkan data parameter yang menyusun indikator pendukung inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa indikator pendukung inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauke tersusun atas 35.00% Parameter 1, 35% Parameter 2, dan 25% Parameter 3.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Merauke beserta Skor Kematangannya**

*Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Merauke beserta Skor Kematangannya*

Nama Inovasi	Skor Kematangan
CAS KAMPUNG	89

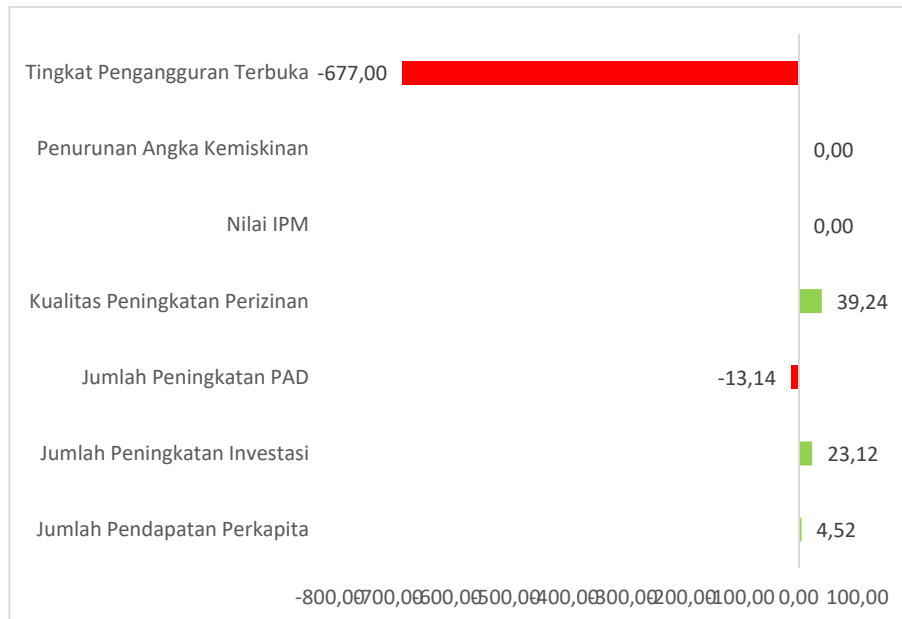
## F. KABUPATEN MIMIKA



Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mimika

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Mimika memiliki skor variabel ukur yang rendah. Skor tertinggi variabel ukur indeks inovasi daerah Kabupaten Mimika hanya mencapai 50%. Variabel ukur yang dimaksud adalah variabel ukur Sumber Daya Manusia. Selanjutnya diikuti oleh variabel ukur institusi sebesar 48% dan variabel ukur Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian sebesar 9%. Adapun variabel ukur lainnya memiliki skor 0%.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mimika

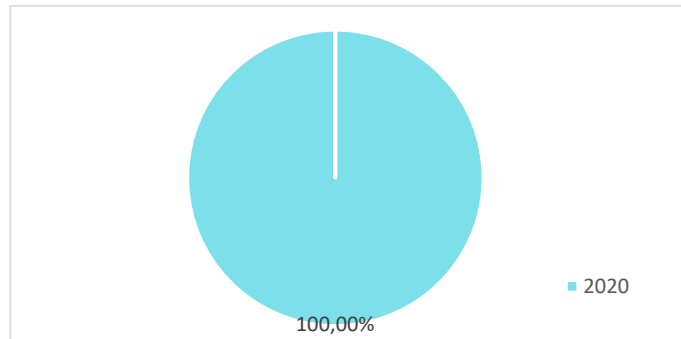
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah telah disajikan pada Gambar 57. Berdasarkan grafik pada Gambar 57 di atas dapat dilihat bahwa indikator-indikator yang mengindikasikan kualitas pemerintahan yang baik pada Kabupaten Mimika adalah indikator Jumlah Pendapatan Perkapita, Jumlah Peningkatan Investasi, dan Kualitas Peningkatan Perizinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase di masing-masing indikator tersebut, yaitu secara berturut-turut mengalami peningkatan sebesar 4.52%, 23.12%, dan 39.24%. Angka tersebut jauh lebih baik dibanding dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang justru mengalami penurunan sebesar 1.85% pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita, mengalami peningkatan hanya sebesar 0.45 pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi, dan peningkatan hanya sebesar 8% pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan.

Indikator Nilai IPM dan Penurunan Angka Kemiskinan pada Kabupaten Mimika menunjukkan angka 0% yang artinya tidak ada peningkatan maupun penurunan. Namun demikian, hal ini masih sesuai atau bahkan lebih baik dibanding dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan persentase 0% pada indikator Nilai IPM dan bahkan peningkatan 0.02% pada indikator Angka Kemiskinan.

Gambar 57 menunjukkan terdapat dua indikator yang berwarna merah yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Peningkatan PAD. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka -677.0%. Angka tersebut menunjukkan bahwa data yang diinput pada indikator terkait tidak sesuai dengan yang diminta. Adapun indikator Jumlah peningkatan PAD menunjukkan angka -13.58 yang berate terjadi penurunan PAD sebesar 13.58. Angka tersebut melebihi penurunan yang terjadi pada standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 8%. Namun demikian, secara keseluruhan Aspek Pemerintah Daerah di Kabupaten Mimika memiliki capaian yang cukup bagus.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

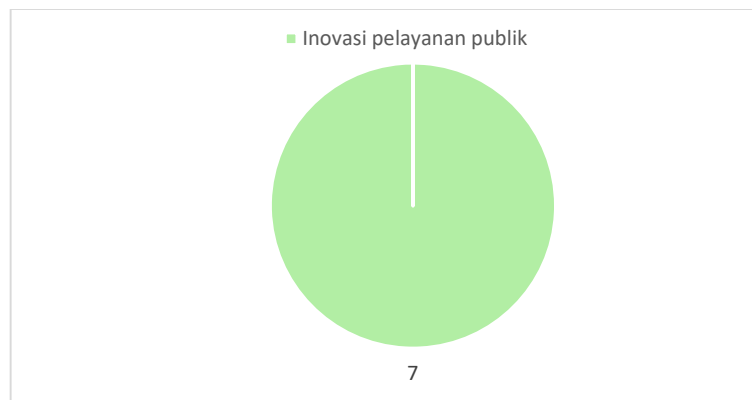
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Mimika

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika diterapkan pada tahun 2020. Tidak ada inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 di Kabupaten Mimika.

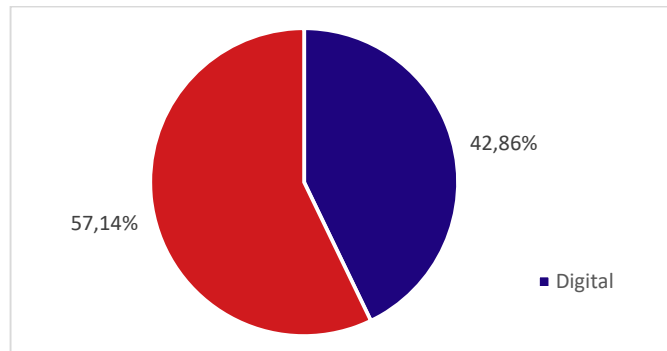
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mimika

Gambar 59 menampilkan diagram persentase inovasi berdasarkan bentuk inovasi di Kabupaten Mimika. Dari tujuh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika, diketahui bahwa seluruhnya merupakan inovasi pelayanan public.

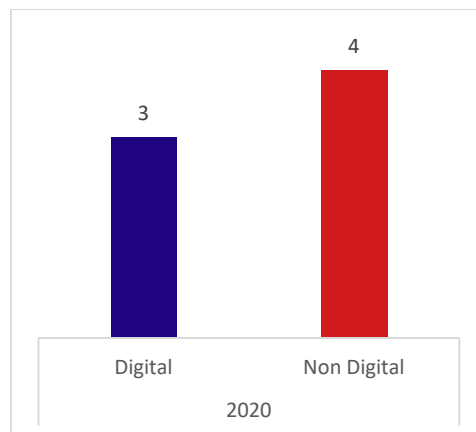
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mimika*

Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi di Kabupaten Mimika yang disajikan pada Gambar 60 menunjukkan bahwa dari tujuh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika, 57.15% diantaranya merupakan inovasi daerah NonDigital. Sedangkan 42.86% nya merupakan inovasi digital.

**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**

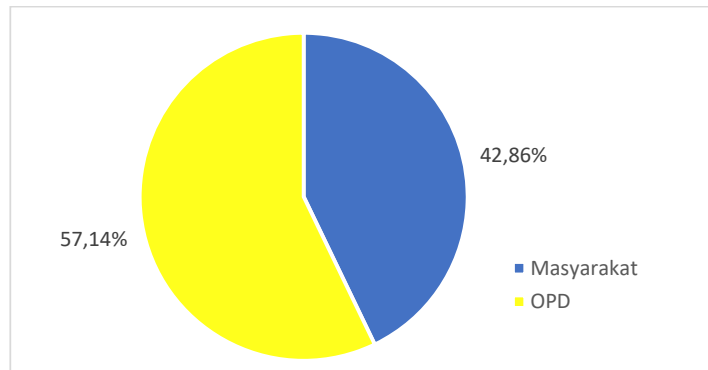


*Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mimika*

Berdasarkan tahun dan jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika, diketahui bahwa dari tujuh inovasi yang dilaporkan 3 diantaranya termasuk dalam jenis digital dan 4 lainnya merupakan inovasi NonDigital. Ketujuh inovasi yang dilaporkan diterapkan pada tahun 2020.



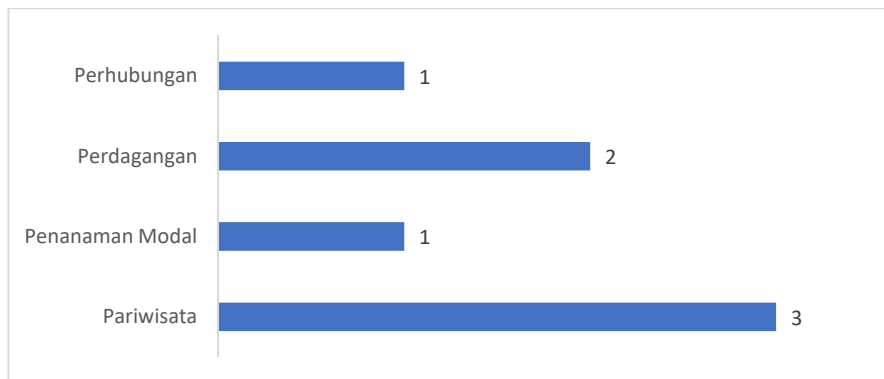
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mimika*

Gambar di atas menunjukkan grafik Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mimika. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa dari tujuh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika 57.15% diantaranya merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah. Sedangkan 42.86% lainnya merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat.

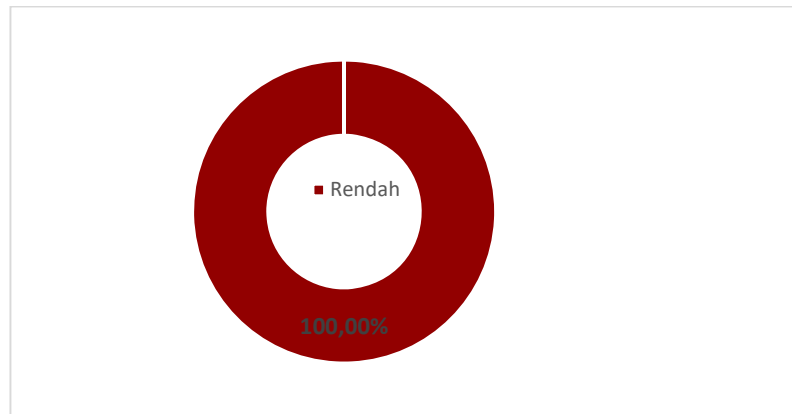
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



*Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mimika*

Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mimika pada Gambar 63 di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika terbagi dalam empat urusan Pemerintahan yang berbeda. Terdapat tiga inovasi yang termasuk dalam Urusan Pariwisata, dua inovasi daerah termasuk dalam Urusan Perdagangan, satu inovasi daerah Urusan Perhubungan dan satu inovasi daerah lainnya tergolong dalam urusan Penanaman Modal.

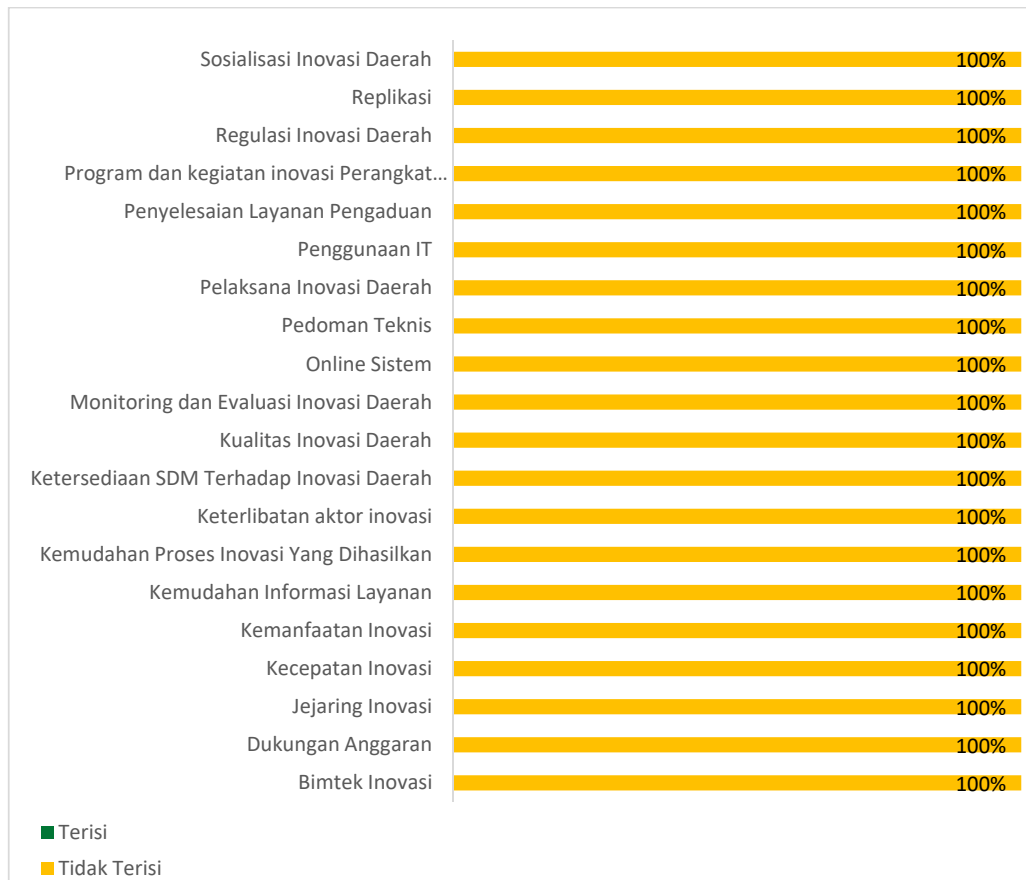
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



*Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mimika*

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Grafik di atas, diketahui bahwa keseluruhan inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika memiliki skor kematangan rendah. Artinya inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika berada pada skor di bawah 50.

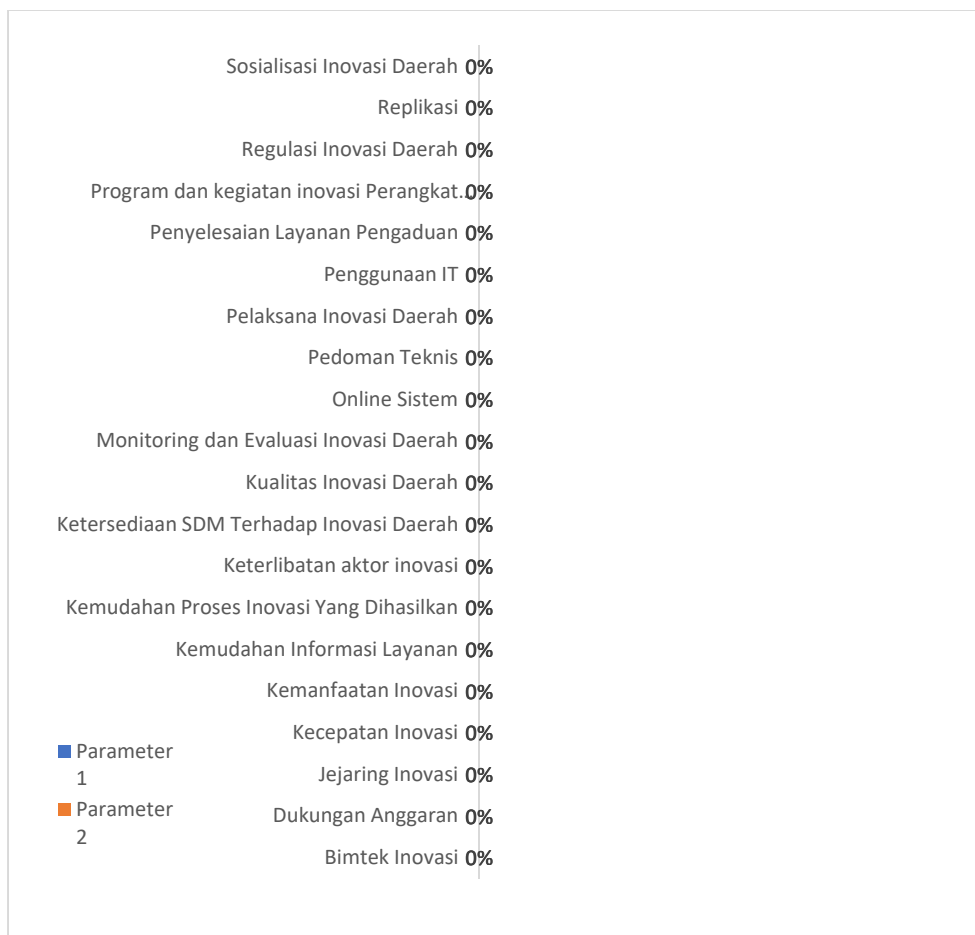
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mimika*

Gambar 65 menunjukkan grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mimika. Melalui grafik tersebut diketahui bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauka seluruhnya tidak terisi oleh data pendukung.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah*

Gambar 65 menampilkan data parameter yang menyusun indikator pendukung inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika. Berdasarkan grafik sebelumnya disebutkan bahwa inovasi-inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mimika tidak terisi data pendukung, sehingga tidak ada parameter yang menyusunnya.

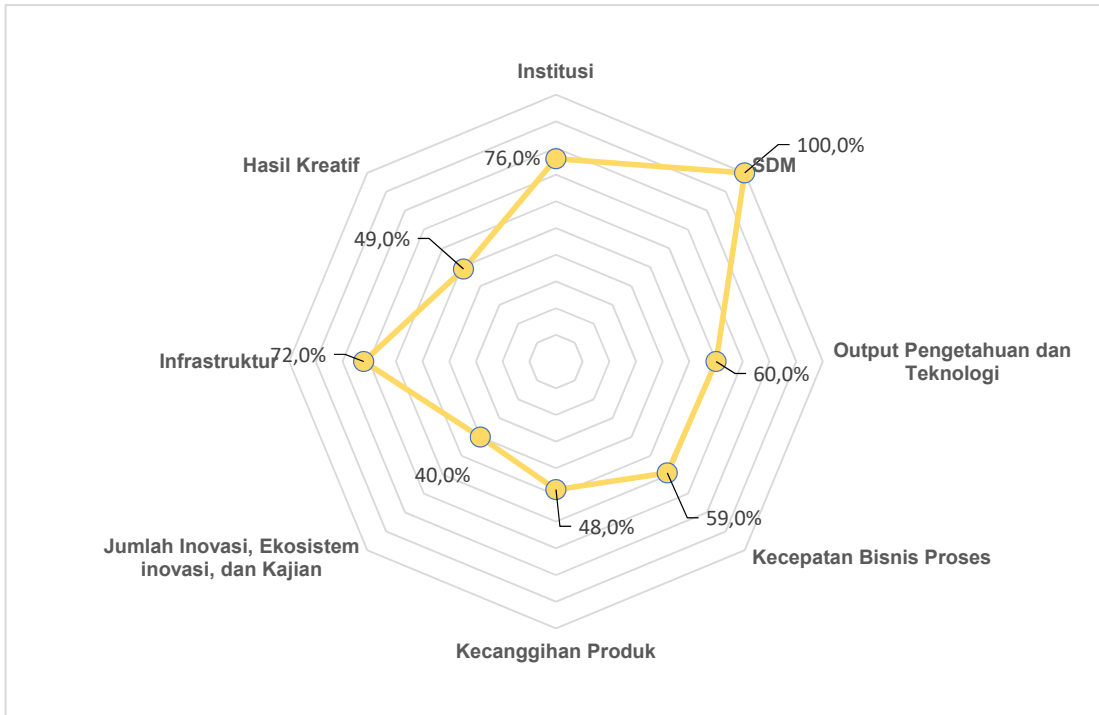
**j. Daftar Inovasi Kabupaten Merauke beserta Skor Kematangannya**

*Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Merauke beserta Skor Kematangannya*

Nama Inovasi	Skor Kematangan
HOTEL C19	0
PASAR MODERN C19	0
PASAR TRADISIONAL C19	0
RESTORAN C19	0

Nama Inovasi	Skor Kematangan
PTSP C19	0
TEMPAT WISATA C19	0
TRANSPORTASI UMUM C19	0

## G. KABUPATEN NABIRE



Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Nabire

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Nabire memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia dengan skor maksimal, yaitu mencapai 100%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia memiliki skor maksimal atau berada pada parameter 3. Variabel berikutnya yang memiliki skor cukup tinggi adalah variabel Institusi dan Infrastruktur, yaitu secara berturut-turut sebesar 76.0% dan 72.0%. Adapun variabel dengan skor paling rendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian dengan skor sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukur indeks inovasi daerah di Kabupaten Nabire tergolong baik karena mayoritas memiliki skor di atas 50%.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Nabire

Gambar 68 menampilkan grafik capaian aspek satuan pemerintah daerah pada Kabupaten Nabire. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa indikator yang mengalami peningkatan sangat signifikan adalah indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, yaitu meningkat hingga 22435.21%, sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah berada di angka 5%. Selanjutnya, grafik tersebut juga menunjukkan mayoritas indikator Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalami peningkatan. Indikator dimaksud adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, Jumlah Peningkatan PAD, dan Jumlah Pendapatan Perkapita. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka 0.16% yang artinya Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.16%. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 0.92%. Berikutnya indikator penurunan angka kemiskinan menunjukkan angka 0.39% yang artinya Angka Kemiskinan di Kabupaten Nabire mengalami penurunan sebesar 0.39%, sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah berada pada penurunan sebesar 0.02%. Artinya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Nabire sudah cukup lebih baik.

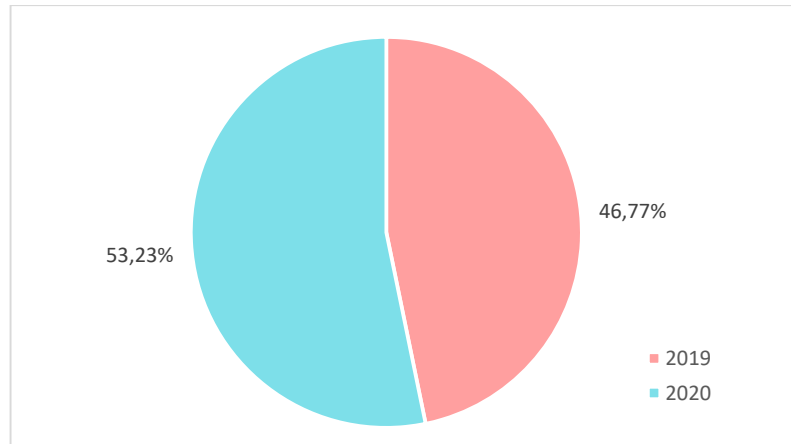
Indikator Nilai IPM Kabupaten Nabire meningkat sebesar 0.30%, di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan angka 0% atau tidak ada peningkatan sama sekali. Selanjutnya indikator Jumlah Peningkatan PAD pada Kabupaten Nabire meningkat sebesar 13.56%, lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yaitu hanya sebesar 8%. Berikutnya indikator Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Nabire yang disajikan pada Grafik diatas menunjukkan peningkatan sebesar 6.40%. Peningkatan ini jauh lebih baik dari sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang justru menunjukkan adanya penurunan sebesar 1.85%.

Dari beberapa indikator penyusun Aspek Pemerintah Daerah di Kabupaten Nabire, hanya satu indikator yang mengalami penurunan, yaitu indikator Jumlah Peningkatan Investasi. Penurunan yang terjadi sebesar 86.00%, sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah berada pada angka peningkatan sebesar 5%. Namun demikian, secara keseluruhan mayoritas indikator penyusun Aspek Pemerintah Daerah di Kabupaten Nabire

memiliki perkembangan yang lebih baik disbanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

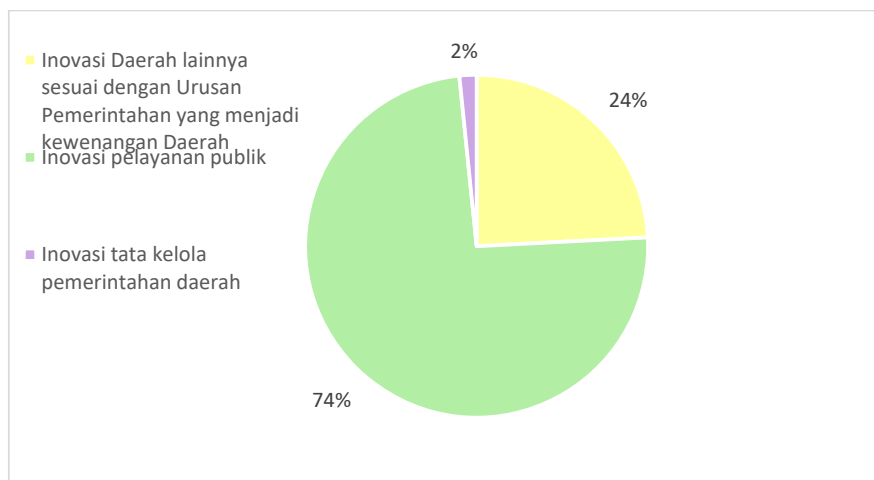
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Nabire

Berdasarkan tahun penerapan inovasi daerah, dari keseluruhan total inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nabire, diketahui bahwa sebanyak 46.77% inovasi telah diterapkan pada tahun 2019. Adapun 53.23% inovasi lainnya baru diterapkan pada tahun 2020.

### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



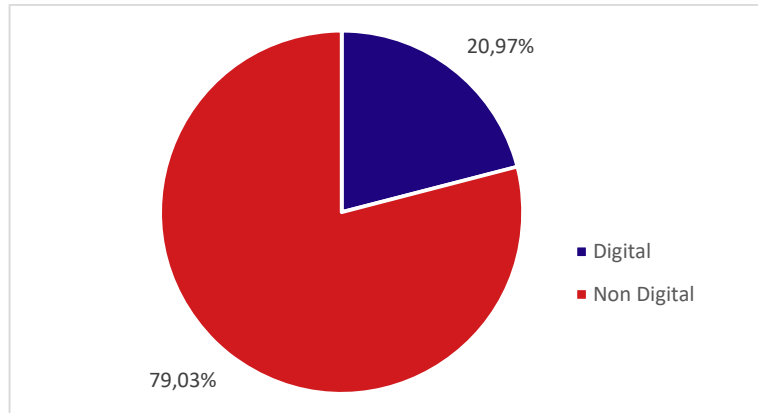
Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Nabire

Berdasarkan diagram yang disajikan pada Gambar 70 di atas, diketahui bahwa inovasi-inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nabire terbagi dalam tiga bentuk inovasi. Inovasi didominasi oleh bentuk Inovasi Pelayanan Publik, yaitu sebesar 74% atau sebanyak 46 inovasi daerah. Selanjutnya sebesar 24% atau sebanyak 15 inovasi daerah termasuk dalam bentuk Inovasi Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan



Daerah. 2% inovasi lainnya merupakan inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah (sebanyak satu inovasi).

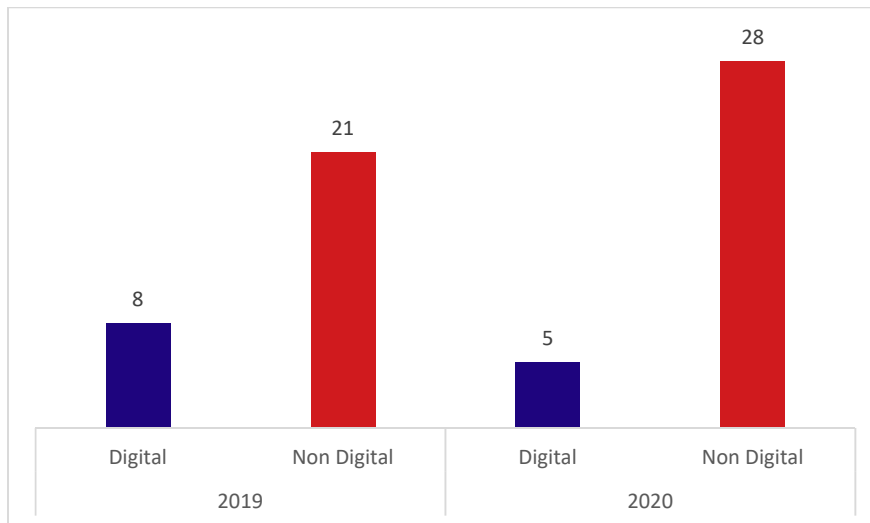
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Nabire*

Jenis inovasi daerah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Digital, NonDigital dan Teknologi. Persentase masing-masing jenis inovasi daerah pada Kabuapten Nabire ditampilkan pada Gambar 71 dalam bentuk diagram. Diagram pada gambar 71 menunjukkan bahwa mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nabire merupakan inovasi jenis NonDigital, yaitu mencaapai 79.03%. Adapun 20.97% inovasi lainnya merupakan Inovasi Digital.

**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**

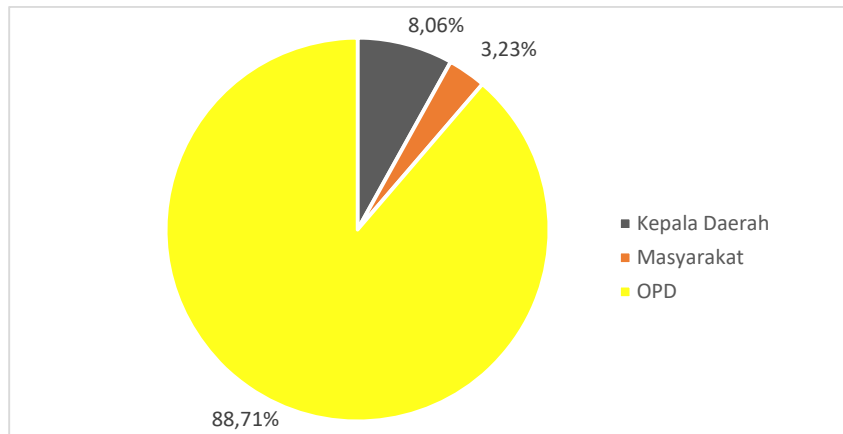


*Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Nabire*

Berdasarkan grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Nabire pada Gambar 72, diketahui bahwa jumlah inovasi daerah pada Kabupaten Nabire pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 total terdapat 29 inovasi daerah yang dilaporkan, sedangkan pada tahun 2020 jumlah inovasi yang dilaporkan sebanyak 33 inovasi. Gambar 72 juga menunjukkan bahwa inovasi digital dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, dari 8 inovasi di tahun 2019 menjadi 5 inovasi

di tahun 2020. Sebaliknya, inovasi non digital yang dilaporkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dari 21 inovasi pada tahun 2019 menjadi 28 inovasi pada tahun 2020.

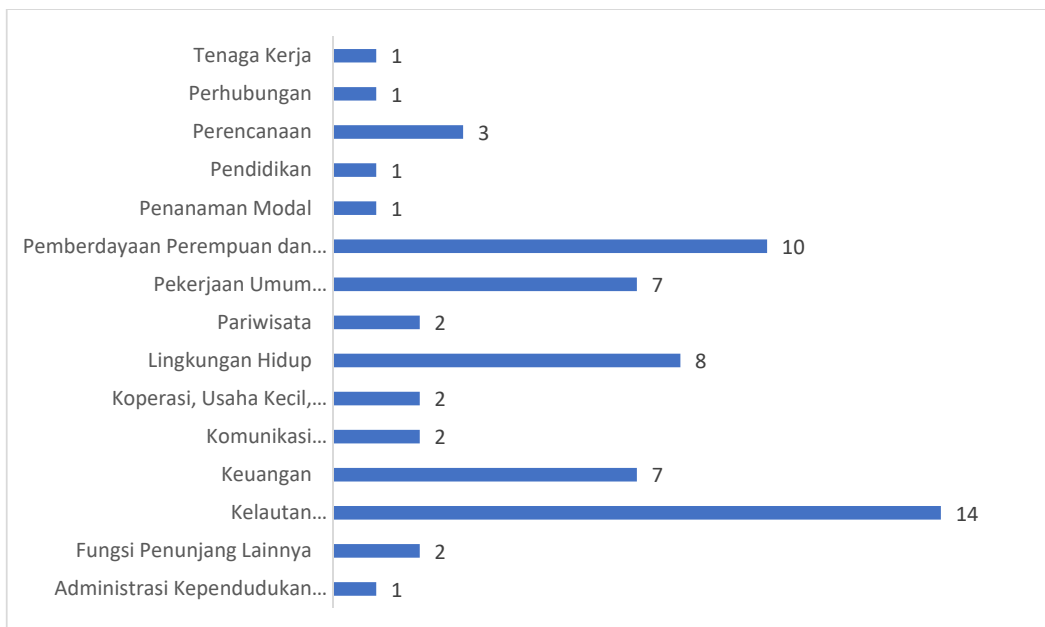
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Nabire*

Gambar 73 menyajikan diagram persentase inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Nabire. Melalui Grafik tersebut diketahui bahwa mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nabire diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD), yaitu mencapai 88.71%. Inisiator inovasi berikutnya adalah Kepala Daerah, yaitu sebesar 8.06% dan Masyarakat sebanyak 3.23%.

**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

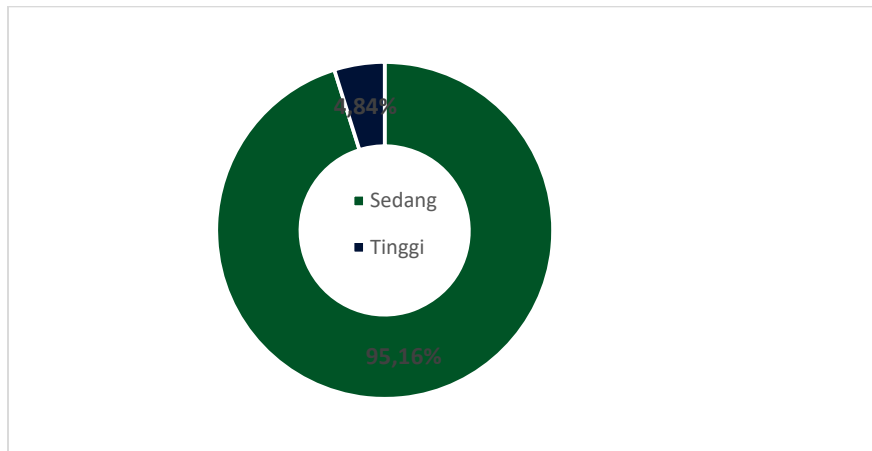


*Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Nabire*

Gambar 74 menunjukkan grafik jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan pada kabupaten Nabire. Grafik tersebut menunjukkan bahwa inovasi daerah yang

dilaporkan oleh Kabupaten Nabire cukup merata pada beberapa Urusan Pemerintahan. Namun demikian, terlihat bahwa jumlah inovasi terbanyak berada pada Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu mencapai 14 inovasi. Selanjutnya diikuti oleh Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 10 inovasi, Urusan Lingkungan Hidup sebanyak 8 inovasi, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Keuangan masing-masing sebanyak 7 inovasi. Inovasi-inovasi lainnya tersebar cukup merata di Urusan-urusan Pemerintahan lainnya.

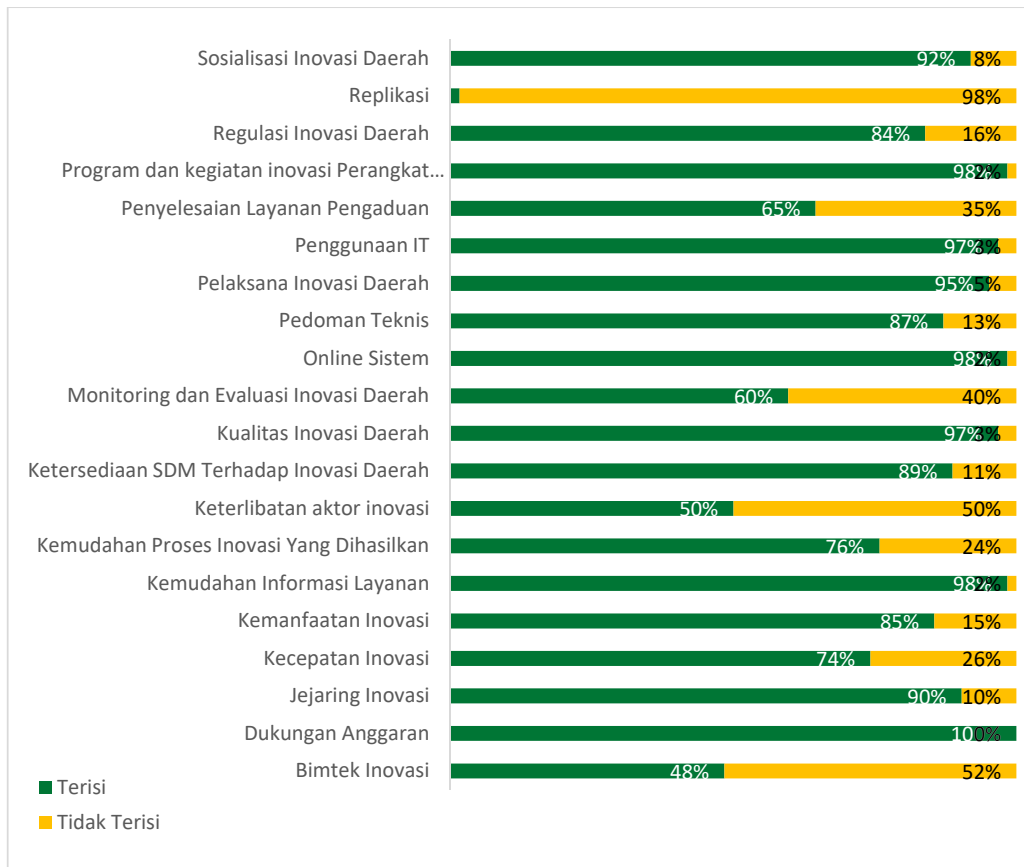
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



*Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Nabire*

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Gambar 75 di atas, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nabire sudah berada pada tingkat kematangan sedang, yaitu sebanyak 95.16%. Artinya inovasi-inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nabire secara mayoritas memiliki skor kematangan antara 50-100. Selanjutnya, sebanyak 4.84% inovasi lainnya memiliki skor kematangan Tinggi atau memiliki skor kematangan lebih dari 100. Tidak ada inovasi yang masih berada pada tingkat kematangan rendah atau skor kurang dari 50.

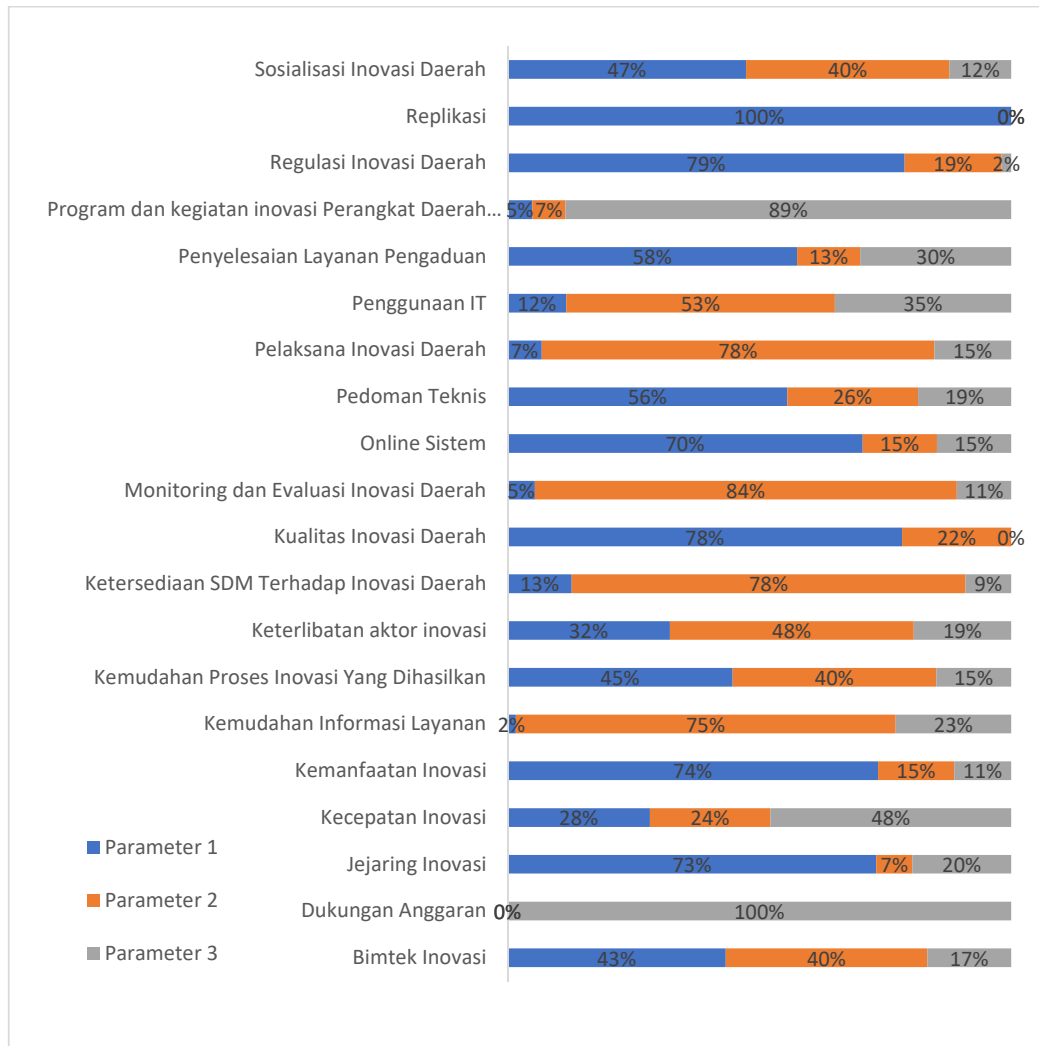
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nabire*

Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nabire sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 76 yang memperlihatkan dominasi persentase keterisian data (ditunjukkan dengan warna hijau) hampir di seluruh indikator. Rata-rata keterisian data adalah 79.27%. Adapun data pendukung indeks inovasi daerah yang belum terisi sebesar 20.73% (ditunjukkan dengan warna kuning). Secara lebih rinci, terlihat bahwa tingkat keterisian data pendukung secara penuh, yaitu 100% berada pada indicator Dukungan Anggaran. Sebaliknya, indicator data pendukung yang tingkat ketidakterisian datanya paling tinggi adalah indicator Replikasi, yaitu sebanyak 98% tidak terisi data pendukung.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah*

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa sebanyak 24.44% data dukung tersusun atas parameter 3 (ditunjukkan dengan warna abu-abu). Kemudian sebanyak 34.23% data dukung indeks inovasi daerah tersusun atas parameter 2 (ditunjukkan dengan warna kuning kecoklatan). Adapun sebanyak 41.33% data dukung tersusun atas parameter 1 (ditunjukkan dengan warna biru). Berdasarkan grafik tingkat keterisian parameter dalam indicator satuan inovasi daerah pada Gambar 77 terlihat bahwa indicator dengan keterisian parameter 1 tertinggi adalah indicator Replikasi, yaitu mencapai 100%. Indikator dengan keterisian parameter 2 tertinggi adalah Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yaitu mencapai 84%. Sedangkan indicator dengan keterisian parameter 3 tertinggi adalah Dukungan Anggaran, mencapai 100%.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Nabire beserta Skor Kematangannya**

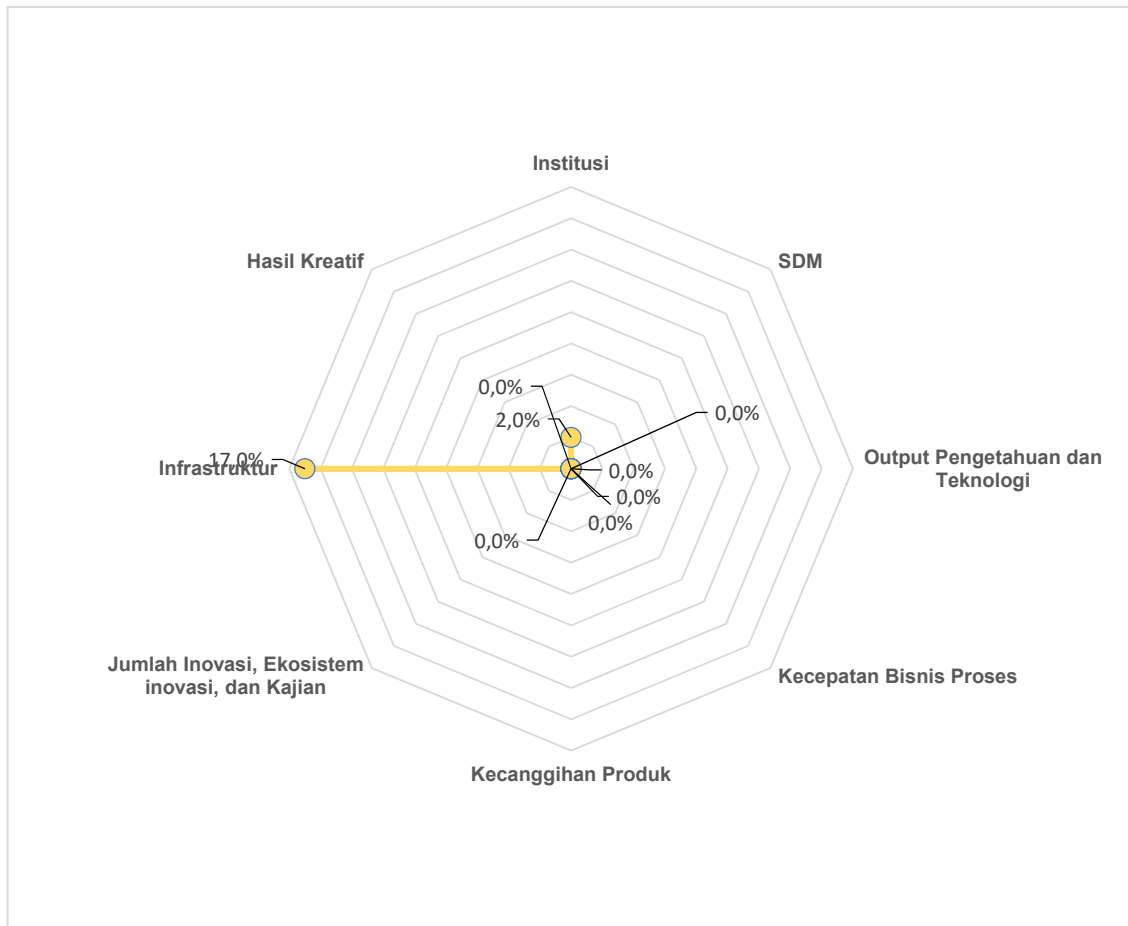
*Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Nabire beserta Skor Kematangannya*

<b>Nama Inovasi</b>	<b>Skor Kematangan</b>
Layanan Transportasi Laut	71
Peningkatan Kualitas ASN	74
e- CMS	69
Pelayanan Pendidikan Daerah Terisolasi	61
PENINGKATAN PRODUKSI IKAN DENGAN TEKNIK BIOFLOK	79
e- SIMBANSOS	92
e- SIPKD	104
e -SIMPD	67
EARLY WARNING BERBASIS MASYARAKAT	74
e - PBB	72
e- BPHTB	108
e -RETRIBUSI	88
GAZEBO	56
SANITASI WISATA	61
e- PERIJINAN USAHA	91
LEGALITAS RUMAH TANGGA	74
e -PLANNING	105
e- LAYANAN	92
AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT	66
PEMBERDAYAAN EKONOMI NELAYAN	63
PENGEMBANGAN SAPRAS PEMBENIHAN	66
PENINGKATAN SAPRAS PENGELOLAAN SAMPAH	99
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR	77
PEMETAAN DATA SDA DAN LH	95
JEMBATAN GANTUNG	81
PENINGKATAN SAPRAS AIR MINUM	64
SAPRAS IPAL	56
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN PERIKANAN TANGKAP	59
OPTIMALISASI NELAYAN OAP	62
PENGEMBANGAN SAPRAS BUDIDAYA IKAN	55
PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL	55
MEWUJUDKAN LAUT LESTARI DAN ASRI	55
PENGEMBANGAN EKOWISATA DAERAH KONSERVASI	85
REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	92
MENGOPTIMALKAN RTH	67
AKSESIBILITAS MASYARAKAT	69
RUMAH BATIK	73
PELAYANAN ARMADA SANITASI	92
GERAKAN MILENIAL BERSIH	64
MEMBUMIKAN MAKANAN LOKAL	70
POS KESEHATAN KAMPUNG	75

<b>Nama Inovasi</b>	<b>Skor Kematangan</b>
ANAK SEHAT	85
PENDAMPINGAN KDRT	79
FASILITASI PEREMPUAN OAP	61
PEREMPUAN DALAM DATABASE	71
BAYI SEHAT	89
MARTABAT PEREMPUAN	75
BERPOLITIKUS	72
MEMBANGKITKAN KEWIRAUSAHAAN	90
PENGAWASAN	85
KAMPUNG MELEK INTERNET	64
KAMPUNG SIAP IT	70
REHABILITASI PEMBENIHAN	69
MOTIVASI TANI IKAN	82
MOTIVASI IKAN TANGKAP	90
BERDAYAKAN USAHA KECIL	88
MEMBANGUN EKONOMI PESISIR	91
FASILITASI USAHA KECIL	73
PERENCANAAN ASPIRASI BAWAH	95
MEMPERKUAT PERAN PEREMPUAN	64
PERKUAT NELAYAN OAP	56
BOTTOM UP	64



## H. KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG



Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu sebanyak 17%. Selanjutnya adalah variabel Sumber Daya Manusia sebesar 2.0%. Adapun variabel-variabel lainnya memiliki skor 0.0%.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

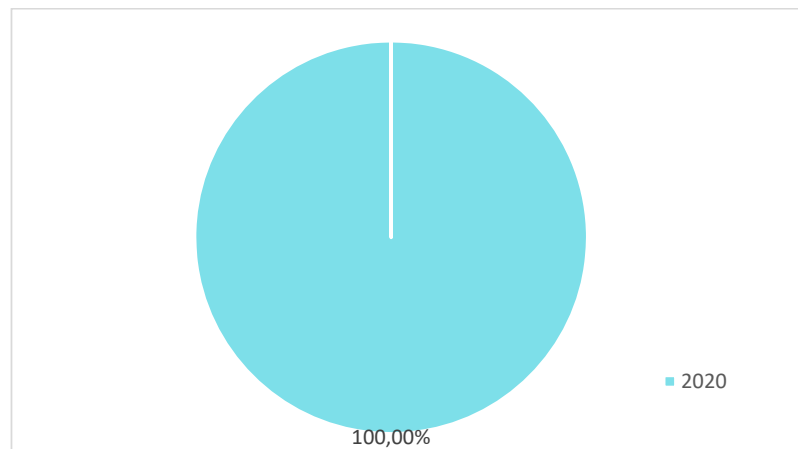


Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar 79 menunjukkan grafik capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh dari Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang belum mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan. Seluruh aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan angka 0.00%, yang artinya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

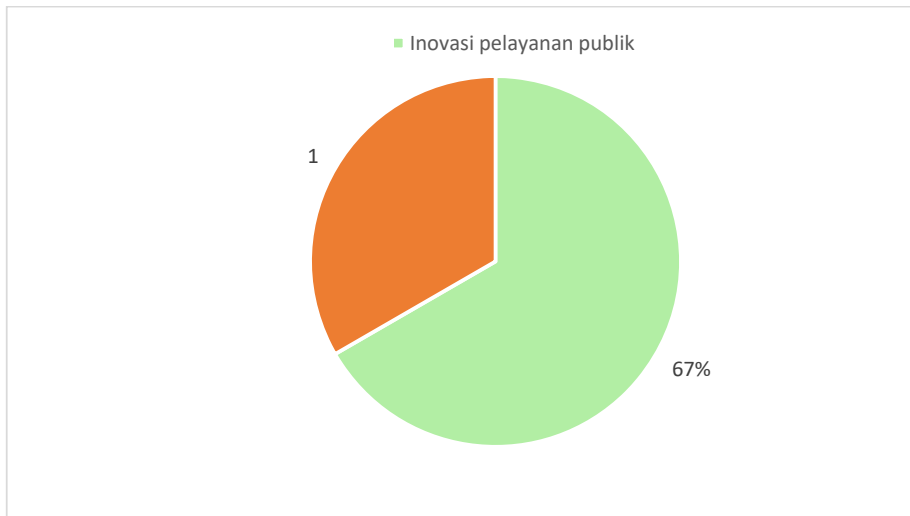
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang diterapkan pada tahun 2020. Tidak ada inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 di Kabupaten Pegunungan Bintang.

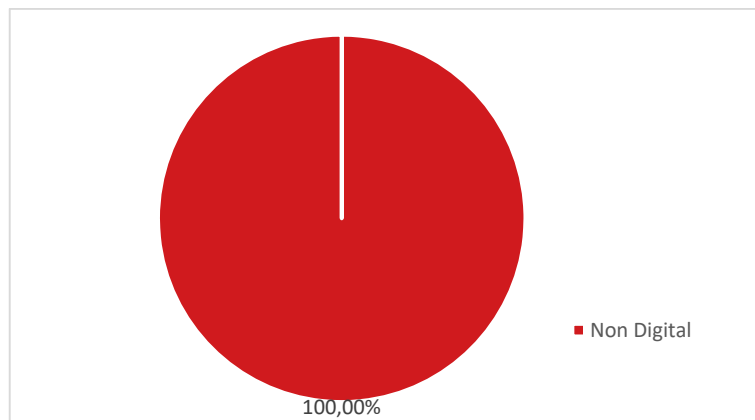
**b. Berdasarkan Bentuk Inovasi**



*Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang*

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk dalam bentuk Inovasi Pelayanan Publik. Tidak ada bentuk inovasi lainnya yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang.

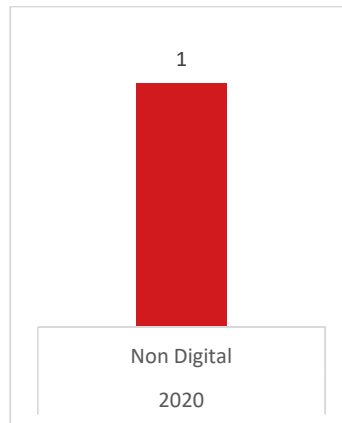
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang*

Gambar 82 menyajikan Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk dalam inovasi Non digital

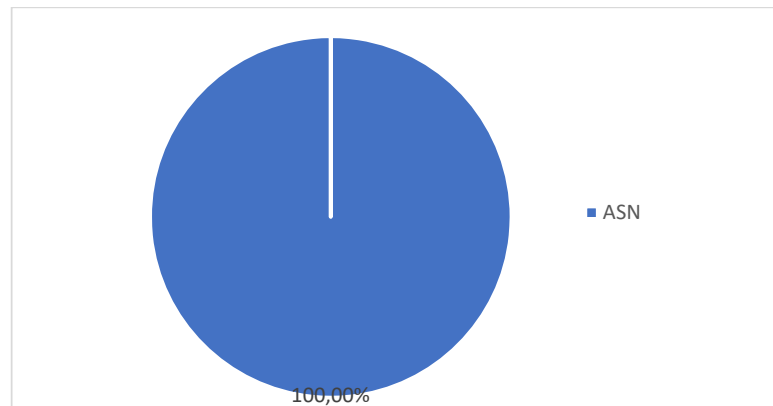
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



*Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pegunungan Bintang*

Berdasarkan tahun dan jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang, diketahui bahwa hanya ada satu inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang. Jenis inovasi tersebut adalah inovasi Non Digital dan diterapkan pada tahun 2020.

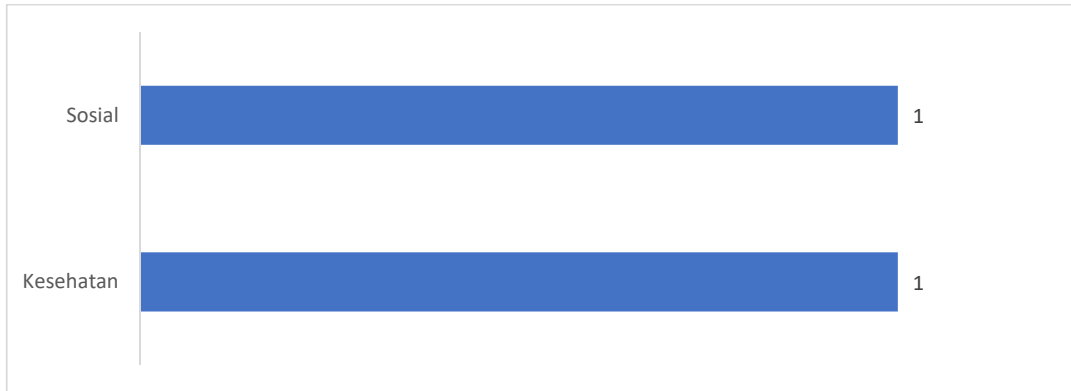
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang*

Gambar di atas menunjukkan grafik Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pegunungan Bintang. Berdasarkan grafik tersebut diketahui inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang diinisiasi oleh ASN.

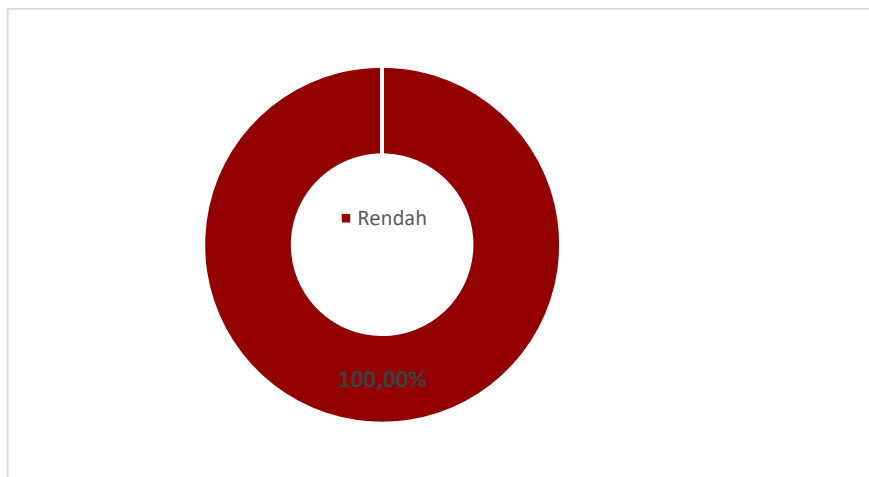
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



*Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pegunungan Bintang*

Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pegunungan Bintang pada Gambar 85 di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang tergolong dalam urusan Kesehatan dan Urusan Sosial

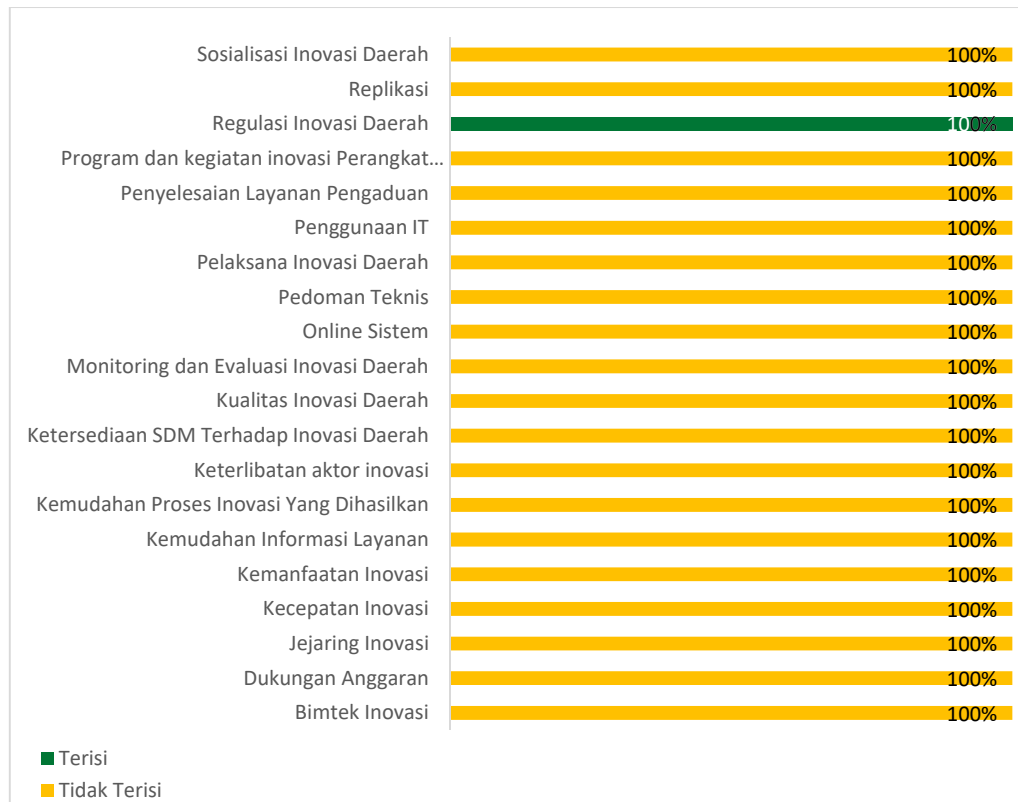
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



*Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pegunungan Bintang*

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Grafik di atas, diketahui bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang mencapai skor kematangan rendah, mencapai 100%. Artinya inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang berada pada skor di bawah 50.

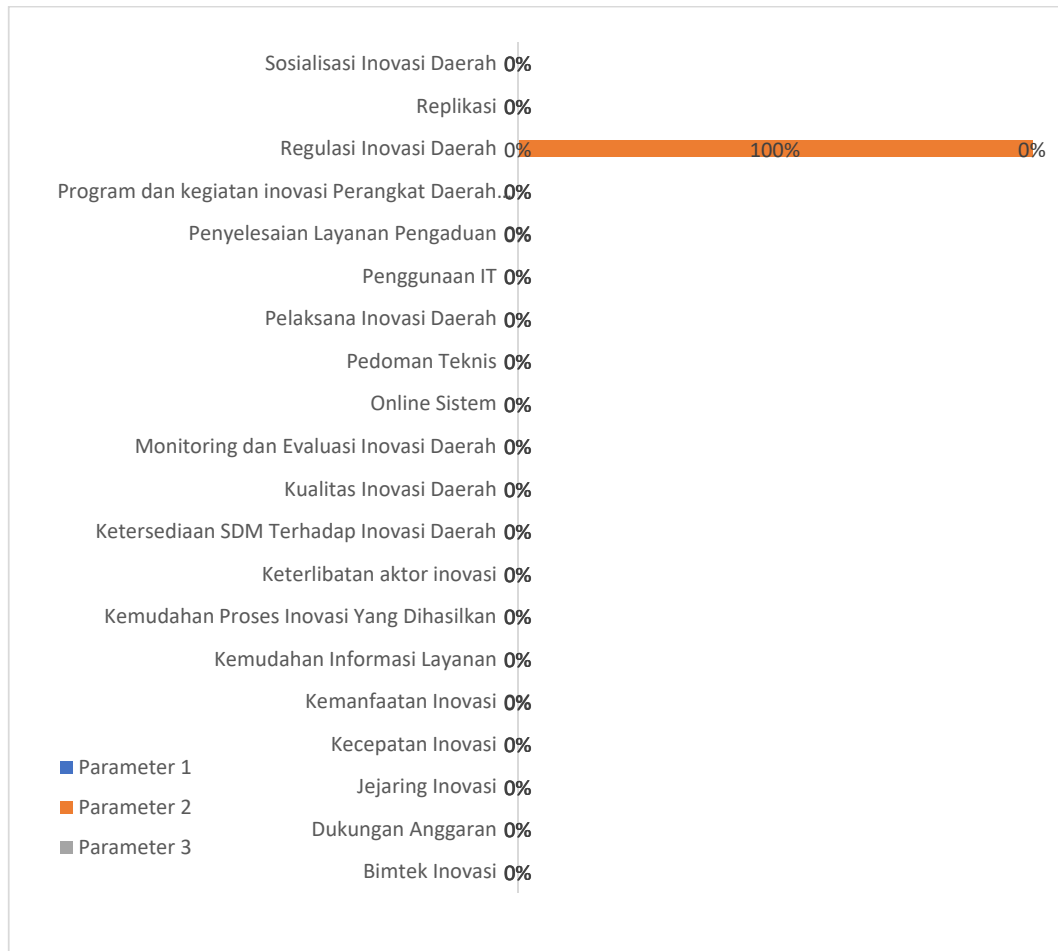
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang*

Gambar 87 menunjukkan grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Melalui grafik tersebut diketahui bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang 95% belum terisi oleh data pendukung. Hanya 5% data pendukung yang telah terisi. Secara lebih rinci, indikator yang telah terisi oleh data pendukung adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah. Adapun indikator-indikator lainnya belum terisi sama sekali oleh data pendukung.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



**Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**

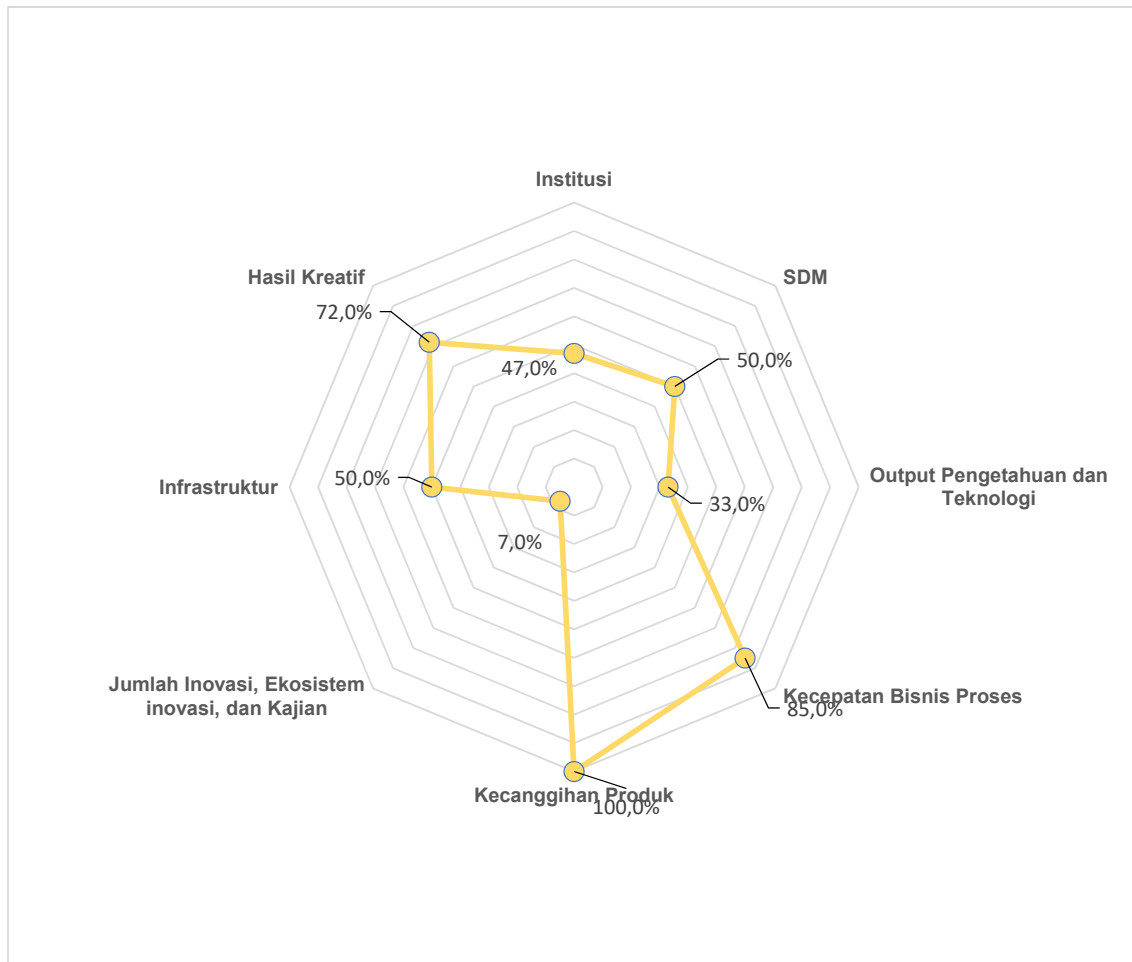
Berdasarkan grafik pada Gambar sebelumnya (Gambar 87), diketahui bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pegunungan Bintang hanya terisi data pendukung sebanyak 5%. Grafik pada Gambar 88 menunjukkan bahwa Indikator yang telah terisi data pendukung tersebut adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah. Adapun data pendukung Regulasi Inovasi Daerah tersebut tersusun atas Parameter 2..

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Pegunungan Bintang beserta Skor Kematangannya**

*Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Pegunungan Bintang beserta Skor Kematangannya*

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi A	8

## I. KABUPATEN SUPIORI

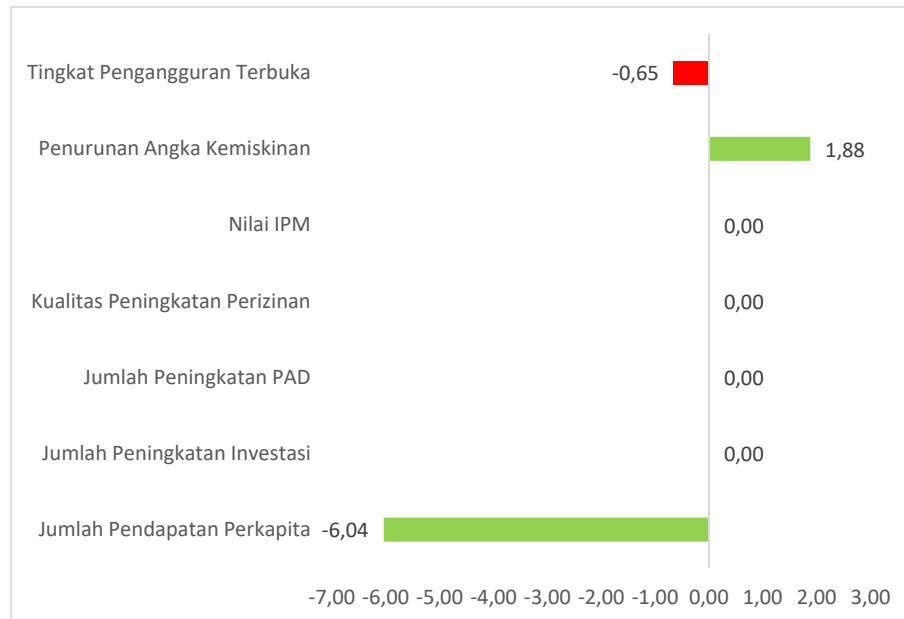


Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Supiori

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Supiori memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu mencapai skor maksimal 100%. Diikuti oleh variabel Kecepatan Bisnis Proses dengan skor capaian sebesar 85.0%. Selanjutnya variabel dengan skor terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, yaitu memiliki skor hanya mencapai 7.0%.



## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



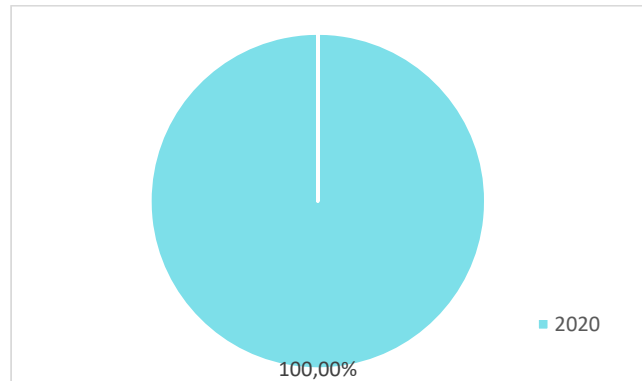
Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Supiori

Grafik pada Gambar 90 menampilkan capaian aspek satuan pemerintah daerah pada Kabupaten Supiori. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Supiori belum mengalami perkembangan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya indikator yang tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Indikator yang tidak mengalami peningkatan sama sekali (skor 0%) adalah indikator Kualitas Peningkatan Perizinan yang semestinya standar nasional parameter indeks inovasi daerah mengalami peningkatan 5%, variabel Jumlah Peningkatan Investasi yang semestinya pada standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar sebesar 8%, variabel Jumlah Peningkatan Investasi, namun untuk variabel ini masih dapat dikatakan selaras dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan peningkatan hanya sebesar 0.45%. Indikator lainnya yang memiliki skor 0% adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun skor ini masih sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang juga bernilai 0%.

Selanjutnya, grafik di atas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Supiori sebesar -0.65% yang artinya pengangguran terbuka di Kabupaten Supiori mengalami peningkatan 0.65%. Namun demikian, angka ini masih lebih baik dibandingkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 0.95%. Indikator berikutnya penurunan angka kemiskinan sebesar 1.88%, yang artinya angka kemiskinan di Kabupaten Supiori mengalami penurunan sebesar 1.88%. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan hanya sebesar 0.02%. Adapun indikator yang jelas menunjukkan penurunan kualitas aspek satuan pemerintah daerah Kabupaten Supiori adalah Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita, yaitu mengalami penurunan sebesar 6.04%, sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

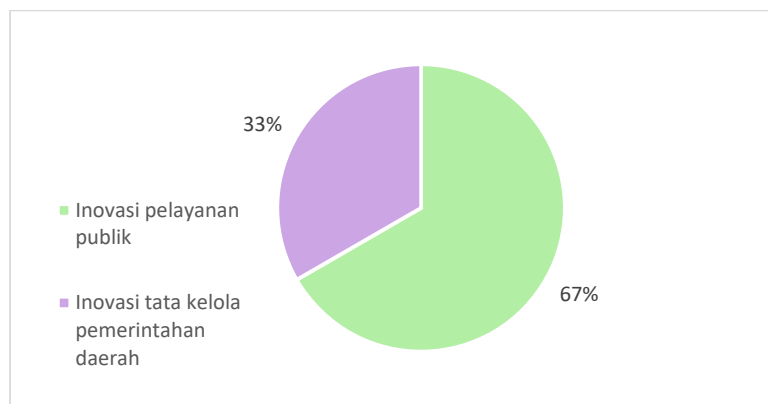
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



*Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Supiori*

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, dari keseluruhan total inovasi yang ada di Kabupaten Supiori, seluruhnya merupakan inovasi mulai diperkenalkan dan diterapkan pada tahun 2020. Tidak ada inovasi yang dilaporkan telah diterapkan pada tahun 2019.

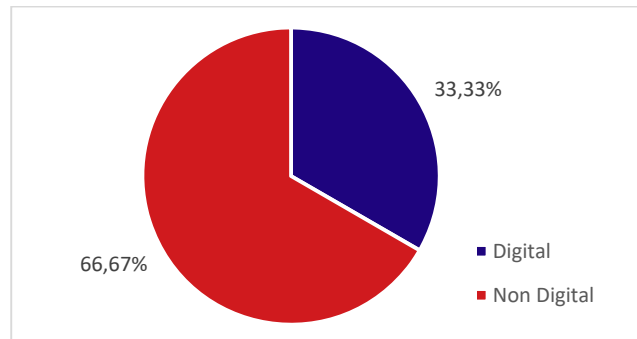
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



*Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Supiori*

Berdasarkan diagram yang disajikan pada Gambar 92 di atas, diketahui bahwa inovasi yang ada pada Kabupaten Supiori terdiri atas 67% inovasi yang tergolong dalam bentuk inovasi pelayanan public, sedangkan 33% sisanya merupakan inovasi berbentuk inovasi tata kelol pemerintahan daerah.

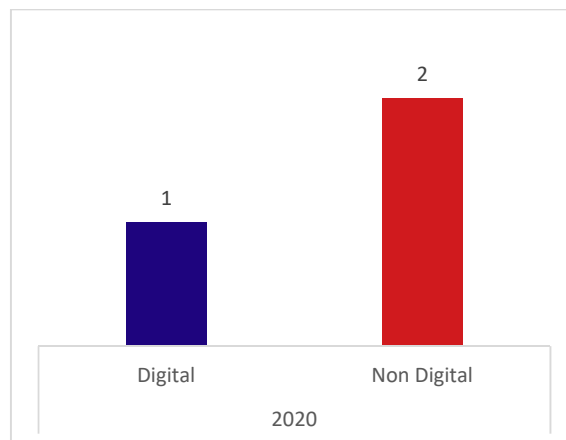
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Supiori*

Jenis inovasi daerah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Digital, Non Digital dan Teknologi. Persentase masing-masing jenis inovasi daerah pada Kabupaten Supiori ditampilkan pada Gambar 93 atas dalam bentuk diagram. Melalui diagram tersebut dapat diketahui bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Supiori didominasi oleh jenis inovasi NonDigital, yaitu sebanyak 66.67% inovasi daerah Kabupaten Supiori merupakan inovasi NonDigital. Sedangkan 33.33% lainnya termasuk dalam jenis inovasi Digital.

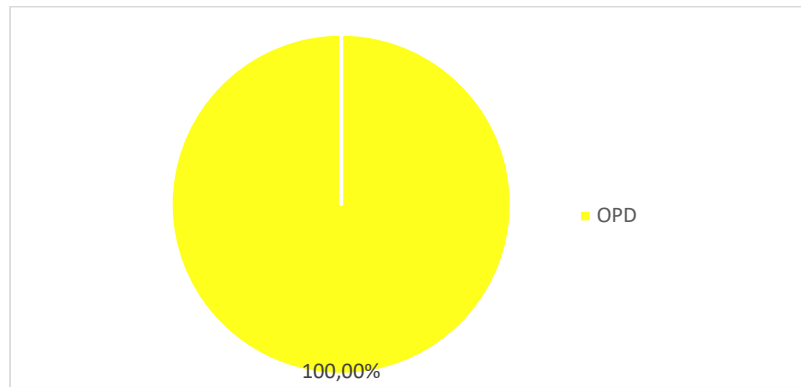
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



*Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Supiori*

Berdasarkan grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Supiori pada Gambar 94, diketahui bahwa jumlah inovasi daerah pada Kabupaten Supiori jenis NonDigital sebanyak 2 inovasi, sedangkan jenis Digital sebanyak 1.

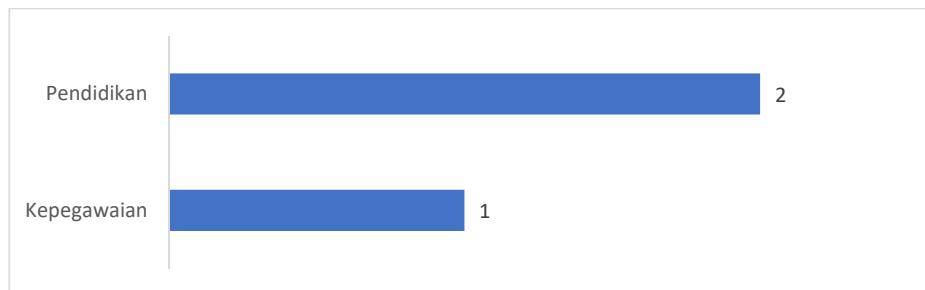
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Supiori*

Keseluruhan inovasi yang terdapat pada Kabupaten Supiori diinisiasi oleh OPD. Hal ini ditunjukkan oleh diagram persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Gambar 95 di atas yang memperlihatkan bahwa persentase OPD mencapai 100%.

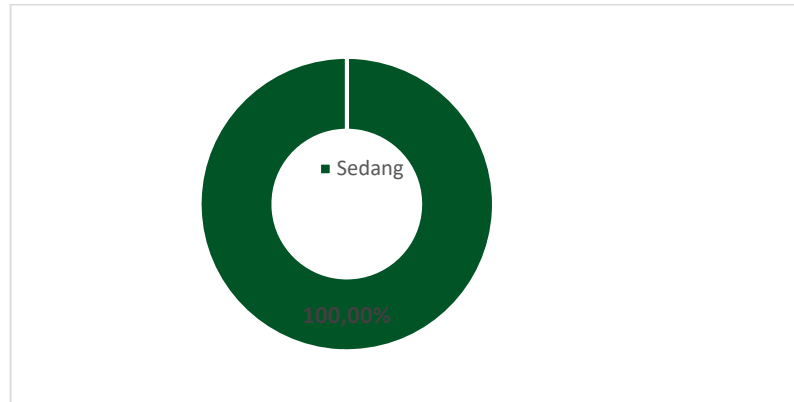
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



*Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Supiori*

Gambar 96 menunjukkan grafik jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan pada kabupaten Supiori. Grafik tersebut menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Supiori terbagi atas dua urusan pemerintahan, yaitu sebanyak 2 inovasi termasuk dalam urusan pendidikan dan sebanyak 1 inovasi tergolong dalam urusan kepegawaian.

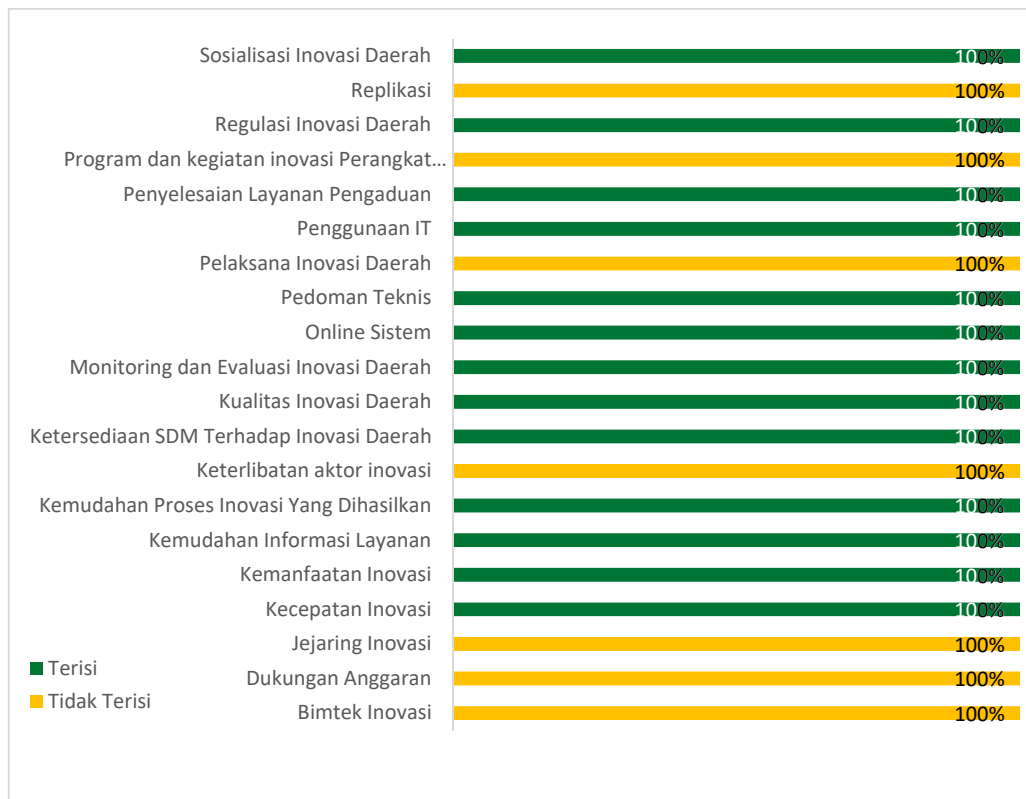
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



*Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Supiori*

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, keseluruhan inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu mencapai 100%. Artinya inovasi yang terdapat pada Kabupaten Supiori memiliki skor kematangan di atas 100.

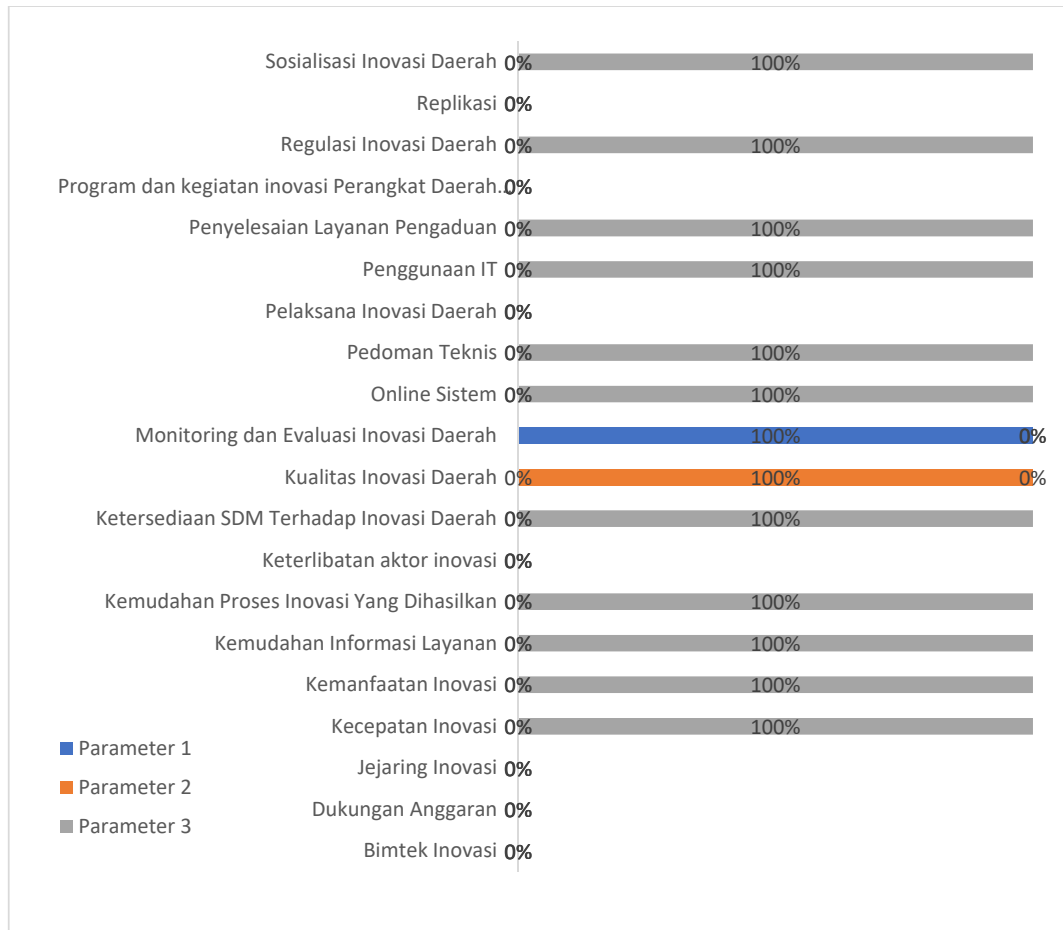
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Supiori*

Gambar 98 menyajikan Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Supiori. Melalui grafik tersebut, diketahui bahwa indikator-indikator indeks inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Supiori mayoritas telah terisi data pendukung. Sebanyak 65% atau 13 indikator telah terisi data dukung, sedangkan 35% lainnya atau sebanyak 7 indikator belum terisi data dukung.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah*

Gambar 99 menampilkan Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa dari data pendukung penyusun indikator-indikator satuan inovasi daerah terdiri atas 55% Parameter 3, 5% Parameter 2, dan 5% Parameter 1. Indikator dengan keterisian data dukung parameter 1 adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah. Adapun indikator dengan keterisian data dukung parameter 2 adalah indikator kualitas inovasi daerah. Sedangkan keterisian data dukung parameter 3 tersebar pada 11 indikator. Terdapat 7 indikator yang tidak terisi data dukung.

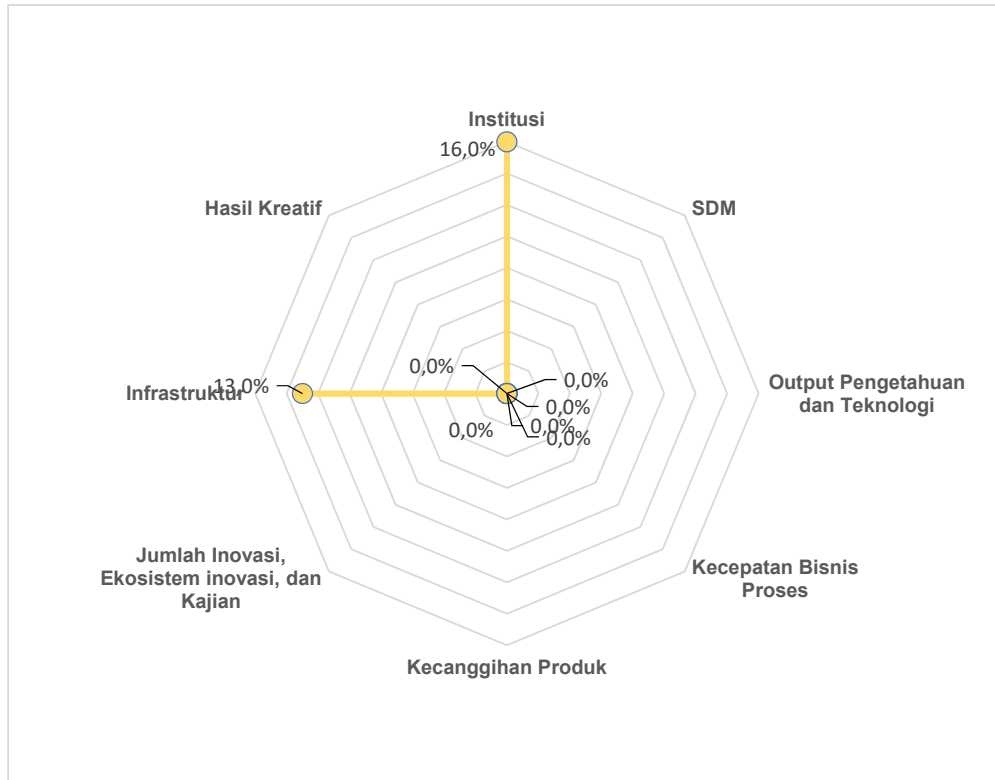
**j. Daftar Inovasi Kabupaten Supiori beserta Skor Kematangannya**

*Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Supiori beserta Skor Kematangannya*

Nama Inovasi	Skor Kematangan
--------------	-----------------

Status PNS Kabupaten Supiori	97
Kunjungan Kasih Supiori Timur	97
Kunjungan Kasih Supiori Utara	97

## J. KABUPATEN TOLIKARA



Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tolikara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, diketahui bahwa capaian variabel ukur indeks inovasi daerah Kabupaten Tolikara tergolong rendah. Mayoritas variabel yang memiliki skor 0%. Hanya dua variabel yang memiliki skor di atas 0%, yaitu variabel Institusi dan Infrastruktur. Adapun skor masing-masing variabel juga dapat dikatakan tergolong rendah, yaitu secara berturut-turut adalah sebesar 16% dan 13%.



## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

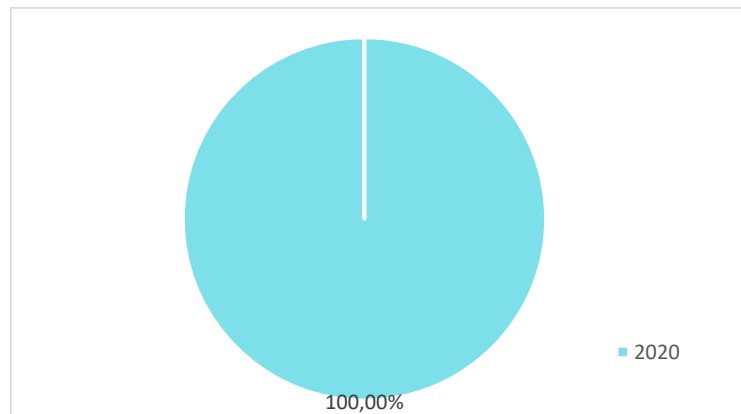


Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tolikara

Gambar 101 menunjukkan grafik capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh dari Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara belum mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan. Seluruh indikator aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tolikara menunjukkan angka 0.00%, yang artinya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

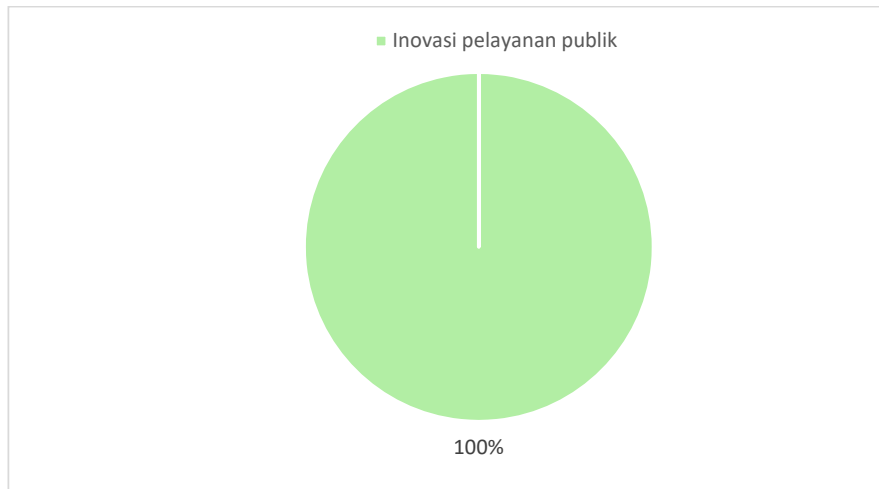
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tolikara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara diterapkan pada tahun 2020. Tidak ada inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 di Kabupaten Tolikara.

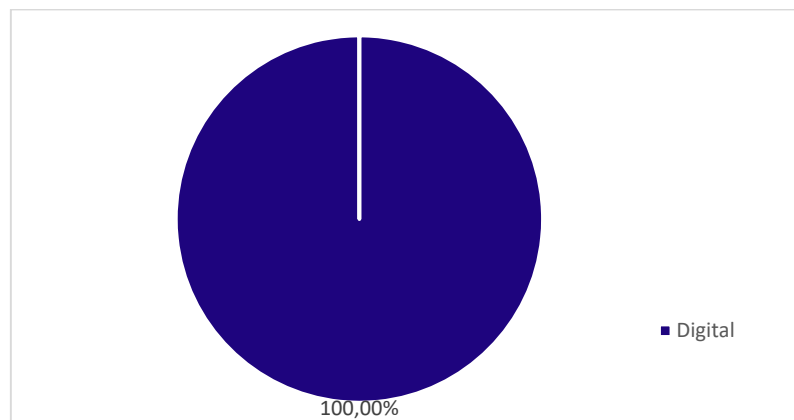
**b. Berdasarkan Bentuk Inovasi**



*Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tolikara*

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara termasuk dalam bentuk Inovasi Pelayanan Publik. Tidak ada bentuk inovasi lainnya yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara.

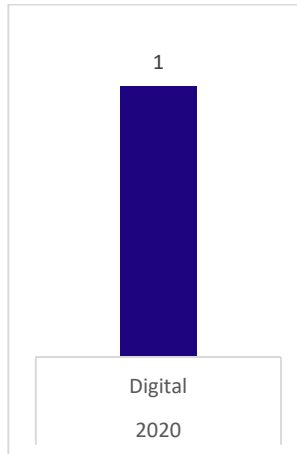
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tolikara*

Gambar 104 menyajikan Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tolikara. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara termasuk dalam inovasi Digital

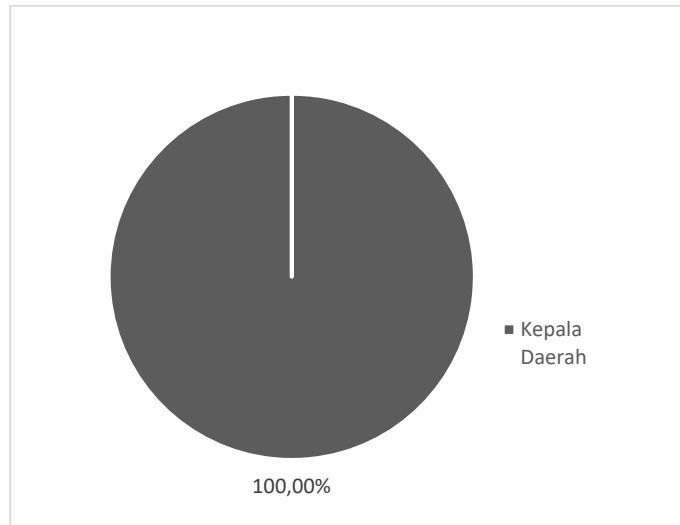
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



*Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tolikara*

Berdasarkan tahun dan jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara, diketahui bahwa hanya ada satu inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara. Jenis inovasi tersebut adalah inovasi Digital dan diterapkan pada tahun 2020.

**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tolikara*

Gambar di atas menunjukkan grafik Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tolikara. Berdasarkan grafik tersebut diketahui inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara diinisiasi oleh Kepala Daerah.

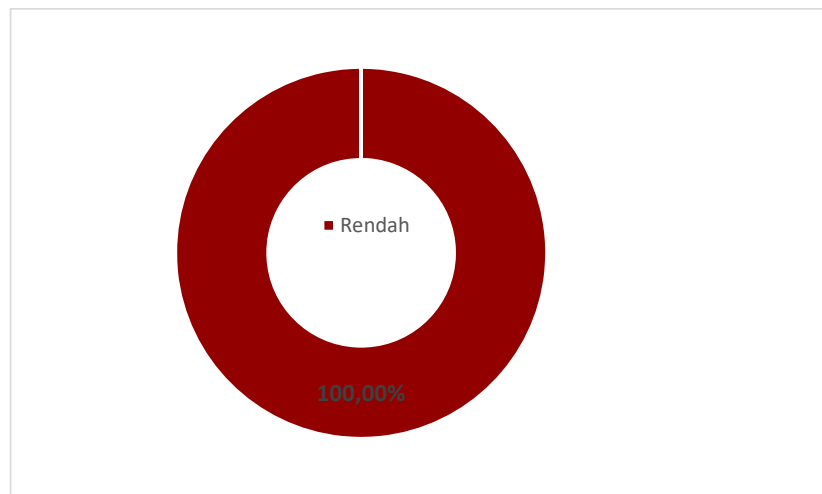
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



*Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tolikara*

Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tolikara pada Gambar 107 di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara tergolong dalam urusan Perdagangan.

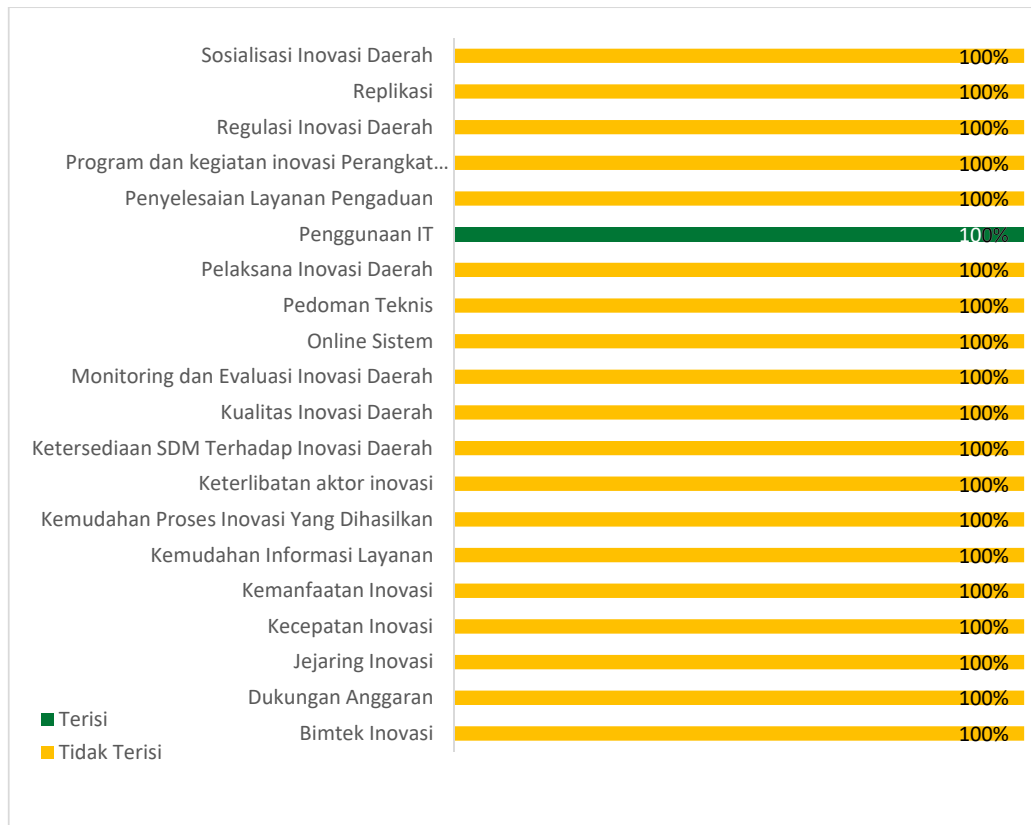
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



*Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tolikara*

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Grafik di atas, diketahui bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara mencapai skor kematangan rendah, mencapai 100%. Artinya inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara berada pada skor di bawah 50.

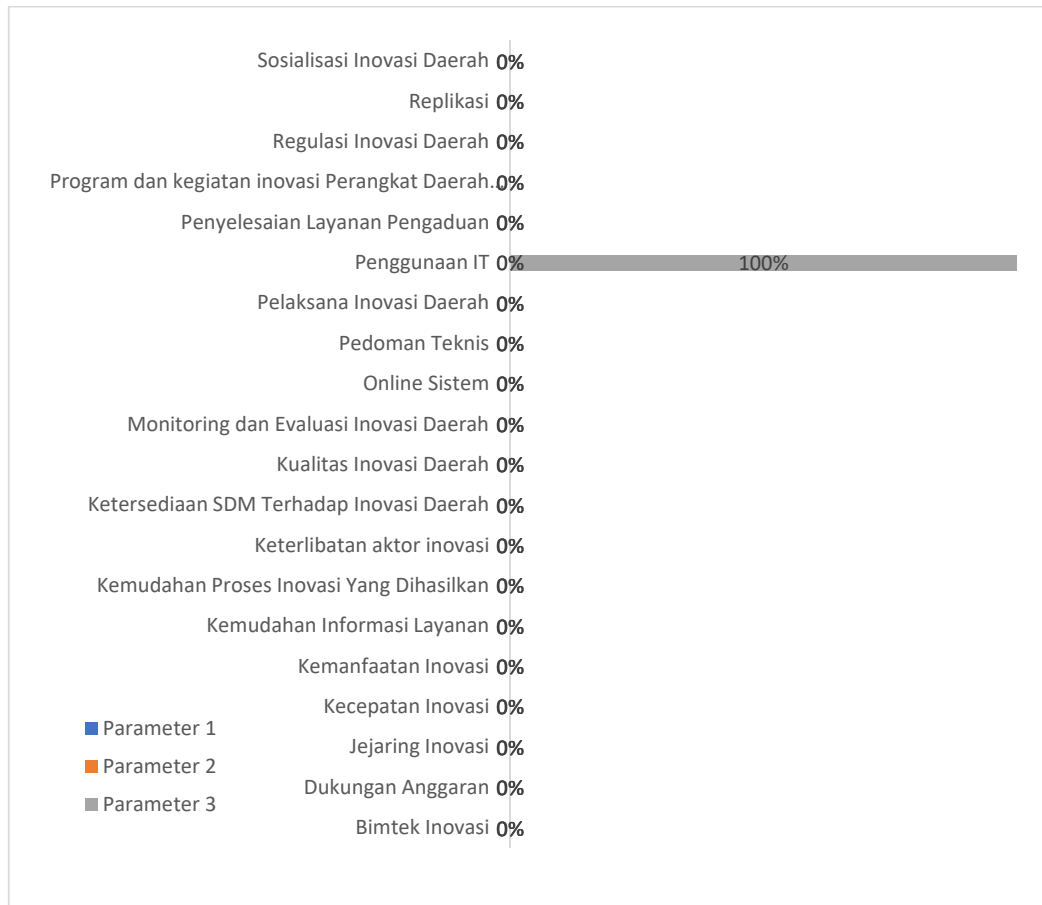
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tolikara*

Gambar 109 menunjukkan grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tolikara. Melalui grafik tersebut diketahui bahwa 95% indikator dalam inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara belum terisi data pendukung. Hanya 5% indikator yang telah terisi data pendukung. Secara lebih rinci, indikator yang telah terisi oleh data pendukung adalah indikator Penggunaan IT. Adapun indikator-indikator lainnya belum terisi sama sekali oleh data pendukung.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



**Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**

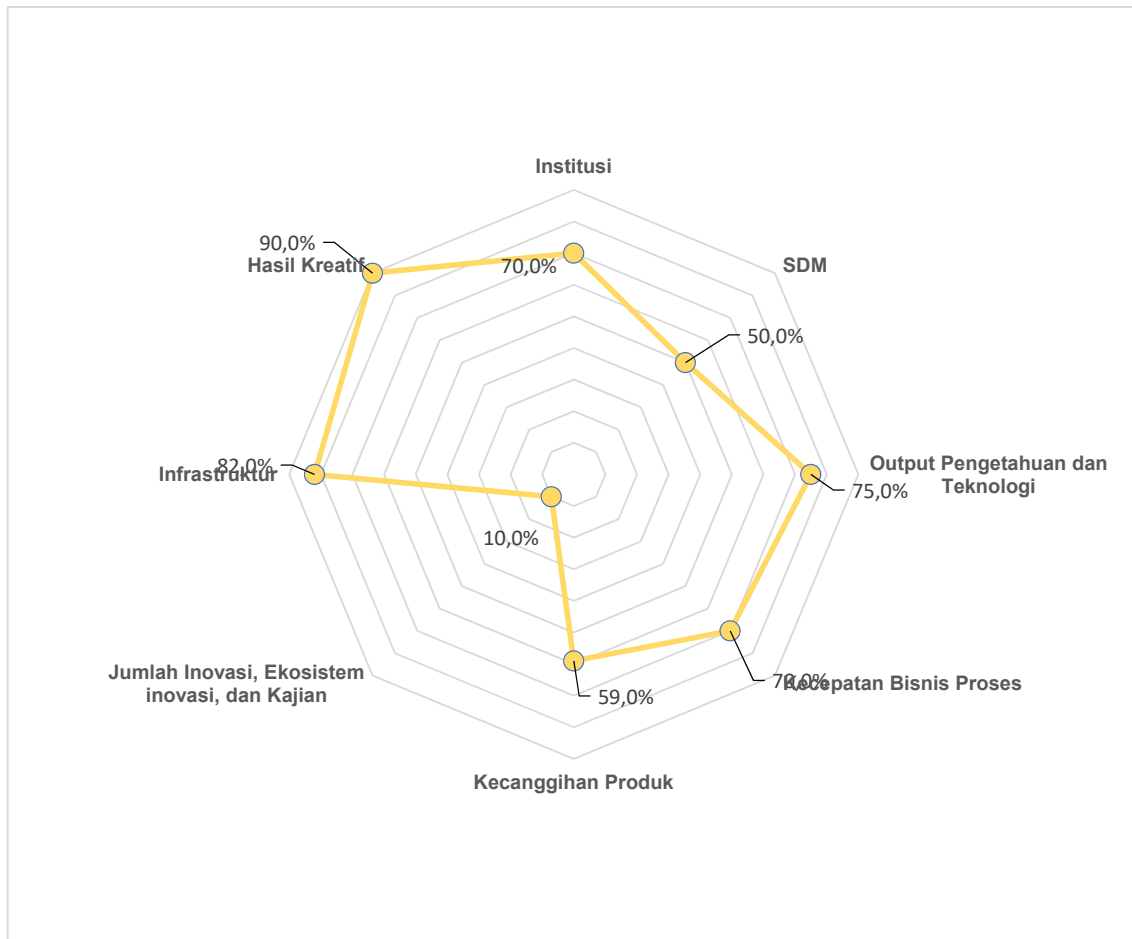
Berdasarkan grafik pada Gambar sebelumnya (Gambar 109), diketahui bahwa hanya 5% indikator inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tolikara telah terisi data pendukung. Selanjutnya grafik pada Gambar 110 menunjukkan bahwa Indikator yang telah terisi data pendukung tersebut adalah indikator Penggunaan IT dan tersusun atas Parameter 3.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Tolikara beserta Skor Kematangannya**

*Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Tolikara beserta Skor Kematangannya*

Nama Inovasi	Skor Kematangan
GERAKAN BERDAGANG SISTEM ON LINE	6

## K. KOTA JAYAPURA



Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Jayapura

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Jayapura memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu mencapai persentase 90,0%, diikuti oleh variabel Infrastruktur dengan persentasenya yang mencapai 82,0%. Selanjutnya variabel Output Pengetahuan dan Teknologi memiliki nilai 75%. Variabel Kecepatan Bisnis Proses dan Institusi sama-sama memiliki persentase 70%. Adapun variabel dengan persentase terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian, yaitu hanya sebesar 10,0%.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura

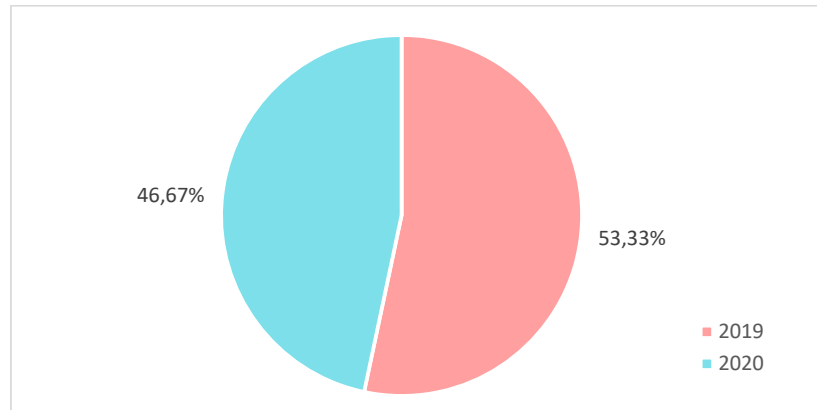
Gambar 112 menunjukkan grafik capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh dari Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura belum mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan. Terlihat bahwa peningkatan persentase hanya terjadi pada Indikator Jumlah Peningkatan Investasi, yakni mencapai 822.50%. Adapun aspek lain yang juga mengalami peningkatan adalah Jumlah Peningkatan PAD, yaitu sebesar 12.65%. Angka ini melebihi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang sebesar 8%. Selain kedua indikator tersebut, indikator lainnya mengalami penurunan, Perurunan yang masih di dalam batas standar nasional parameter indeks inovasi daerah hanya indikator Jumlah Pendapatan Perkapita, dimana ditampilkan pada grafik bahwa indikator Jumlah Pendapatan Perkapit sebesar -1.67%, sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar -1.85%.

Selanjutnya indikator yang mengalami penurunan kualitas adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, dan Kualitas Peningkatan Perizinan. Aspek Kualitas Peningkatan Perizinan. indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -2.15% artinya tingkat pengangguran terbuka di Kota Jayapura mengalami peningkatan sebesar 2.15%, sedangkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan angka pengangguran terbuka sebesar 0.92%. Begitu pula dengan Penurunan Angka Kemiskinan menunjukkan angka -12% yang artinya angka kemiskinan di Kota Jayapura mengalami peningkatan sebesar 12%, sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan sebesar 0.02%. Berikutnya indikator Nilai IPM Kota Jayapura mengalami penurunan sebesar 22.0%, dimana angka ini memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan angka 0% (tidak ada penurunan maupun peningkatan). Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan Kota Jayapura mengalami penurunan sebesar 7.83%, disaat standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 5%.



## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

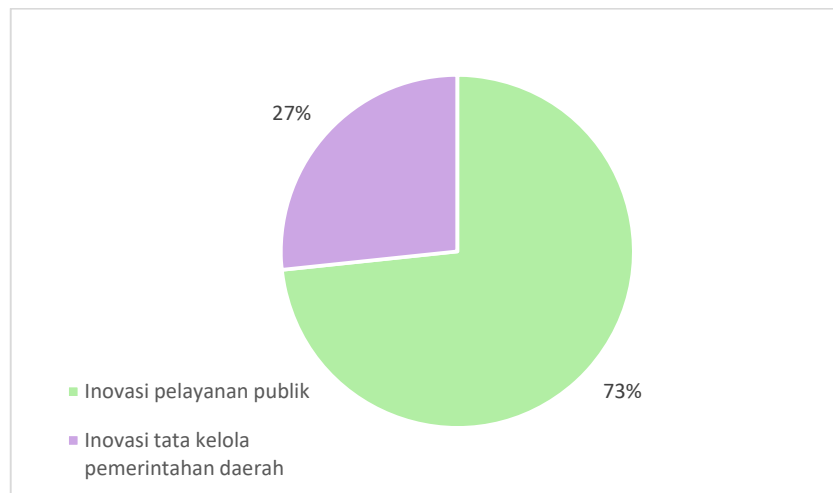
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Jayapura

Gambar 113 menampilkan diagram persentase inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi, Melalui diagram tersebut diketahui bahwa mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Jayapura telah diterapkan sejak tahun 2019. Sebanyak 53.33% inovasi diterapkan sejak tahun 2019 sedangkan inovasi yang dilaporkan diterapkan pada tahun 2020 ada sebanyak 46.47%.

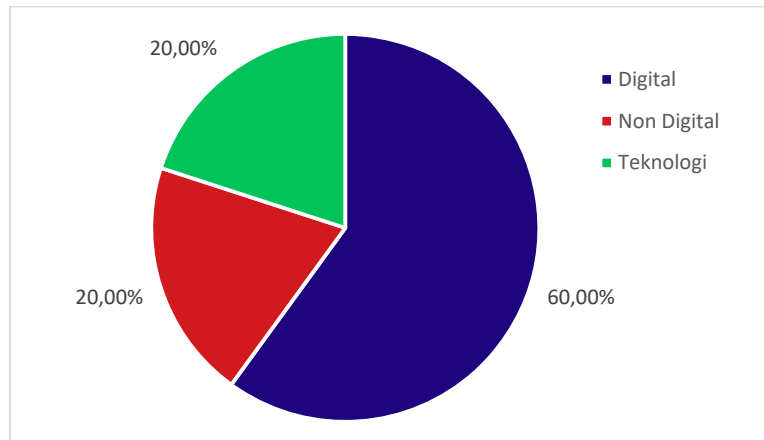
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Jayapura

Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Jayapura telah disajikan pada Gambar 114. Berdasarkan bentuknya, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Jayapura didominasi oleh Inovasi Pelayanan Publik. Hal ini ditunjukkan oleh angka persentase yang mencapai 73% pada Inovasi Pelayanan Publik. Adapun inovasi daerah lainnya termasuk dalam bentuk inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

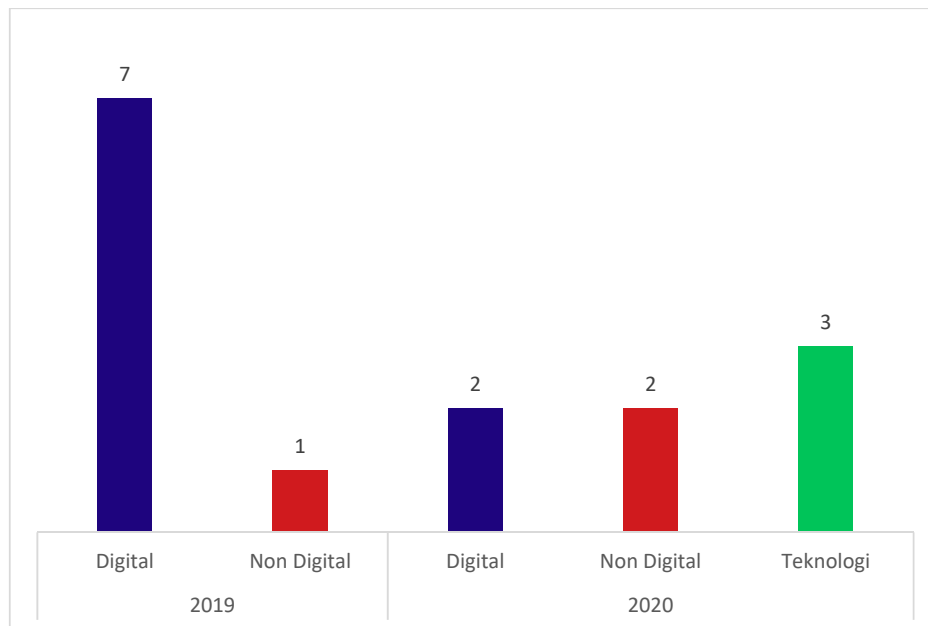
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



*Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Jayapura*

Inovasi daerah di Kota Jayapura apabila dilihat berdasarkan jenis inovasinya terbagi menjadi tiga, yaitu Inovasi Digital, Inovasi NonDigital, dan Inovasi Teknologi. Secara keseluruhan inovasi daerah Kota Jayapura didominasi oleh Inovasi jenis Digital, yaitu mencapai persentase 60.0%. Adapun inovasi jenis Non Digital Dan Teknologi memiliki persentase yang sama, yaitu 20%.

**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**

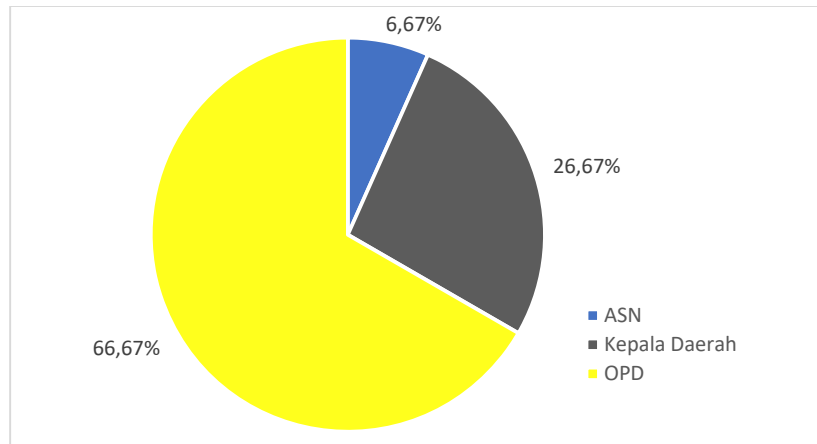


*Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Jayapura*

Gambar 116 menampilkan Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Jayapura. Secara keseluruhan, jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 8 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 7 inovasi. Namun demikian, terjadi perkembangan yang ditunjukkan dengan munculnya inovasi digital

di tahun 2020, dimana terlihat pada tahun 2019 tidak ada inovasi digital. Selanjutnya, secara lebih detail terlihat bahwa inovasi Digital mengalami penurunan dari tahun 2019 berjumlah 7, sedangkan pada tahun 2020 hanya ada 2 inovasi digital yang dilaporkan. Sebaliknya, inovasi non digital mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dilaporkan terdapat 1 inovasi non digital, sedangkan pada tahun 2020 terdapat ada 2 inovasi non digital yang dilaporkan.

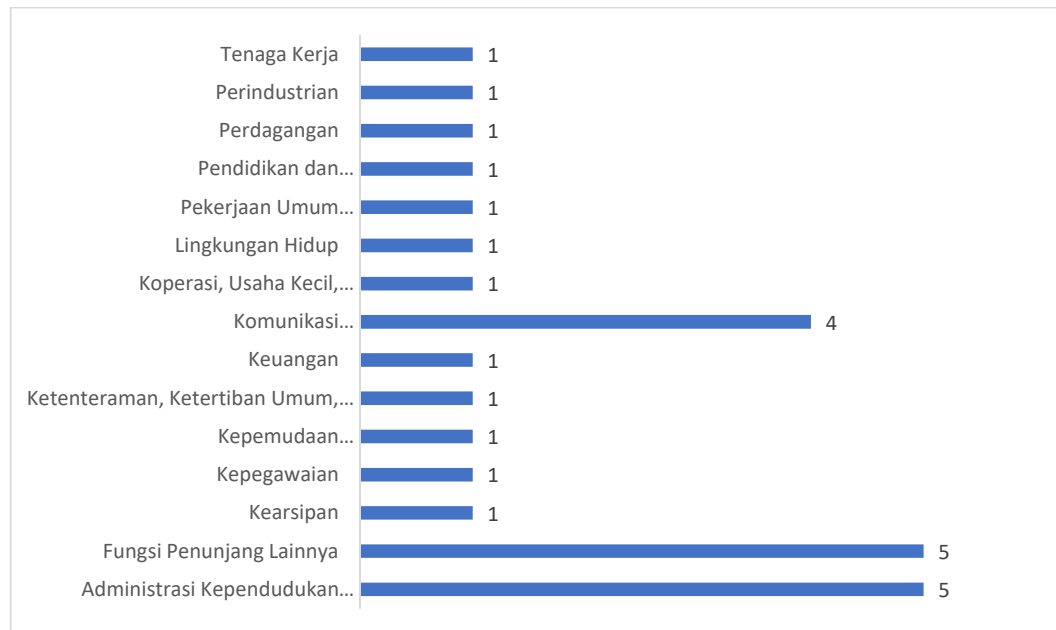
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



*Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Jayapura*

Berdasarkan Diagram Persentase Inisiator Inovasi Daerah Kota Jayapura yang ditampilkan pada Gambar 117 diketahui bahwa terdapat tiga pihak yang menjadi inisiator inovasi daerah di Kota Jayapura pada tahun 2021, yaitu OPD, Kepala Daerah, dan ASN. Mayoritas inovasi daerah Kota Jayapura diinisiasi oleh perangkat daerah (OPD), yaitu mencapai 66.67%. Selanjutnya inovasi daerah di Kota Jayapura yang diinisiasi oleh Kepala Daerah ada sebanyak 26.67%, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 6.67% diinisiasi oleh ASN. Tidak ada inovasi daerah Kota Jayapura yang dilaporkan diinisiasi oleh DPRD.

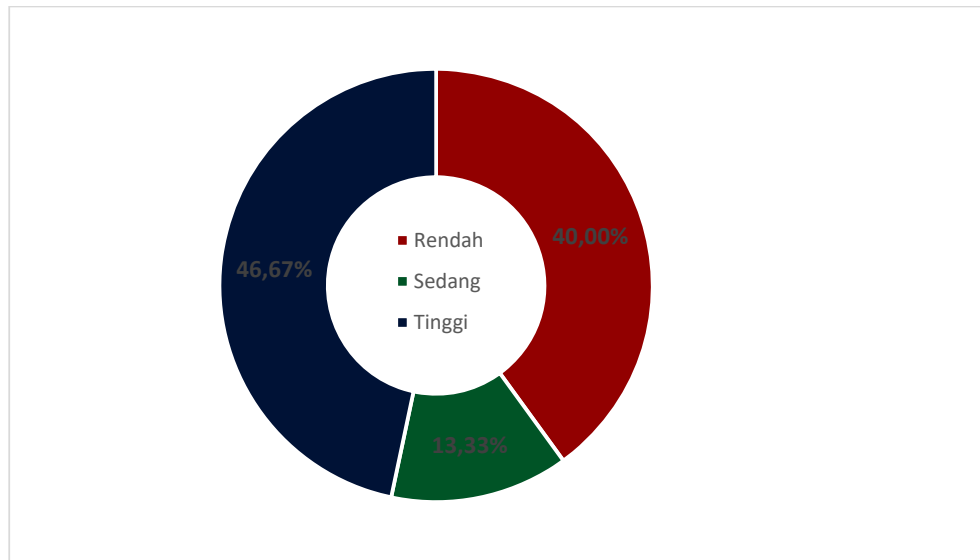
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



*Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Jayapura*

Sebaran inovasi daerah pada Kota Jayapura berdasarkan urusan pemerintahan ditampilkan pada Gambar 118. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa Inovasi daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaporkan oleh Kota Jayapura didominasi oleh urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Urusan Fungsi Penunjang Lainnya, yaitu masing-masing sebanyak 5 inovasi. Selanjutnya urusan Komunikasi dan Informatika yang memiliki 4 inovasi. Adapun inovasi lainnya tersebar dalam urusan-urusan Pemerintahan lainnya, dimana terdapat sebanyak satu inovasi di masing-masing urusan.

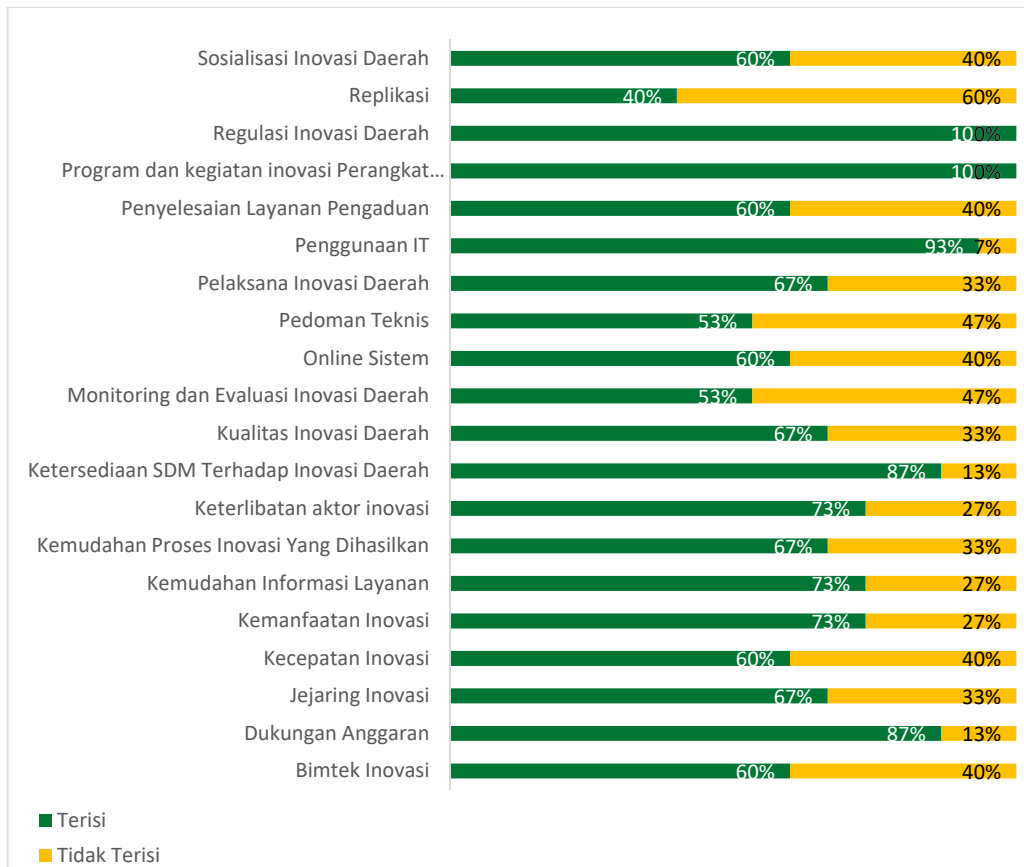
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



*Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Jayapura*

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu mencapai 46.47% inovasi. Artinya mayoritas inovasi daerah Kota Jayapura berada skor antara 50-100. Namun demikian, tidak sedikit pula inovasi yang masih pada level kematangan rendah atau skor di bawah 50, yaitu sebanyak 40.00%. Adapun inovasi yang sudah mencapai skor kematangan tinggi (skor di atas 100) sebesar 13.33%. Hal ini menunjukkan inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Jayapura mayoritas sudah memiliki skor kematangan di atas 50.

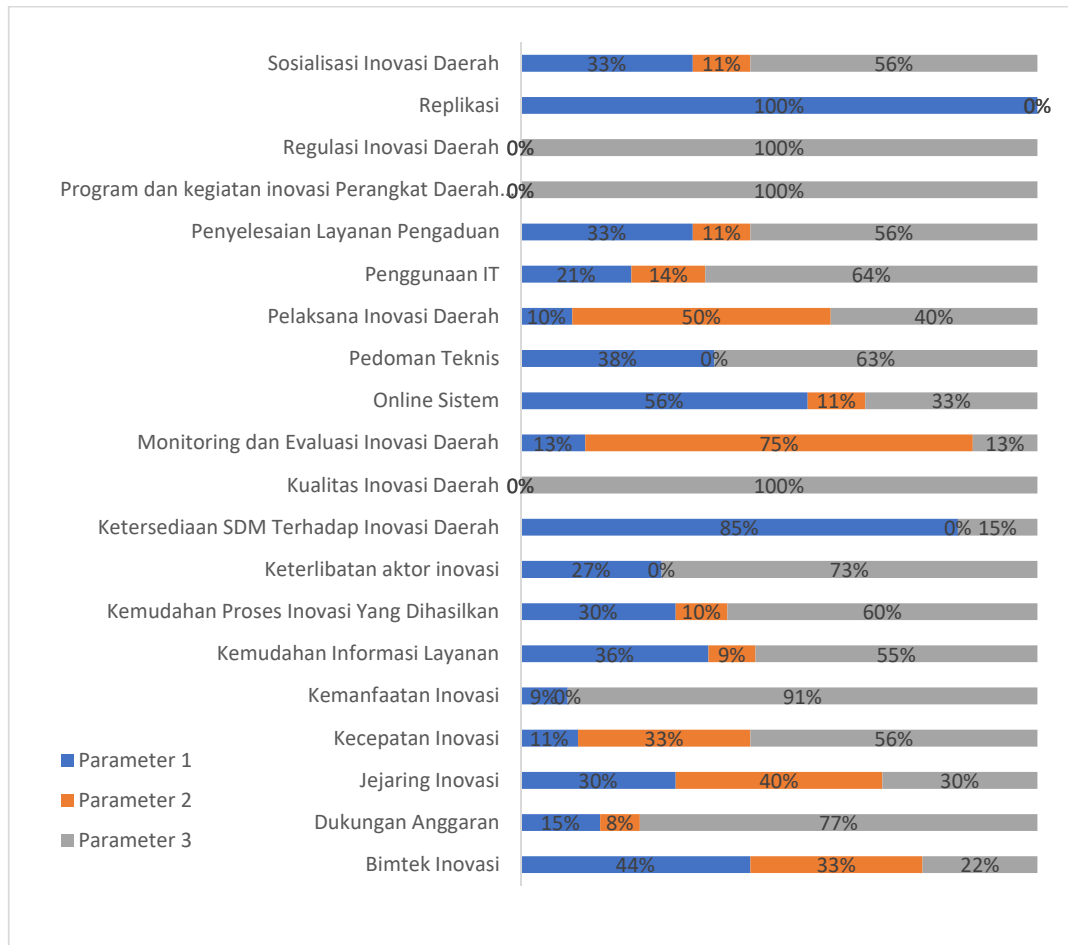
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Jayapura*

Berdasarkan Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Jayapura yang ditampilkan Gambar 120, diketahui bahwa dari 15 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Jayapura, mayoritas inovasi telah terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah. Rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 70.0%, sedangkan 30% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator dengan keterisian data pendukung penuh yaitu mencapai 100% adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPd. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 60%.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



*Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Jayapura*

Gambar 121 menunjukkan Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah. Grafik tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung, 55.10 data pendukung termasuk dalam kategori parameter 3, selanjutnya 15.30% data dukung termasuk dalam parameter 2, dan sebanyak 29.60% data pendukung tergolong parameter 1. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, indicator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, dan indicator Kualitas Inovasi Daerah. Selanjutnya Indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indicator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, yaitu sebanyak 75%. Adapun indicator dengan tingkat keterisian data dukung parameter

**j. Daftar Inovasi Kota Jayapura beserta Skor Kematangannya**

*Tabel 12. Daftar Inovasi Kota Jayapura Numfor beserta Skor Kematangannya*

Nama Inovasi	Skor Kematangan
KITARUNG (Informasi Tata Ruang Kota Jayapura)	88
Pengadaan Truk Sampah Compactor	18
Penyusunan LPPD Walikota berbasis aplikasi e-Youtefa	119

APLIKASI E KELURAHAN TRIKORA	110
DESAIN RUANG PELAYANAN MASYARAKAT	32
E-Kelurahan	53
Aplikasi E-Kinerja Sistem Informasi Pembayaran Tunjangan dan Remunirasi Berbasis Kinerja (si-BTM)	143
Membuat Website <a href="http://dispورا.jayapurakota.go.id">dispورا.jayapurakota.go.id</a>	43
PelayanAn CEpat KependuDUKAn dan penCATatan siPIL (PACEDUKCAPIL)	129
Sistem Pelayanan Surat Administrasi Kelurahan (SPSAK)	113
E-Kelurahan	125
Aplikasi E- Kelurahan trikora	124
DESAIN RUANGAN PELAYANAN MASYARAKAT	27
Penagihan retribusi kios Pasar Hamadi secara elektronik	18
Website Pelayanan Informasi dan Data	24



# ***BAB III***

---

## ***PEMBAHASAN REKOMENDASI***





Pada Provinsi Papua terdapat 11 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

**A. Kabupaten Nabire**

Kabupaten Nabire memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 54,02 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Papua juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Nabire melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

**B. Kabupaten Biak Numfor**

Kabupaten Biak Numfor memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 53,36 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Papua juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Biak Mumfor melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

**C. Kabupaten Merauke**

Kabupaten Merauke memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 53,08 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Papua juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten merauke melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

**D. Kabupaten Supeori**

Kabupaten Supeori memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 49,81 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Papua juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Supeori melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

**E. Kabupaten Keerom**

Kabupaten Keerom memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 48,05 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Papua juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Keerom melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

**F. Kota Jayapura**

Kota Jayapura memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 46,89 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi,

manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Papua juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Jayapura melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

**G. Kabupaten Jayawijaya**

Kabupaten Jayawijaya memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 41,10 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Papua juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Jayawijaya melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

**H. Kabupaten Jayapura**

Kabupaten Jayapura memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 40,13 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Papua juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Jayapura melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

**I. Kabupaten Mimika**

Kabupaten Mimika memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 11,56 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Papua dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Mimika melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

**J. Kabupaten Tolikara**

Kabupaten Tolikara memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 5,28 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Papua dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Tolikara melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

**K. Kabupaten Pongkor**

Kabupaten Pongkor memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 3,68 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Papua dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Pongkor melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

